



BAB I PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 33 Tahun 2004, dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bupati selaku kepala daerah yang memiliki kuasa pengelolaan keuangan daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah..

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran (TA) 2021 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/316/BAKD, tanggal 5 April 2007. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem yaitu untuk:

1. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem;
2. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana; dan
3. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan TA 2021 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4).

1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

- 2.1 Pemerintahan
- 2.2 Entitas Pelaporan
- 2.3 Entitas Akuntansi
- 2.4 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- 2.5 Perusahaan Daerah

Bab III KEBIJAKAN KEUANGAN (FISKAL) DAN EKONOMI MAKRO

- 3.1 Kebijakan Keuangan (Fiskal)
- 3.2 Ekonomi Makro



Bab IV IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN

- 4.1 APBD dan Perubahannya
- 4.2 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan
- 4.3 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Bab V KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 5.1 Asumsi Dasar dan Basis Pengukuran
- 5.2 Kebijakan Akuntansi Pokok

Bab VI PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 6.1 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 6.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 6.3 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 6.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 6.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 6.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 6.7 Pengungkapan Informasi untuk Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja
- 6.8 Pengungkapan Informasi untuk Kejadian setelah Tahun Pelaporan

Bab VII PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN



BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

2.1 Pemerintahan

2.1.1 Letak Geografis

Karangasem adalah salah satu dari sembilan kabupaten di Provinsi Bali, yang terletak diantara 08°00'00"- 08°41'37,8"LS dan 115°35'9,8"- 115°54'8,9"BT di ujung Timur Pulau Bali. Berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng disebelah Barat, Laut Bali di sebelah Utara, Selat Lombok di sebelah Timur, serta Samudra Indonesia di sebelah Selatan. Luas Kabupaten Karangasem adalah 839,54 km² atau 14,90% dari luas Provinsi Bali yang mempunyai luas 5.632,86 km².

2.1.2 Dasar Hukum Pembentukan

Sebagai sebuah kabupaten, Karangasem dibentuk berdasarkan UU Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pusat pemerintahan Kabupaten Karangasem terletak di Kota Amlapura sekaligus sebagai ibu kota kabupaten. Kabupaten Karangasem merupakan daerah otonom yang menjadi bagian dari Provinsi Bali.

2.1.3 Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Karangasem merupakan bagian integral dari Pemerintah Republik Indonesia. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagai Daerah Otonom. Pemerintah Kabupaten Karangasem mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Karangasem dibagi menjadi 8 (delapan) Kecamatan, 3 (tiga) Kelurahan, 75 Desa Dinas, 554 Banjar Dinas, 52 Lingkungan, 190 Desa Adat/Pakraman dan 741 Banjar Adat (berdasarkan data Karangasem Membangun Tahun 2022). Domisili Kantor Pemerintah Kabupaten Karangasem berada di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 31, Amlapura.

Kepala Daerah (Bupati) selaku pemimpin Kabupaten Karangasem pada saat penyusunan laporan ini adalah I Gede Dana, S.Pd, M.Si dan dibantu oleh Wakil Bupati, I Wayan Artha Dipa, SH,MA. Tahun 2021 merupakan awal masa jabatan kepala daerah yang dipilih untuk masa jabatan 2021 - 2026.

2.2 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Karangasem berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 tahun 2016 adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem yang mempunyai kewajiban untuk menyusun konsolidasi Laporan Keuangan Entitas Akuntansi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2021.



2.3 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Laporan keuangan Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan data keuangan yang disiapkan oleh entitas akuntansi, yakni para pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 tahun 2016 ditetapkan Pengguna anggaran dan pengguna barang tersebut terdiri dari: 2 Sekretariat (Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah dengan 10 Unit Bagian), 23 Dinas, 5 Badan, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 1 unit RSUD, 1 Inspektorat, dan 8 Kecamatan.

2.4 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karangasem baru bisa diterapkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem sesuai Peraturan Bupati Karangasem Nomor 11 Tahun 2010. BLUD RSUD menyajikan Laporan Keuangan BLUD serta RSUD sebagai entitas akuntansi menyajikan Laporan Keuangan RSUD yang memuat BLUD didalamnya.

2.5 Perusahaan Daerah

Pemerintah Kabupaten Karangasem membentuk suatu perusahaan daerah yang ditujukan untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Karangasem dan dikelola secara profesional yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem. PDAM Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1976. Modal PDAM Kabupaten Karangasem seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem.



BAB III

KEBIJAKAN KEUANGAN (FISKAL) DAN EKONOMI MAKRO

3.1 Kebijakan Keuangan

Peran Pemerintah Daerah di era otonomi daerah sangat besar sekali, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus pemerintahannya sendiri, termasuk pengembangan ekonomi daerah berdasarkan kekayaan potensi daerah tersebut. Untuk mengemban tugas tersebut, pemerintah harus berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerahnya.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan daerah, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang dapat mengukur perkembangan pembangunan suatu daerah, indikator tersebut diantaranya pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, serta mengatasi pengangguran dan menekan kesenjangan ekonomi.

Dengan adanya wabah virus Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat luas, tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus yang bermula dari Kota Wuhan, Tiongkok, ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat, menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah Covid-19 sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak virus Covid-19 terhadap industri. Beberapa stimulus ekonomi diluncurkan, bahkan Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk melakukan *social distancing* termasuk *work from home* (WFH).

Bali yang menitikberatkan perekonomiannya dari sektor pariwisata menjadi pukulan yang berat karena dengan ditutupnya penerbangan dan daerah tujuan wisata, berakibat menurunnya pendapatan dari sektor pariwisata dan berdampak juga pada sektor-sektor yang lain, begitu juga dengan Kabupaten Karangasem yang mengandalkan pendapatan daerahnya dari sektor pariwisata, pertanian dan pertambangan juga akan mengalami penurunan produksi.

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan, serta dengan mempertimbangkan kondisi, potensi daerah, maka arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi tahun 2021 difokuskan dalam rangka pemulihan perekonomian di Kabupaten Karangasem akibat adanya pandemi Covid-19. Pemulihan perekonomian diarahkan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan pertanian dalam arti luas, pariwisata, dan ekonomi kreatif serta pemantapan ketahanan pangan.

3.1.1 Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Karangasem adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan atau Transfer dari Pemerintah lainnya (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Lainnya) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pengaruh Pandemi Virus Covid-19 yang mewabah hampir di seluruh belahan dunia menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Karangasem dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Terlebih lagi sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak akibat wabah Covid-19 di mana sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap PAD Kabupaten Karangasem setelah sektor Pertambangan.

Dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan, serta dengan mempertimbangkan kondisi, potensi daerah, maka arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi tahun 2021 difokuskan dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten



Karangasem akibat adanya pandemi Covid-19. Pemulihan perekonomian diarahkan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan pertanian dalam arti luas, pariwisata, dan ekonomi kreatif serta pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas dan pemanfaatan lahan kering/lahan kritis.

Pembangunan ekonomi bertumpu pada tiga sektor andalan yaitu: sektor pertanian dalam arti luas, industri kecil, menengah dan koperasi serta sektor pariwisata. Ketiga sektor ini di samping mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian daerah, juga mampu membuka peluang berusaha, peluang kerja serta peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk memantapkan pendapatan atau penerimaan daerah agar rencana belanja pemerintah tidak terganggu maka pemerintah melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan mengoptimalkan pengawasan pajak MBLB yaitu penambahan pos pengawasan yang terintegrasi/terpadu dengan retribusi, serta digitalisasi pengawasan surat tanda pengambilan (faktur) MBLB;
2. Mengintensifkan penerimaan dari pajak daerah selain sektor pajak MBLB maupun retribusi melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah dengan peningkatan pelayanan perpajakan daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi melalui penguatan regulasi dan sosialisasi kebijakan perpajakan dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur perpajakan daerah khususnya fungsi penagihan pajak daerah yaitu Juru Sita Pajak Daerah, Penilai Pajak Daerah, Pemeriksa Pajak Daerah dan PPNS Pajak Daerah;
4. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah;
5. Memperjuangkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya; dan
6. Menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

3.1.2 Belanja Daerah

Belanja penyelenggaraan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar dan pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian dalam arti luas, sektor pariwisata serta ekonomi kreatif, pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas dan pemanfaatan lahan kering/lahan kritis, serta peningkatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth*, *pro poor*, *pro job*, *pro environment*, *pro public*, melalui alokasi anggaran untuk 20% pendidikan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan serta penggunaan indeks relevansi anggaran dalam



penentuan anggaran belanja, penganggaran untuk mitigasi serta kebencanaan dan kerjasama antar daerah.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas keefektivitasan dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tercipta kondisi ekonomi daerah yang stabil. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga faktor eksternal khususnya kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah Provinsi Bali serta kondisi perekonomian kabupaten/kota lain yang berdekatan dengan Kabupaten Karangasem. Sehingga arah kebijakan ekonomi Kabupaten Karangasem disinergikan dengan Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Bali dan Arah Kebijakan Ekonomi Pemerintah Pusat.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem, dilakukan melalui upaya peningkatan ekonomi kerakyatan dengan mendorong berkembangnya usaha-usaha mikro kecil menengah berbasis keunggulan kompetitif yang dimiliki masing-masing daerah serta integrasi sektor pertanian dengan pariwisata berbasis desa adat yang didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kebijakan fiskal APBD yang berpihak terhadap upaya-upaya dimaksud. Disamping itu, kondisi sosial dan politik yang stabil diharapkan dapat mendukung dan mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 diperkirakan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan sangat tergantung atau banyak sekali dipengaruhi oleh *consumption*. Dengan adanya kebijakan mengenai *social distancing*, WFH dan PSBB, tentu konsumsi akan mengalami penurunan yang sangat tajam, serta mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah negatif serta penundaan belanja investasi.
2. Pemberian insentif oleh Pemerintah dari sisi perpajakan, menciptakan pengaruh untuk mendorong aktivitas ekonomi.
3. Arah Kebijakan pembangunan nasional yang diarahkan pada sektor industri, pariwisata, investasi, reformasi sosial dan ketahanan bencana diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
4. Kemudahan proses perijinan selain regulasi tata ruang, keamanan daerah dan sarana prasarana infrastruktur yang memadai diharapkan akan mampu mendorong perkembangan investasi di Kabupaten Karangasem.
5. Pengembangan pariwisata berbasis desa adat yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat serta diintegrasikan dengan potensi unggulan yang dimiliki diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
6. Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas diharapkan mampu mendorong swasembada pangan masyarakat dalam menghadapi situasi pasca pandemi Covid-19.
7. Pengembangan industri kecil dan rumah tangga didukung pelatihan-pelatihan keterampilan bagi masyarakat diharapkan mampu mendorong ekonomi masyarakat untuk lebih berkembang.



8. Peningkatan penerapan dan penguasaan teknologi diharapkan mampu menghasilkan produk yang inovatif dan memiliki daya saing usaha sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi.
9. Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan budaya dan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Walaupun dihadapkan pada tantangan yang semakin berat, prospek perekonomian Kabupaten Karangasem Tahun 2021 diperkirakan tetap optimis. Kinerja pemerintah daerah yang didukung peran swasta dan masyarakat merupakan pendukung keberhasilan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pada kondisi dan permasalahan yang dihadapi maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karangasem pada Tahun 2021 adalah:

1. Industri, Pariwisata dan Investasi;
2. Kesehatan dan Jaring Pengaman Sosial;
3. Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup;
4. Pembangunan SDM, Adat dan Budaya;
5. Infrastruktur; dan
6. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk menutupi kekurangan dana baik untuk keperluan belanja langsung, belanja tidak langsung maupun pengeluaran pembiayaan sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan.

3.2 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 mengacu pada indikator sosial ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karangasem, yaitu (minimal):

1. Tingkat Kemiskinan Tahun 2021 sebesar 6,78%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021 sebesar 2,32%;
3. *Gini Ratio* Tahun 2020 sebesar 0,33%;
4. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021 sebesar 67,36 %;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2020 sebesar (4,45)%;
6. Tingkat Inflasi Tahun 2021 sebesar 2,39%; dan
7. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Tahun 2020 sebesar Rp16,453 Triliun.

3.2.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karangasem

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun(%)
1	Kabupaten Karangasem (%)	5,91	6,78	0,87
2	Kabupaten Karangasem (Ribu Orang)	24,69	28,52	3,83
3	Provinsi Bali (%)	3,78	4,53	0,75
4	Nasional (%)	9,78	9,71	(0,07)
5	Peringkat dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali	9	9	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Karangasem pada Tahun 2020 sebesar 5,91% mengalami peningkatan di mana pada Tahun 2021 persentase penduduk miskin hingga menjadi 6,78%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Karangasem masih di atas provinsi dan di bawah nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 3.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Karangasem

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun(%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab. Karangasem	0,52	0,64	0,12
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,52	0,68	0,16
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,61	1,71	0,10
4	Peringkat dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali	5	6	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

Tabel 3.3 Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Karangasem

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun(%)
1	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Kab. Karangasem	0,06	0,08	0,02
2	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi Bali	0,10	0,15	0,05
3	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Nasional	0,38	0,42	0,04
4.	Peringkat dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali	3	2	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

3.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Karangasem TPT Kabupaten Karangasem Tahun 2020 adalah sebesar 2,42%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun(%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Karangasem (%)	2,42	2,32	(0,10)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	5,63	5,37	(0,26)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	7,07	6,49	(0,58)
4	Peringkat dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali	2		

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

TPT di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,32% sedangkan TPT pada Tahun 2020 adalah sebesar 2,42 % atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2020. Namun dengan demikian TPT Kabupaten Karangasem masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Bali sebesar 3,05%.

3.2.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

1. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
2. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Karangasem Realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Karangasem Tahun 2020 adalah sebesar 0,33 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 3.5 Gini Ratio Kabupaten Karangasem

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun(%)
1	Tingkat Kabupaten Karangasem	0,31	0,33	0,02
2	Tingkat Provinsi Bali	0,37	0,37	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

Sampai laporan ini disusun *Gini Ratio* Kabupaten Karangasem Tahun 2021 belum dirilis oleh BPS, maka *Gini Ratio* yang disajikan adalah tahun 2020 dan 2019, dimana tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Karangasem untuk Tahun 2020 yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,33 lebih besar dari tahun 2019 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Provinsi.

3.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu: a. Rendah (< 60); b. Sedang ($60 \leq IPM < 70$); c. Tinggi ($70 \leq IPM < 80$); dan d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Karangasem Tahun 2021 adalah sebesar 67,36 poin dengan kategori sangat sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun(%)
1	Kabupaten Karangasem	67,35	67,36	0,01
2	Provinsi Bali	75,50	75,69	0,19
3	Indonesia/Nasional	71,94	72,29	0,35
4	Peringkat dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Bali	9	9	-

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Karangasem



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Karangasem tahun 2021 adalah sebesar 67,36 poin, dibandingkan Tahun 2020 sebesar 67,35 poin mengalami kenaikan sebesar 0,01poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 70,56 tahun pada Tahun 2021, lebih lama tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 6,33 tahun dengan harapan lama sekolah 12,42 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp10.175.000 atau turun sebesar Rp 62.000 dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kabupaten Karangasem pada saat ini berada pada urutan 9 dari 9 Kab/Kota yang ada di Provinsi Bali.

3.2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 3.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem

No	Uraian	Kabupaten Karangasem		Provinsi Bali	Nasional
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2020
1	PDRB (harga konstan 2010) (Milyar Rp)	11.130,84	10.635,79	147.549,80	10.722.442,70
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50	(4,45)	(9,31)	(2,07)

Sumber Dokumen: BPS Prov Bali

Sampai laporan ini disusun Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2021 belum dirilis oleh BPS, maka Laju Pertumbuhan Ekonomi yang disajikan adalah Tahun 2020 dan 2019. Selama kurun waktu Tahun 2020 - Tahun 2019 perekonomian Kabupaten Karangasem mengalami penurunan rata-rata 9,95%. Dalam laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem lebih baik di Tahun 2020 dibandingkan dari laju pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali.

3.2.6 Laju Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Karangasem dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) Inflasi Ringan (*Creeping Inflation*), Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*), Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit di kendalikan. dan (iv)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Tingkat Inflasi Kabupaten Karangasem didekati dengan tingkat inflasi Singaraja yang memiliki karakteristik cenderung sama. Tingkat Inflasi Kabupaten Karangasem Tahun 2020 adalah sebesar 2,48% dengan kategori sedang dengan berdasarkan inflasi kota Singaraja sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 3.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Karangasem

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun(%)
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Karangasem (%)	2,48	2,39	(0,09)
2	Tingkat Inflasi Provinsi Bali (%)	0,55	-	-
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,68	1,87	0,19

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem

Tingkat inflasi di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,39% mengikuti inflasi Kota Singaraja, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2020 adalah sebesar 2,48% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2021. Namun inflasi Kabupaten Karangasem masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Bali yang sebesar 1,40% pada Triwulan III Tahun 2021.

3.2.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Karangasem

Struktur perekonomian Kabupaten Karangasem dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 3.9 PDRB seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	4.193.772,04	4.349.968,96
2	Pertambangan dan Penggalian	503.987,83	516.243,05
3	Industri Pengolahan	676.224,51	672.698,87
4	Pengadaan Listrik dan Gas	16.881,90	15.852,36
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22.085,19	22.331,20
6	Konstruksi	1.099.394,52	1.083.686,64
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	940.617,98	901.699,06
8	Transportasi dan Perhubungan	3.026.246,93	2.827.469,48
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.009.978,25	1.378.240,43
10	Informasi dan Komunikasi	544.074,04	592.716,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	752.889,05	735.908,33
12	Real Estate	658.421,90	671.709,31
13	Jasa Perusahaan	129.386,08	129.302,75
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.309.821,47	1.334.474,39
15	Jasa Pendidikan	440.047,56	448.049,20
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	357.524,67	380.389,29
17	Jasa lainnya	403.026,12	392.104,53
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	17.084.380,04	16.452.844,86
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	17.084.380,04	16.452.844,86
20	PDRB Provinsi	252.138.879,49	224.214.110,14

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Karangasem



BAB IV
IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN

4.1 APBD dan Perubahannya

Pelaksanaan anggaran Kabupaten Karangasem tahun 2021 mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember Tahun 2020 serta Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2020. Selain kegiatan pembangunan masyarakat, anggaran juga digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 baik penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi serta jaring pengaman sosial. Seiring dengan hal tersebut maka berpengaruh terhadap berjalannya kegiatan pada masing-masing OPD yang diarahkan mendukung dari kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat sehingga terjadi beberapa perubahan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan. Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem melaksanakan beberapa pergeseran anggaran yaitu:

1. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 tanggal 8 April 2021; dan
2. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 tanggal 16 Juni 2021.

Pemerintah Daerah dan DPRD sepakat untuk melaksanakan perubahan anggaran dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 18 tahun 2020 tentang APBD Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 tanggal 14 Oktober 2021.

Kebijakan penganggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemenuhan amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 dengan menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan Covid-19 dengan melakukan *recofusing* anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka pemenuhan anggaran untuk:
 - a. dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19;
 - b. dukungan kepada kelurahan dalam pelaksanaan penanganan Covid-19;
 - c. insentif Tenaga Kesehatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19; dan
 - d. belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
2. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 9 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
3. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan;
4. Pemenuhan anggaran sebesar 25 % yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) yang diarahkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan;



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

5. Pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah khususnya yang mampu menyerap tenaga kerja (pasar tradisional, daerah tujuan wisata);
6. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi, anggaran belanja akan diarahkan pada pengembangan sektor pertanian dalam arti luas yang terintegrasi dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
7. Jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial kepada masyarakat; dan
8. Dukungan terhadap dunia usaha khususnya UMKM serta industri kecil dan menengah.

Rincian program dan kegiatan yang direncanakan atau telah dilaksanakan (termasuk anggaran per kegiatan) dalam penanganan Covid-19, dikelompokkan pada 3 area berikut:

1. Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan dan Belanja Prioritas Lainnya;
Anggaran untuk Penanganan Kesehatan berupa Program dan Kegiatan yang tersebar di beberapa OPD dan ada juga melalui BTT.
2. Perlindungan sosial;
Anggaran untuk Jaring Pengaman Sosial dialokasikan berupa Program dan Kegiatan yang tersebar di beberapa OPD dan BTT.
3. Dukungan ekonomi;
Anggaran untuk Dampak Ekonomi dialokasikan berupa Program dan Kegiatan yang tersebar di beberapa OPD dan BTT.

Jumlah Anggaran dan rincian penanganan Covid-19:

1. Belanja bidang Kesehatan sebesar **Rp56.479.324.769,00**, serta Perlindungan Sosial dan Dukungan Ekonomi sebesar **Rp56.264.472.276,00** yang tersebar menjadi program dan kegiatan di Perangkat Daerah dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.
2. Belanja Tidak terduga: **Rp8.600.000.000,00**, - terdiri dari:
 - a. Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 : Rp6.500.000.000,00
 - b. Penyediaan jaring Pengaman Sosial : Rp 500.000.000,00
 - c. Penanganan dampak ekonomi : Rp1.000.000.000,00
 - d. Belanja Sosial Tidak Terencana : Rp 600.000.000,00

Target kinerja APBD Tahun 2021 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan

Uraian	APBD	Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan	1.601.867.548.845,20	1.569.539.967.359,82	(32.327.581.485,38)	(2,02)
Pendapatan Asli Daerah	258.110.008.272,00	219.880.880.649,82	(38.229.127.622,18)	(14,81)
Pendapatan Pajak Daerah	124.436.802.630,00	77.092.600.000,00	(47.344.202.630,00)	(38,05)
Hasil Retribusi Daerah	15.925.536.000,00	9.402.542.000,00	(6.522.994.000,00)	(40,96)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	11.260.598.088,00	11.012.682.396,00	(247.915.692,00)	(2,20)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	106.487.071.554,00	122.373.056.253,82	15.885.984.699,82	14,92
Pendapatan Transfer	1.286.885.440.573,20	1.271.394.033.216,00	(15.491.407.357,20)	(1,20)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.143.114.068.000,00	1.119.639.083.000,00	(23.474.985.000,00)	(2,05)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	143.771.372.573,20	151.754.950.216,00	7.983.577.642,80	5,55



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Uraian	APBD	Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah	56.872.100.000,00	78.265.053.494,00	21.392.953.494,00	37,62
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	56.872.100.000,00	78.265.053.494,00	21.392.953.494,00	37,62

Dari data tersebut di atas diketahui terdapat penurunan anggaran pendapatan pada perubahan APBD sebesar Rp32.327.581.485,38 atau 2,02%. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan realisasi sumber-sumber PAD serta pendapatan transfer karena terjadinya pandemi Covid-19. Berdasarkan realisasi ini perlu dilakukan penyesuaian proyeksi APBD agar bisa selaras dengan target Belanja Daerah. Hal tersebut didasarkan pada:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Rencana target PAD perubahan tahun anggaran 2021 diproyeksikan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan perkembangan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan PAD tahun berjalan; b. Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah berpedoman pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah; dan c. Hasil pendapatan BLUD RSUD termasuk dalam lain-lain PAD yang sah.

b. Pendapatan Transfer

Perhitungan pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada perubahan KUPA Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan atas penyesuaian terhadap terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19. Sementara Pendapatan Transfer antar Daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali disusun berdasarkan surat atau informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Bali terhadap alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga baik dari badan, lembaga, serta organisasi yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran dan pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan

Proyeksi anggaran atas Pendapatan Daerah dilaksanakan berdasarkan kajian kemampuan realisasi pada kondisi pandemi serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

2. Anggaran Belanja

Uraian	APBD	Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja	1.645.990.790.607,20	1.679.448.303.840,00	33.457.513.232,80	2,03
Belanja Operasi	1.223.148.886.507,20	1.309.437.843.875,20	86.288.957.368,00	7,05
Belanja Pegawai	762.640.534.401,20	763.329.296.062,03	688.761.660,83	0,09
Belanja Barang dan Jasa	427.447.044.428,00	518.029.808.135,17	90.582.763.707,17	21,19
Belanja Hibah	19.642.907.678,00	21.942.839.678,00	2.299.932.000,00	11,71
Belanja Bantuan Sosial	13.418.400.000,00	6.135.900.000,00	(7.282.500.000,00)	(54,27)
Belanja Modal	212.702.105.903,00	168.258.733.691,80	(44.443.372.211,20)	(20,89)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	APBD	Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.860.486.275,00	58.907.508.813,80	7.047.022.538,80	13,59
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.350.714.829,00	20.012.143.108,00	(11.338.571.721,00)	(36,17)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.429.138.600,00	82.807.044.921,00	(16.622.093.679,00)	(16,72)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.061.766.199,00	6.532.036.849,00	(23.529.729.350,00)	(78,27)
Belanja Tidak Terduga	10.274.793.775,00	10.274.793.775,00	0,00	0,00
Belanja Transfer	199.865.004.422,00	191.476.932.498,00	(8.388.071.924,00)	(4,20)
Belanja Bagi Hasil	18.247.104.022,00	12.177.319.998,00	(6.069.784.024,00)	(33,26)
Belanja Bantuan Keuangan	181.617.900.400,00	179.299.612.500,00	(2.318.287.900,00)	(1,28)

Secara total perubahan anggaran belanja daerah mengalami kenaikan dari anggaran induk sebesar Rp33.457.513.232,80 atau 2,03%. Perubahan anggaran belanja daerah terjadi peningkatan pada belanja operasi sebesar Rp86.288.957.368,00 serta penurunan pada belanja modal sebesar Rp44.443.372.211,20 dan belanja transfer sebesar Rp8.388.071.924,00. Perubahan anggaran disesuaikan dengan target pendapatan daerah serta kebutuhan belanja untuk program dan kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan penganggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, serta mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pemenuhan amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 dengan menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan Covid-19 dengan melakukan *recofusing* anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka pemenuhan anggaran untuk:
 - Dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19;
 - Dukungan kepada kelurahan dalam pelaksanaan penanganan Covid-19;
 - Insentif Tenaga Kesehatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19; dan
 - Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 9 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
- Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan;
- Pemenuhan anggaran sebesar 25% yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) yang diarahkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan;
- Pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah khususnya yang mampu menyerap tenaga kerja (pasar tradisional, daerah tujuan wisata);



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

- f. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi, anggaran belanja akan diarahkan pada pengembangan sektor pertanian dalam arti luas yang terintegrasi dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. Jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial kepada masyarakat; dan
- h. Dukungan terhadap dunia usaha khususnya UMKM serta industri kecil dan menengah.

3. Anggaran Pembiayaan

Uraian	APBD	Pergeseran Anggaran Setelah Perubahan APBD	Kenaikan/ Penurunan	%
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	48.123.241.762,00	113.908.336.480,00	65.785.094.718,00	136,70
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	48.123.241.762,00	113.908.336.480,00	65.785.094.718,00	136,70
Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
Pembiayaan Neto	44.123.241.762,00	109.908.336.480,00	65.785.094.718,00	149,09

Anggaran pembiayaan mengalami kenaikan dari anggaran induk. SiLPA mengalami kenaikan dibandingkan dengan anggaran induk. SiLPA ini bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah dan penghematan belanja TA 2020.

Penggunaan dan pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya yang dituangkan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) wajib untuk digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan kebijakan pemanfaatannya bahwa SiLPA terdiri dari SiLPA bebas dan SiLPA terikat. Pemanfaatan SiLPA bebas bersifat umum/*block grant* yang digunakan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan daerah, sedangkan pemanfaatan SiLPA terikat digunakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis anggaran berkenaan. Alokasi SiLPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp113.908.336.481,00 meningkat sebesar Rp65.785.094.719,00 dibandingkan anggaran induk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp48.123.241.762,00.

Dari sisi kebijakan pengeluaran pembiayaan dalam rencana Tahun Anggaran 2021 yaitu digunakan untuk penyertaan modal. Penyertaan modal dilihat dari definisinya dapat diartikan sebagai pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD atau badan hukum lainnya. Maksud dari penyertaan modal daerah tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kerja sama dan investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karangasem. Adapun jumlah penyertaan modal daerah tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp4.000.000.000,00. Adapun rencana penyertaan modal daerah terdiri dari PT. BPD Bali sebesar Rp750.000.000,00, Perumda Tirta Toh Langkir sebesar Rp3.000.000.000,00, PT. Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp250.000.000,00. Selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan menjadi pembiayaan netto sebesar Rp109.908.336.481,00 yang digunakan untuk menutupi defisit.

4.2 Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan adalah bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem hendak meningkatkan kemandirian daerah dalam membelanjai



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

seluruh kebutuhan belanjanya melalui PAD. Dengan tingkat kemandirian yang tinggi pada akhirnya dapat menekan/mengurangi ketergantungan pada pemerintah vertikal, baik provinsi maupun pusat. Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan strategi pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Berdasarkan langkah tersebut dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

4.2.1 Rencana dan Realisasi Kinerja Keuangan

Ringkasan perbandingan antara realisasi dengan anggaran Tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebagai berikut.

Dalam Rupiah

Uraian	APBD	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
Pendapatan	1.569.539.967.359,82	1.555.811.557.854,48	13.728.409.505,34	99,13
Belanja	1.679.448.303.840,00	1.547.531.450.798,42	131.916.853.041,58	92,15
Surplus/(Defisit)	(109.908.336.480,18)	8.280.107.056,06	(118.188.443.536,24)	(7,53)
Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	113.908.336.480,00	113.908.336.480,88	(0,88)	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00
Pembiayaan Neto	109.908.336.480,00	109.908.336.480,88	(0,88)	100,00
SILPA	0,18	118.224.443.536,94	118.224.443.537,12	0,00

Uraian tentang penyebab terjadinya kekurangan dan kelebihan pos-pos pendapatan diuraikan pada Bab VI, sedangkan penyebab rendahnya realisasi belanja dibandingkan dengan anggarannya disebabkan oleh karena adanya efisiensi dalam pengeluaran belanja operasi dan belanja modal.

4.2.2 Tren Kinerja Keuangan

Realisasi pendapatan dan belanja selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
I	Pendapatan	1.555.811,56	1.475.561,87	1.624.330,23	1.482.950,69	1.525.935,90
II	Belanja	1.547.531,45	1.464.635,32	1.635.821,92	1.480.600,62	1.506.221,68
	Surplus/Defisit	8.289,11	10.926,55	11.491,69	2.350,07	19.714,22
III	Pembiayaan					
1	Penerimaan	113.908,34	103.047,22	120.841,88	122.206,95	125.239,94
2	Pengeluaran	4.000,00	65,44	6.380,87	3.730,87	22.771,07
	Pembiayaan Neto	109.908,34	102.981,78	114.461,00	118.476,08	102.468,87
	SILPA	118.224,44	113.908,34	102.969,31	120.826,15	122.183,09

4.2.2.1 Pendapatan

Berdasarkan data di atas, realisasi pendapatan menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Peningkatan pendapatan tersebut juga ditopang oleh PAD Kabupaten Karangasem. Perbandingan realisasi PAD dari Tahun 2017 sampai 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
1	Pajak Daerah	85.667,48	66.506,52	108.373,67	91.995,24	96.850,26
2	Retribusi Daerah	9.207,86	9.350,56	13.046,35	13.199,32	12.590,47
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.759,41	11.968,12	11.633,18	10.750,65	11.519,62
4	Lain-lain PAD yang sah	147.057,00	131.409,49	99.959,84	84.416,81	77.703,32
	Jumlah	252.691,75	219.234,68	233.013,03	200.362,02	198.663,67



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Secara umum kondisi realisasi PAD Kabupaten Karangasem Tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020 yang didorong oleh diterapkannya regulasi perpajakan daerah serta kegiatan optimalisasi pajak daerah. Realisasi Pajak Daerah dari tahun anggaran 2017 hingga 2021 secara umum mengalami fluktuasi pencapaian terutama disebabkan oleh pencapaian target masing-masing pajak daerah.

Sedangkan realisasi untuk retribusi daerah terjadi fluktuasi setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh subyek dan obyek retribusi.

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan cenderung berfluktuasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini disebabkan persentase penyertaan modal yang dimiliki serta keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan daerah.

Lain-Lain PAD yang Sah, berasal dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, jasa giro dan bunga deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, pendapatan Denda atas Keterlambatan pelaksanaan kegiatan, pendapatan denda pajak, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari BLUD, dan dana kapitasi JKN.

Untuk dana perimbangan, baik dari pusat dan provinsi, tingkat pencapaiannya sangat tergantung pada instansi vertikal tersebut. Hal ini pun tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang sangat mempengaruhi pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tingkat pencapaiannya tergantung dari hibah Pemerintah Pusat serta dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri.

4.2.2.2 Belanja

Gambaran realisasi belanja secara total dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya namun untuk tahun 2020 terjadi penurunan realisasi belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran belanja selalu dikaitkan dengan prioritas kebutuhan dan ketersediaan dana. Secara ringkas uraian belanja selama Tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut.

Dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
1	Belanja Operasi	1.210.433,00	1.175.320,21	1.290.833,50	1.155.238,91	1.093.006,80
2	Belanja Modal	143.668,86	81.578,99	152.232,67	144.906,76	237.069,89
3	Belanja Tak Terduga	2.119,88	19.630,35	0,00	2.562,22	826,04
4	Belanja Transfer	191.309,71	188.105,77	192.755,75	177.892,73	175.318,95
Jumlah		1.547.531,45	1.464.635,32	1.635.821,93	1.480.600,62	1.506.221,68

Berdasarkan jumlah realisasi belanja di atas dapat diungkapkan bahwa belanja operasi cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya sampai dengan tahun 2021.

Realisasi Belanja Modal fluktuatif setiap tahun, dimana tahun 2020 Belanja Modal dibatasi untuk pengadaan yang sangat mendesak dan untuk penanganan Covid-19 sehingga realisasi lebih rendah dari tahun sebelumnya karena anggaran diarahkan untuk penanganan Covid-19.

Realisasi Belanja Tidak Terduga biasanya tergantung dari Kejadian Luar Biasa. Pada tahun 2021 berdasarkan kebijakan pusat penanganan Covid-19 dilaksanakan melalui Belanja Tidak Terduga.

Belanja transfer cenderung meningkat setiap tahunnya, kondisi ini terjadi seiring dengan peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun-tahun tersebut sebagai dasar perhitungan bagi hasil ke desa/kelurahan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Untuk Tahun 2021 sesuai dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk penanggulangan Covid-19, yaitu diarahkan untuk Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah dan Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan dan Belanja Prioritas Lainnya yang bersumber dari Dana Transfer Umum dan sumber dana lainnya. Secara rinci anggaran dan realisasi penggunaannya sebagai berikut:

1. Dana Transfer Umum (DTU)

Untuk anggaran dan realisasi yang di pergunakan oleh OPD yang mana untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam penanganan Covid-19 Tahun 2021 yaitu:

a. Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Perlindungan Sosial	32.335.821.378,00	32.323.388.378,35	99,96
Dukungan Ekonomi	23.928.650.898,00	22.933.805.200,00	95,84
Total	56.264.472.276,00	55.257.193.578,35	98,21

b. Dukungan Pendanaan Belanja Kesehatan dan Belanja Prioritas Lainnya

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Penanganan Covid 19	0,00	0,00	0,00
Dukungan Vaksinasi	20.330.637.394,00	9.959.645.046,00	48,99
Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid 19	513.254.269,00	262.560.650,00	51,16
Insentif Tenaga Kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid 19	20.115.916.372,00	16.851.313.789,00	83,77
Belanja Kesehatan Lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat	15.519.516.734,00	6.960.257.523,00	44,85
Total	56.479.324.769,00	34.030.336.508,00	60,25

2. Belanja Tidak Terduga

Dasar Hukum

- Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga;
- Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga;
- Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga;
- Keputusan Bupati Karangasem Nomor 177/HK/2020 tentang Penetapan Perangkat Daerah Yang Secara Fungsional Terkait Dalam Antisipasi dan Penanganan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19); dan
- Keputusan Bupati Karangasem Nomor 275/HK/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 177/HK/2020 tentang Penetapan Perangkat Daerah Yang Secara Fungsional Terkait Dalam Antisipasi dan Penanganan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19).
- Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga;
- Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Tidak Terduga;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Untuk anggaran Dana Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 sebesar Rp10.274.793.775,00 bersumber dari:

- BTT APBD 2021;
- APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Anggaran Dana Belanja Tidak Terduga, penggunaannya direncanakan dibagi menjadi 2, yaitu:

- BTT untuk Covid-19 sebesar Rp8.600.000.000,00; dan
- BTT non Covid-19 sebesar Rp1.674.793.775,00.

Dari besaran anggaran Dana Belanja Tidak Terduga yang diperuntukkan untuk Penanganan Covid-19 dapat dibagi menjadi 4 bidang yaitu:

No	Bidang	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Kesehatan	6.500.000.000,00	1.239.965.800,00	5.260.034.200,00
2	Jaring Pengaman Sosial	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
3	Penanganan Dampak Ekonomi	1.000.000.000,00	525.140.150,00	474.859.850,00
4	Belanja Sosial Tidak Terencana	600.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		8.600.000.000,00	1.765.105.950,00	6.834.894.050,00

4.2.2.3 Pembiayaan

Ringkasan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
1	Penerimaan	113.908,34	103.047,22	120.841,88	122.206,95	125.239,94
2	Pengeluaran	4.000,00	65,44	6.380,87	3.730,87	22.771,07

Berdasarkan data tersebut dapat diungkapkan bahwa telah terjadi fluktuasi penerimaan pembiayaan secara terus menerus. Unsur utama dari penerimaan pembiayaan adalah penggunaan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun sebelumnya. Hal ini / dilakukan untuk memenuhi batas minimal pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan setiap tahun relatif fluktuatif, secara rutin pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman dalam negeri-pemerintah pusat, pokok pinjaman dalam negeri-lainnya selebihnya adalah penanaman modal pemerintah. Penanaman modal dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan sumber-sumber PAD dan sangat tergantung dengan kemampuan kas daerah.

4.2.3 Derajat Kemandirian

Berdasarkan realisasi APBD dapat diukur tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan menggunakan ukuran beberapa rasio atau perbandingan sebagai berikut:

4.2.3.1 PAD terhadap Belanja

Perbandingan PAD terhadap jumlah belanja adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja}} = \frac{252.715.423.485,16}{1.547.531.450.798,42} \times 100\% = 16,33\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem hanya mampu mendanai belanja sebesar 16,33% sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi.

4.2.3.2 PAD terhadap Belanja Operasi

Perbandingan PAD terhadap jumlah belanja operasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja Operasi}} = \frac{252.715.423.485,16}{1.210.433.001.300,69} \times 100\% = 20,88\%$$



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem hanya mampu mendanai belanja operasi sebesar 20,88%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa untuk menjaga kelangsungan operasi pelaksanaan pemerintahan pun belum dapat didanai dengan PAD.

4.2.3.3 PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja

Perbandingan PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap jumlah belanja adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD + Dana Bagi Hasil}}{\text{Belanja}} = \frac{340.739.424.411,29}{1.547.531.450.798,42} \times 100\% = 22,02\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem ditambah dengan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak hanya mampu menutupi belanja sebesar 22,02%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Karangasem baik yang dipungut sendiri maupun melalui pemerintah pusat belum dapat menutupi kebutuhan belanja pemerintah.

4.2.3.4 PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Operasi

Perbandingan PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap jumlah belanja operasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD + Dana Bagi Hasil}}{\text{Belanja Operasi}} = \frac{340.739.424.411,29}{1.210.433.001.300,69} \times 100\% = 28,15\%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Karangasem ditambah dengan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak hanya mampu menutupi belanja operasi sebesar 28,15%, sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Karangasem baik yang dipungut sendiri maupun melalui pemerintah pusat belum dapat menutupi kebutuhan operasional pemerintahan.

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah masih cukup rendah, sehingga ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi masih cukup besar.

Perkembangan ukuran kemandirian terutama berdasarkan realisasi PAD yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut:

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	
					Realisasi	Target
PAD	13,19	13,53	14,24	14,97	16,33	13,09
Belanja						
PAD	18,18	17,34	18,05	18,65	20,88	16,79
Belanja Operasi						

Dari data tersebut bahwa pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya jumlah PAD yang dihasilkan meningkat dibandingkan dengan belanja yang dikeluarkan.

Khusus Tahun 2021, rasio kemandirian yang ditargetkan sebesar 13,09% untuk menopang belanja dan 16,79% untuk menopang belanja operasi berhasil direalisasi dengan tingkat capaian masing-masing sebesar 16,33% dan 20,88%. Capaian ini didukung oleh adanya upaya efisiensi dan penghematan dalam pengeluaran belanja.



4.3 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

Masih terdapat hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja keuangan, khususnya bidang pendapatan. Tahun 2021 masih banyak wajib pajak yang belum menyelesaikan tunggakan pajak baik pajak hotel, restoran dan pajak hiburan, pajak reklame, MBLB dan PBB P2 yang baru pada Tahun 2014 diserahkan ke daerah. Hal tersebut mengakibatkan masih tingginya saldo piutang pajak.

Bencana nonalam pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional, berbagai usaha dan langkah kerja pemerintah pusat untuk bisa mempertahankan perekonomian dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga hal ini berdampak pula pada dana transfer berupa dana perimbangan yang dialokasikan untuk seluruh daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Rincian Anggaran dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran, alokasi Dana Perimbangan untuk Kabupaten Karangasem mengalami kenaikan sebesar 3,12%. Dimana pada tahun 2020 alokasi dana transfer pusat kepada Kabupaten Karangasem mengalami penurunan 9,25% dari Tahun 2019.

Pandemi Covid-19 juga berpengaruh pada penurunan pendapatan daerah Provinsi Bali. Hal ini berdampak pula pada penurunan dana bagi hasil pajak provinsi yang dialokasikan untuk Kabupaten Karangasem. Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor: 900/5944/Bid. PAD-BPKAD, Perihal Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun Anggaran 2021 dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, alokasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mengalami penurunan sebesar 11,11%.

Kinerja keuangan, bidang belanja Tahun 2021 tidak mengalami kendala yang berarti. Secara umum belanja dilakukan dalam batas pagu anggaran yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip penghematan dan efisiensi dalam pengeluaran belanja. Dalam masa pandemi tidak ada pengeluaran yang direalisasikan tanpa ada pagu anggarannya, kecuali beberapa utang jangka pendek untuk kegiatan operasional kantor (seperti listrik, air, telepon), kegiatan operasional RSUD, serta utang belanja pegawai karena persentase pendapatan Tahun 2021.

Kinerja Penerimaan Pembiayaan sesuai dengan target yang dianggarkan dalam Tahun 2021. Sedangkan kinerja pengeluaran pembiayaan dilakukan dalam batas pagu yang dianggarkan. Penjelasan capaian kinerja setiap jenis pendapatan dan belanja dapat dilihat pada Bab VI.

Untuk memantapkan pendapatan atau penerimaan daerah agar rencana belanja pemerintah tidak terganggu maka pemerintah melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Mengintensifkan penerimaan dari pajak maupun retribusi melalui peningkatan manajemen pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta penguatan regulasi;
2. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah;
3. Memperjuangkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, DAK, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya; dan
4. Menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.



BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi ditetapkan untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2021 telah menggunakan basis akrual.

5.1 Asumsi Dasar dan Basis Pengukuran

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Karangasem Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian Entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai entitas pelaporan;
2. Kesenambungan Entitas, Pemerintah Kabupaten Karangasem berlanjut keberadaannya/berkesinambungan;
3. Pengukuran dalam Rupiah, Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang Rupiah;
4. Dasar kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di Kas Daerah, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah;
5. Dasar akrual (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. Eksistensi Aset, Pendapatan dan Beban dipengaruhi oleh transaksi penerimaan dan pengeluaran dari Kas Daerah (transaksi kas), juga dipengaruhi oleh transaksi non kas;
6. Asas Bruto, Prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;
7. Harga Perolehan (*historical cost*), Nilai aset diakui sebesar harga perolehan yaitu seluruh pembayaran yang dilakukan pada waktu memperoleh barang tersebut, mulai harga pembelian/pengadaan barang tersebut ditambah biaya-biaya lainnya (jika ada) yang dikeluarkan sampai barang tersebut siap di tempat dan siap digunakan;
8. Periode Akuntansi, Informasi disajikan berdasarkan periode akuntansi dengan memakai tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
9. Perhitungan masa akrual menggunakan satuan "**bulan**". Jika transaksi terjadi antara tanggal 1 s.d. 15, maka dihitung 1 bulan penuh pada bulan transaksi, sedangkan jika terjadi pada tanggal 16 s.d. 31, maka dihitung 1 bulan pada bulan berikutnya; dan
10. Dana Umum (kecuali aset), Pertanggungjawaban keseluruhan penerimaan dan pengeluaran termasuk aset, utang dan ekuitas, pada prinsipnya adalah melalui dana umum berupa APBD. Namun khusus untuk aset, apabila terdapat perolehan aset berupa hibah dan *dropping* dari pemerintah pusat/instansi lebih tinggi atau pihak lain yang tidak melalui mekanisme APBD, sepanjang terdapat perpindahan hak kepemilikan, tetap diakui sebagai aset daerah.



5.2 Kebijakan Akuntansi Pokok

5.2.1 Pendapatan - LO

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
2. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*);
3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
4. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia; dan
5. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

5.2.2 Pendapatan - LRA

1. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;
2. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
 - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
 - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
 - d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
 - e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
3. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
4. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS;
5. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai ekuitas dana umum;
6. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima; dan
7. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

5.2.3 Beban - LO

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

2. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
3. Beban diukur sesuai dengan:
 - a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
 - b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
4. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
5. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
6. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi.

5.2.4 Belanja - LRA

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
2. Belanja diklasifikasikan menurut penggunaan dan pusat pertanggungjawaban serta dirinci berdasarkan kelompok dan jenis belanja;
3. Pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah;
4. Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
 - c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
5. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam Lain-Lain PAD yang Sah;
6. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah; dan
7. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

5.2.5 Transfer

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
2. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
3. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau



- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
4. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar;
5. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa;
6. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar;
7. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
8. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

5.2.6 Pembiayaan

1. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;
2. Pembiayaan diklasifikasi menurut sumber pembiayaan, sumber-sumber pembiayaan terdiri dari sumber yang berupa penerimaan dan sumber yang berupa pengeluaran daerah;
3. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman/obligasi, penerimaan kembali pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah antara lain pembayaran utang pokok dan penyertaan modal pemerintah (investasi);
5. Pusat pertanggungjawaban adalah bagian atau fungsi dan unit organisasi pemerintah daerah;
6. Pembiayaan diakui selama periode berjalan, saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa penerimaan daerah atau pada saat kas dikeluarkan untuk sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah;
7. Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan;
8. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan dikeluarkan; dan
9. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal pengakuan pembiayaan.

5.2.7 Aset/Aktiva

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat,



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya; dan

2. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

5.2.7.1 Aset Lancar

1. Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi;
2. Aset lancar terdiri atas: kas, piutang, persediaan, dan lain-lain;
3. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan;
4. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang;
5. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;
6. Piutang terdiri atas: piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain, dan sebagainya.
7. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan, sejumlah nilai yang dapat ditagihkan;
8. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk dapat menyajikan piutang sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan harus dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih yang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang;
9. Penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan kualitas piutang dilakukan dengan menggunakan taksiran persentase atas besaran piutang yang kemungkinan tidak tertagih, dengan besaran sebagai berikut:

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	1%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

10. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi;
11. Persediaan terdiri atas: barang pakai habis, barang tak pakai habis, barang bekas dipakai;
12. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, berdasarkan harga pembelian terakhir untuk persediaan selain obat dan harga real untuk persediaan obat-obatan.

5.2.7.2 Investasi Jangka Panjang

1. Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
2. Investasi jangka panjang antara lain terdiri dari:
 - a. Penyertaan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah; dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

- b. Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam bentuk Dana Bergulir.
3. Investasi jangka panjang, dalam bentuk penyertaan modal pemerintah diakui dengan metode harga perolehan atau metode ekuitas sesuai dengan prosentase kepemilikan dan tingkat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
4. Investasi jangka panjang dalam bentuk dana bergulir dan investasi jangka panjang yang sifatnya non permanen diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), khusus untuk investasi jangka panjang dalam rangka mempertahankan suatu peninggalan sejarah atau/objek wisata sesuai peraturan, hasil investasi diakui sebagai pengurang investasi;
5. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterimakan kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*);

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 tahun	10%
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 tahun	50%
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 tahun	75%
4	Jatuh tempo pada periode diatas 4 tahun	100%

6. Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat kepemilikan.

5.2.7.3 Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik;
2. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya;
3. Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Konstruksi dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya;
4. Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya;
5. Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan, jembatan, terowongan, Bangunan air, meliputi bangunan air irigasi, bangunan air pasang, bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air pengaman sungai dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air kotor, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya;
6. Gedung dan bangunan, meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya;
7. Peralatan dan mesin, meliputi mesin dan peralatan besar, mesin dan peralatan kantor, rumah tangga, bengkel, studio, pertanian, kedokteran, laboratorium, kesehatan, persenjataan, kendaraan darat bermotor, kendaraan darat tak bermotor, kendaraan apung bermotor, kendaraan apung tak bermotor, pesawat udara dan lain-lain sejenisnya;
8. Aset tetap lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak kesenian seperti lukisan, pahatan kayu dan lain-lain sejenis;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

9. Konstruksi dalam pengerjaan adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan;
10. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan;
11. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya;
12. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah;
13. Bangunan dalam pengerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi;
14. Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan;
15. Jalan, Irigasi dan Jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun sampai dengan siap untuk digunakan;
16. Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk digunakan;
17. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola (jika ada);
18. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan
19. Aset Tetap lainnya diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan;
20. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan; dan
21. Aset tetap disusutkan dengan metode garis lurus, mulai Tahun 2015, seiring dengan pemberlakuan PP Nomor 71 Tahun 2010, tanpa memperhitungkan sisa umur ekonomis.

5.2.7.4 Dana Cadangan

1. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran; dan
2. Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembentukan dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pencairan dana cadangan.

5.2.7.5 Aset Lainnya

1. Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan;
2. Aset lain-lain meliputi piutang angsuran, Kemitraan dengan pihak III, dan lain-lain;
3. Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah;
4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

berdasarkan perjanjian. Ataupun kemitraan dengan pihak lain (Bank) sehubungan kerjasama dalam bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak yang dituangkan juga dalam bentuk perjanjian;

5. Piutang angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan aset;
6. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui berdasarkan harga perolehan pada saat dibangun (aset lainnya tersebut selesai dibangun) atau aset tersebut disetujui penempatannya sesuai dengan perjanjiannya; dan
7. Aset Lain-lain adalah aset tetap yang tidak digunakan karena kondisi/digolongkan sebagai rusak berat/tidak dapat digunakan maka aset tersebut dipisahkan dan disajikan ke aset lain-lain sebesar nilai buku (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) dalam neraca.

5.2.8 Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
3. Kewajiban jangka pendek (lancar) merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan;
4. Utang jangka pendek antara lain terdiri dari Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Lain yang Ditangguhkan dan Biaya yang Masih Harus Dibayar;
5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
6. Utang PFK adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi;
7. Utang jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi;
8. Utang jangka panjang merupakan pinjaman dalam negeri kepada pemerintah pusat;
9. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan;
10. Utang PFK, Pendapatan Lain yang Ditangguhkan, Biaya yang Masih Harus Dibayar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan;
11. Utang Dalam Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan atau nilai sisa hutang yang belum jatuh tempo dalam waktu 12 bulan mendatang; dan
12. Utang jangka pendek dan utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang Rupiah yang harus dibayar kembali, dalam mata uang Rupiah.

5.2.9 Ekuitas

1. Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban; dan
2. Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

5.2.10 Kebijakan Khusus untuk Aset Tetap

1. Nilai perolehan Aset Tetap yang masih Rp0 atau Rp1,00 dikoreksi dengan nilai wajar pada tanggal perolehan;
2. Kebijakan penyusutan diberlakukan dalam Tahun 2021, seiring dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam PP Nomor 71 Tahun 2010; Untuk memudahkan perhitungan tarif penyusutan dan konsistensi penerapannya di masa mendatang, masa manfaat aset tetap diestimasi dalam koridor sebagai berikut:

No	Golongan Aktiva Tetap	Masa Manfaat(Tahun)
1	Peralatan dan Mesin	5 – 10
2	Gedung dan Bangunan	25
3	Jalan, irigasi, dan jaringan	12
4	Aset tetap lainnya	0

3. Pada Tahun 2015 diterapkan penghitungan penyusutan tanpa nilai residu. Langkah ini dimulai dari penghitungan penyusutan 2014, langkah awal yang dilakukan adalah menetapkan sisa umur ekonomis aset tetap per 31 Desember 2014 sebagai dasar pembagi perhitungan penyusutan 2014. Sisa umur aset tetap dihitung dengan cara mengurangi umur manfaat dengan tahun perolehan. Namun untuk tahun selanjutnya penyusutan aset tetap tanpa memperhitungkan umur ekonomis, disusutkan dengan membagi nilai aset tetap dengan umur ekonomis sesuai masa manfaatnya. Mengingat operasional Organisasi Sektor Publik lebih mengutamakan pelayanan publik dibanding dengan investasi, maka penyusutan dari waktu ke waktu tidak lebih besar dari pada tambahan investasi Pemda. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi penurunan yang cukup drastis atas nilai aset tetap di neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem;
4. Selanjutnya dalam penghitungan penyusutan tanpa penggunaan nilai residu aset tetap. Setelah memperoleh nilai perolehan dan umur ekonomis, maka penyusutan Tahun 2021 dihitung sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan 2021} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

$$\text{Penyusutan per bulan} = \text{penyusutan per periode} : 12$$

$$\text{Nilai penyusutan pada tahun berkenaan} = \text{penyusutan per bulan} \times \text{bulan kepemilikan aset tetap.}$$

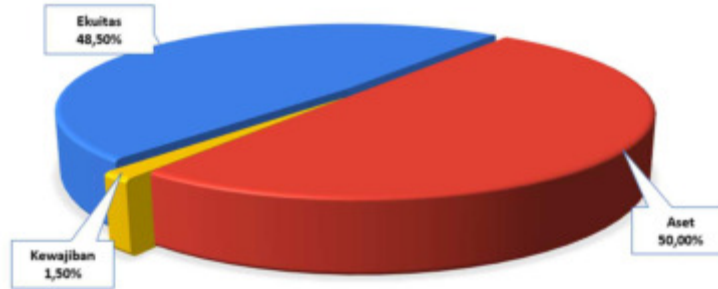
5. Penyusutan aset yang diperoleh dalam Tahun 2021 dan tahun berikutnya dilakukan secara garis lurus sesuai dengan umur manfaat; dan
6. Terhadap aset tetap yang tidak digunakan, maka aset tersebut dipisahkan dan disajikan ke Aset Lain-lain sebesar nilai buku (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) dalam neraca.

BAB VI

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

6.1 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk per tanggal 31 Desember 2021 secara umum digambarkan sebagai berikut:



Secara lebih rinci, Neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

6.1.1 Aset

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lancar	255.744.596.514,74	199.349.191.548,42	56.395.404.966,32	28,29
Investasi Jangka Panjang	120.965.044.784,79	117.133.738.541,72	3.831.306.243,07	3,27
Aset Tetap	1.164.827.026.822,54	1.152.660.747.195,06	12.166.279.627,48	1,06
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	-
Aset Lainnya	47.736.520.373,05	20.323.460.616,83	27.413.059.756,22	134,88
Jumlah	1.589.273.188.495,12	1.489.467.137.902,03	99.806.050.593,09	6,70

6.1.1.1 Aset Lancar

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lancar per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lancar sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas dan Setara Kas	118.531.866.405,30	113.909.518.059,25	4.622.348.346,05	4,06
Piutang	151.393.533.659,83	106.369.818.130,59	45.023.715.529,24	42,33
Penyisihan Piutang	(42.777.266.571,10)	(38.293.168.730,66)	(4.484.097.840,44)	11,71
Beban di Bayar Dimuka	211.051.952,07	198.720.697,00	12.331.255,07	6,21
Persediaan	28.385.411.068,64	17.164.303.392,24	11.221.107.676,40	65,37
Jumlah	255.744.596.514,74	199.349.191.548,42	56.395.404.966,32	28,29

6.1.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kas dan Setara Kas per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas dan Setara Kas serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas di Kas Daerah	79.947.618.428,19	96.186.075.081,08	(16.238.456.652,89)	(16,88)
Kas di Bendahara Penerimaan	138.005.806,00	151.425.337,00	(13.419.531,00)	(8,86)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	-
Kas di BLUD	31.327.854.583,33	5.223.145.957,67	26.104.708.625,66	499,79
Kas Dana BOS	2.525.986.369,11	4.327.431.952,82	(1.801.445.583,71)	(41,63)
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	4.248.978.350,31	8.020.258.152,31	(3.771.279.802,00)	(47,02)
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	343.422.868,36	1.181.578,37	342.241.289,99	28.964,76
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah	118.531.866.405,30	113.909.518.059,25	4.622.348.346,05	4,06

Penjelasan:

1. Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki saldo Kas di Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2021 yang merupakan saldo di RKUD yang ditempatkan pada BPD Bali Cabang Amlapura dengan nomor rekening yaitu 022.01.00.00000-0. Saldo yang disajikan tersebut telah merupakan hasil rekonsiliasi dengan pihak BPD Bali Cabang Amlapura yang didokumentasikan dalam berita acara rekonsiliasi. Tidak terdapat selisih rekonsiliasi dalam berita acara tersebut. Dalam saldo Kas di Kas Daerah tersebut, terdapat sisa dana (SiLPA) yang sifatnya mengikat dan tidak mengikat, sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos -Pos LRA pada *Poin 6.3.5* di atas;
2. Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki saldo Kas Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp138.005.806,00. Saldo kas tersebut merupakan pendapatan yang diterima pada akhir Tahun 2021 dan disetorkan di awal Tahun 2022. Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Saldo 31 Desember 2021
Kas di Bendahara Penerimaan BPKAD	135.816.806,00
Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	60.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Abang I	188.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Abang II	218.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Karangasem I	40.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Karangasem II	60.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Manggis I	234.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Manggis II	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Kubu I	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Kubu II	250.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Sidemen	166.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Bebandem	246.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Rendang	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Selat	124.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan RS Pratama	603.000,00
Jumlah	138.005.806,00

3. Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak memiliki saldo Kas Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2021;
4. Pemerintah Kabupaten Karangasem menyajikan saldo Kas di BLUD per tanggal 31 Desember 2021, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31 Desember 2021
Saldo pada rekening nomor 022.01.0000473-1 di BPD Bali Cabang Amlapura	31.285.977.316,09
Saldo pada rekening nomor 145.00.7555777-3 di Bank Mandiri Cabang Amlapura	71.629.427,24
Saldo kas tunai di petugas kasir	6.247.840,00
Dana kas lainnya yang tersimpan di rekening RSUD Karangasem	(36.000.000,00)
Jumlah	31.327.854.583,33

5. Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.525.986.369,11 yang tersebar pada 400 sekolah negeri di seluruh Kabupaten Karangasem baik di tingkat Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama. Rincian saldo Kas Dana BOS dapat dilihat pada *lampiran 1*;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

6. Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.248.978.350,31. Rincian saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP dapat dilihat pada *lampiran 2*;
7. Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki Saldo Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) per 31 Desember 2021 sebesar Rp343.422.868,36 yang dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Utang PFK di Bendahara Dana BOS atas PFK yang dipungut Tahun 2021 belum disetorkan sampai dengan tanggal Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp302.580.862,00;
 - b. Utang Jangka Pendek Lainnya berupa kelebihan penerimaan pendapatan di BLUD RSUD Karangasem atas Klaim Covid-19 sebesar Rp36.000.000,00;
 - c. Utang Jangka Pendek Lainnya berupa tagihan samsat kendaraan yang belum dibayarkan kepada pemilik dana di Bendahara Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem sebesar Rp496.500,00;
 - d. Utang Jangka Pendek Lainnya di Bendahara JKN FKTP sebesar Rp166.320,00; dan
 - e. Utang Jangka Pendek Lainnya di berupa kelebihan penyetoran kas tunai ke rekening dana BOS dari Bendahara BOS sebesar Rp4.179.186,36.

Rincian saldo Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) dapat dilihat pada *lampiran 3*.

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tidak termasuk dalam perhitungan SILPA.

6.1.1.1.2 Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Piutang per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Pajak Daerah	82.102.060.916,12	74.254.398.479,12	7.847.662.437,00	10,57
Piutang Retribusi Daerah	204.728.837,00	270.978.580,00	(66.249.743,00)	(24,45)
Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48.430.008.191,71	23.898.848.767,71	24.531.159.424,00	102,65
Piutang Transfer Antar Daerah	20.554.122.915,00	7.841.379.503,76	12.712.743.411,24	162,12
Piutang Lainnya	102.612.800,00	104.212.800,00	(1.600.000,00)	(1,54)
Jumlah	151.393.533.659,83	106.369.818.130,59	45.023.715.529,24	42,33

Penjelasan:

1. Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2021 mengubah struktur penyajian piutang dalam lembar muka laporan keuangan dan juga dalam penjelasan catatan atas laporan keuangan mengikuti struktur penyajian dalam Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Pajak Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Pajak Hotel	3.010.412.765,12	1.581.554.927,12	1.428.857.838,00	90,35
Piutang Pajak Restoran	1.687.200.396,00	1.002.896.250,00	684.304.146,00	68,23
Piutang Pajak Hiburan	199.310.492,66	197.851.015,66	1.459.477,00	0,74
Piutang Pajak Reklame	87.884.261,00	99.679.361,00	(11.795.100,00)	(11,83)
Piutang Pajak Parkir	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Air Tanah	299.299.255,67	190.794.712,67	108.504.543,00	56,87
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.370.361.063,67	23.078.869.637,67	2.291.491.426,00	9,93
Piutang PBB-P2	51.447.544.682,00	48.102.704.575,00	3.344.840.107,00	6,95
Jumlah	82.102.060.916,12	74.254.398.479,12	7.847.662.437,00	10,57



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2021 dan 2020 yang sudah diterbitkan surat tagihan pajak dan disampaikan kepada Wajib Pajak namun belum terbayar.

Diantara saldo piutang pajak tersebut terdapat saldo piutang PBB-P2 pelimpahan dari KPP Pratama Gianyar pada Tahun 2014. Kegiatan validasi piutang PBB-P2 melalui konfirmasi fisik kepada WP belum dilakukan secara optimal yang dapat menunjukkan nilai piutang yang valid. Namun hasil pengolahan *database* SIM PBB Kabupaten Karangasem dapat memberikan informasi jumlah NOP dan SPPT serta nilai piutang pajak yang dapat diindikasikan belum valid dan memerlukan konfirmasi kepada WP dikarenakan WP tersebut belum melakukan pembayaran sejak piutang PBB-P2 diserahkan kepada Kabupaten Karangasem sampai dengan tanggal Neraca. Adapun penyajian validitas berdasarkan hasil pengolahan *database* SIM PBB-P2 sampai dengan tanggal Neraca diuraikan sebagai berikut:

- Terdapat perbedaan nilai piutang PBB-P2 antara *database* SIM PBB-P2 dengan nilai piutang yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat melalui KPP Pratama Gianyar kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem. Nilai piutang PBB-P2 yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp24.398.795.662,00, sedangkan nilai yang tersaji dalam *database* SIM PBB-P2 sebesar Rp63.752.871.237,00 yang terdiri dari 2.887.481 SPPT dan 218.317 NOP. Sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp39.354.075.575,00 (Rp63.752.871.237,00 - Rp24.398.795.662,00);
- Dari 2.887.481 SPPT diketahui jumlah SPPT yang telah terbayar sampai dengan penyusunan laporan keuangan ini dilakukan yaitu sebanyak 1.991.218 SPPT pada 200.148 NOP dengan nilai Rp44.712.695.632,00, belum dilakukan pembayaran sebanyak 896.127 SPPT pada 174.948 NOP dengan nilai Rp18.882.211.984,00 dan tidak diketahui status pembayarannya sebanyak 136 SPPT pada 40 NOP dengan nilai Rp157.963.621,00;
- Dari 2.887.481 SPPT diketahui terdapat 167.472 SPPT pada 105.309 NOP dengan nilai Rp677.152.907,00 yang merupakan SPPT yang diterbitkan sebelum Tahun 1998 (di luar dari PBB-P2 yang diserahkan dalam berita acara dengan KPP Pratama Gianyar);
- Dari 174.948 NOP yang belum membayar atas piutang PBB-P2 yang diserahkan (Tahun 2014 ke belakang) telah diterbitkan SPPT di Tahun 2014 s.d. Tahun 2021 sebanyak 995.281 SPPT dengan nilai Rp47.373.704.221,00 dan telah dilakukan pembayaran sampai dengan pemeriksaan sebanyak 399.404 SPPT pada 159.429 NOP dengan nilai Rp19.084.614.810,00. Sedangkan sisanya sebanyak 595.877 SPPT pada 174.948 NOP dengan nilai Rp28.289.089.411,00; dan
- Selanjutnya, dari 174.948 NOP diketahui pula terdapat 4.191 NOP dengan nilai piutang keseluruhan sebesar Rp2.563.754.827,00 belum pernah melakukan pembayaran dalam rentang waktu Tahun 1998 s.d. Tahun 2021 dari 100.584 SPPT. Atas 4.191 NOP tersebut belum dilakukan validasi keberadaan dan status WP dari pemilik NOP. Berikut rincian jumlah SPPT, NOP serta nilai piutang pajak yang perlu dilakukan validasi di tahun-tahun mendatang pada tiap-tiap kecamatan.

Kecamatan	NOP	SPPT	Piutang Pajak
Rendang	118 NOP	2.832 Lembar SPPT	33.661.935,00
Sidemen	1.094 NOP	26.256 Lembar SPPT	286.054.093,00
Karangasem	1.463 NOP	35.112 Lembar SPPT	1.628.073.637,00
Abang	425 NOP	10.200 Lembar SPPT	191.372.056,00
Bebandem	91 NOP	2.184 Lembar SPPT	58.797.257,00
Selat	751 NOP	18.024 Lembar SPPT	254.572.112,00
Kubu	249 NOP	5.976 Lembar SPPT	111.223.737,00
Jumlah	4.191 NOP	100.584 Lembar SPPT	2.563.754.827,00

- BPKAD Kabupaten Karangasem akan berusaha melakukan validasi dan memproses lebih lanjut hasil validasi dari NOP yang belum melakukan pembayaran piutang PBB-P2 sejak Tahun 1998 sampai dengan sekarang secara bertahap, sehingga saldo piutang PBB-P2 lebih valid dan dapat diyakini oleh para *stakeholder*.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

3. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Retribusi Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	204.728.837,00	119.318.580,00	85.410.257,00	71,58
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	151.660.000,00	(151.660.000,00)	(100,00)
Jumlah	204.728.837,00	270.978.580,00	(66.249.743,00)	(24,45)

4. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	(Kenaikan)/Penurunan	%
Piutang Denda Pajak Daerah	3.510.354.352,71	3.368.240.146,71	142.114.206,00	4,22
Piutang Denda Retribusi Daerah	14.577.031,00	0,00	14.577.031,00	-
Piutang BLUD	44.905.076.808,00	20.530.608.621,00	24.374.468.187,00	118,72
Jumlah	48.430.008.191,71	23.898.848.767,71	24.531.159.424,00	102,65

5. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Transfer Antar Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.718.328.176,00	4.920.558.666,52	4.797.769.509,48	97,50
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.895.242.234,00	1.027.990.644,38	1.867.251.589,62	181,64
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.358.564.355,00	1.878.388.987,25	2.480.175.367,75	132,04
Piutang Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	28.072.652,00	14.441.205,61	13.631.446,39	94,39
Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	3.553.915.498,00	0,00	3.553.915.498,00	-
Jumlah	20.554.122.915,00	7.841.379.503,76	12.712.743.411,24	162,12

Atas piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2021 didasarkan atas Surat Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor: B.13.900/0637/PADFE/BPKAD perihal Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun Anggaran 2021 tanggal 8 Februari 2022 serta Surat Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor: B.13.900/0805/PADFE/BPKAD perihal Perubahan Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun Anggaran 2021 tanggal 17 Februari 2022.

6. Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Piutang Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	102.612.800,00	102.612.800,00	0,00	0,00
Uang Muka	0,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	(100,00)
Jumlah	102.612.800,00	104.212.800,00	(1.600.000,00)	(1,54)

7. Rincian mutasi piutang dapat dilihat pada *lampiran 4*.
8. Rincian klasifikasi umur atas piutang dapat dilihat pada *lampiran 5*.

6.1.1.1.3 Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Penyisihan Piutang per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Penyisihan Piutang sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	(Kenaikan)/Penurunan	%
➤ Penyisihan Piutang Pendapatan				
✓ Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(41.615.872.037,67)	(37.366.086.094,91)	(4.249.785.942,76)	11,37
✓ Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(2.047.288,37)	(152.853.185,80)	150.805.897,43	(98,66)
✓ Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	(851.193.215,91)	(593.186.854,91)	(258.006.361,00)	43,49
✓ Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(205.541.229,15)	(78.413.795,04)	(127.127.434,11)	162,12
➤ Penyisihan Piutang Lainnya				
✓ Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(102.612.800,00)	(102.612.800,00)	0,00	-
✓ Penyisihan Uang Muka	0,00	(16.000,00)	16.000,00	(100,00)
Jumlah	(42.777.266.571,10)	(38.293.168.730,66)	(4.484.097.840,44)	11,71

Rincian perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada *lampiran 5*.

6.1.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Beban Dibayar Dimuka per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Beban Dibayar Dimuka yang merupakan Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Jasa - Asuransi Dibayar Dimuka	67.302.015,37	45.270.863,00	22.031.152,37	48,67
Beban Jasa - Sewa Dibayar Dimuka	142.583.270,00	153.449.834,00	(10.866.564,00)	(7,08)
Beban Jasa - Ketersediaan Layanan (<i>Hosting</i>)	1.166.666,70	0,00	1.166.666,70	-
Jumlah	211.051.952,07	198.720.697,00	12.331.255,07	6,21

Penjelasan:

Beban Dibayar Dimuka disebabkan karena belanja sewa tanah dan bangunan serta pembayaran premi asuransi Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh beberapa OPD atas perjanjian yang masih berlaku pada tahun berikutnya dengan jangka waktu dari 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yang melewati TA 2021.

Perhitungan masa akrual menggunakan satuan "bulan". Jika transaksi perjanjian terjadi antara tanggal 1 s.d. 15, maka dihitung 1 bulan penuh pada bulan transaksi, sedangkan jika terjadi pada tanggal 16 s.d. 31, maka dihitung 1 bulan pada bulan berikutnya.

Rincian Beban Dibayar Dimuka yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada *lampiran 6*.

6.1.1.1.5 Persediaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Persediaan per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Persediaan yang merupakan Persediaan Barang Pakai Habis sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Persediaan Barang Pakai Habis	28.385.411.068,64	17.164.303.392,24	11.221.107.676,40	65,37
Persediaan Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	-
Persediaan Barang Bekas Pakai	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah	28.385.411.068,64	17.164.303.392,24	11.221.107.676,40	65,37

Penjelasan:

1. Persediaan dimaksud di atas merupakan bahan habis pakai/material yang terdiri dari alat tulis kantor, bahan komputer, kertas dan cover, barang cetakan, barang kuasi, benda pos, barang yang diserahkan kepada pihak ketiga, material/obat/alkon, bahan bakar minyak/gas, pakan ikan, bahan lainnya, bahan makanan/natura dan pakan natura, alat listrik, perabot kantor/alat kebersihan, bibit ikan, bahan bangunan dan konstruksi, bahan kimia, dan bahan /kegiatan kantor lainnya. Rincian persediaan dapat dilihat pada *lampiran 7.1*;



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

2. Metode pencatatan untuk jenis persediaan yang sifatnya *continuous* dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan menggunakan metode perpetual. Proses tersebut sudah dilaksanakan pada RSUD Kabupaten Karangasem serta Dinas Kesehatan. Untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti ATK menggunakan metode periodik;
3. Pada Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Karangasem menerima hibah berupa alat kontrasepsi dari BKKBN Provinsi Bali pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp327.786.069,00. Selain itu, juga menerima hibah/sumbangan persediaan barang dari masyarakat/pihak ketiga dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang diterima oleh beberapa SKPD terkait yaitu RSUD Karangasem sebesar Rp5.267.997.113,80, Dinas Kesehatan sebesar Rp56.085.389.623,70. Di samping itu, BPBD juga menerima sumbangan yang tidak dicantumkan harga satuan barang maupun nilai secara keseluruhan. Untuk barang sumbangan kategori persediaan yang tidak mencantumkan nilai/harga seperti pada lampiran 7.2;
4. Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Karangasem telah menerima vaksin dari Kementerian Kesehatan baik melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bali ataupun melalui hub penyedia vaksin PT. Kimia Farma. Jumlah vaksin yang diterima selama Tahun 2021 sebanyak 664.178 dosis, didistribusikan kepada Puskesmas, Rumah Sakit, TNI/Polri, dan KKP sebanyak 581.399 dosis, penerimaan kembali atas vaksin yang telah didistribusikan sebanyak 22.723 dosis, pengembalian vaksin ke Dinas Kesehatan Provinsi Bali (pengembalian distribusi) sebanyak 14.058 dosis, konsumsi (pelayanan vaksin baik oleh Puskesmas dan Rumah Sakit, TNI/Polri, dan KKP) sebanyak 626.188 dosis, pembuangan (*expired date*) sebesar 216 dosis (200 di Dinas Kesehatan dan 16 di Puskesmas Kubu I) dan sisa vaksin yang terdapat di gudang vaksin Dinas Kesehatan serta Puskesmas sebanyak 20.916 dosis;
5. Selain itu juga terdapat persediaan yang kondisinya usang/kedaluwarsa/tidak berlaku yang telah dikeluarkan dari penyajian persediaan neraca 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
Dinas Kesehatan	Obat dan BMHP	312.789.457,82
RSUD Karangasem	Obat dan BMHP	64.764.691,31
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Barang cetakan	101.662.792,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Alat Kontrasepsi	4.055.600,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Plat IMB	300.000,00
Dinas Pariwisata	Karcis retribusi	1.099.400,00
Jumlah		484.671.941,13

- a. Dinas Kesehatan pada Tahun 2022 melaksanakan pemusnahan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang kedaluwarsa dan rusak bulan Januari s.d Desember 2021 dengan Berita Acara Pemusnahan Obat Kedaluwarsa/Rusak pada Dinas Kesehatan Nomor: 027/03/Perl tanggal 10 Februari 2022 sebesar Rp312.789.457,82;
- b. Pada RSUD Karangasem terdapat persediaan berupa obat-obatan yang kondisinya kedaluwarsa/rusak sebesar Rp64.764.691,31. Atas barang persediaan kedaluwarsa tersebut tidak dilaksanakan proses pemusnahan karena dikembalikan (retur) kepada penyedia dan setelah dilakukan retur RSUD melakukan penghapusan dari daftar persediaan;
- c. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat barang cetakan atas dokumen catatan sipil yang tidak berlaku sesuai Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp101.662.792,00 sudah dilakukan pemusnahan barang sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Nomor: 027/179/Disdukcapil tanggal 13 Maret 2020 namun belum ada SK Penghapusan;
- d. Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat barang berupa alat kontrasepsi yang telah kedaluwarsa sebesar Rp4.055.600,00. Telah diusulkan pemusnahan dan penghapusan melalui Surat Nomor: 476/521/DPPKB/2018 tanggal 31 Juli 2018 dan belum ada persetujuan pemusnahan maupun penghapusan atas usulan tersebut;
- e. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat persediaan plat IMB yang sudah tidak berlaku sebanyak 6 (enam) plat dengan nilai sebesar Rp300.000,00. Persediaan plat IMB yang sudah



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

- tidak berlaku telah dikeluarkan dari Neraca per 31 Desember 2021. Usulan hapus atas plat IMB tersebut sudah dilaksanakan namun belum ada SK Penghapusan dan pemusnahan atas persediaan tersebut; dan
- f. Pada Dinas Pariwisata terdapat enam jenis karcis masuk tempat wisata yang sudah rusak sebesar Rp1.099.400,00 namun belum dimusnahkan, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Karcis	Harga/Lembar (Rp)	Nilai (Rp)
Karcis Tulamben			
▪ WNA Anak	1.900	239,00	454.100,00
▪ WNI Dewasa	300	239,00	71.700,00
▪ WNI Anak	400	239,00	95.600,00
Karcis Padang Bai			
▪ WNI Dewasa	400	239,00	95.600,00
▪ WNI Anak	1.600	239,00	382.400,00
Jumlah			1.099.400,00

Dinas Pariwisata sudah menyampaikan surat permohonan pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor: 700/1628/Dispar tanggal 24 Juni 2019 namun belum mendapat persetujuan.

6.1.1.2 Investasi Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Jangka Panjang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Investasi Non-Permanen	4.290.537.515,71	4.290.537.515,71	0,00	0,00
Investasi Permanen	116.674.507.269,08	112.843.201.026,01	3.831.306.243,07	3,40
Jumlah	120.965.044.784,79	117.133.738.541,72	3.831.306.243,07	3,27

6.1.1.2.1 Investasi Non-Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Non-Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Non-Permanen serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Bergulir	248.612.789,00	248.612.789,00	0,00	0,00
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	11.432.236.519,00	11.432.236.519,00	0,00	0,00
Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non-Permanen				
- Penyisihan Dana Bergulir	(248.612.789,00)	(248.612.789,00)	0,00	0,00
- Penyisihan Investasi Dalam Proyek Pembangunan	(7.141.699.003,29)	(7.141.699.003,29)	0,00	0,00
Jumlah	4.290.537.515,71	4.290.537.515,71	0,00	0,00

Penjelasan:

1. Penjelasan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

- Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2021 merupakan Dana Bergulir yang terakhir kali diluncurkan pada tahun 2009. Sejak Tahun 2010, Unit Pengelola Keuangan Dana Bergulir tidak lagi memberikan Bantuan Dana Bergulir kepada masyarakat dengan pertimbangan kondisi para pengguna Dana Bergulir terdahulu tidak mampu lagi mengangsur karena kesulitan likuiditas sehingga Dana Bergulir yang diberikan menjadi macet. Hal tersebut menjadi piutang atas investasi Dana bergulir yang tidak bisa tertagih (macet);
- Dalam pengelolaan Dana Bergulir terjadi permasalahan hukum. Sesuai surat Nomor B-420P.1.14/Dek.3/4/2011 tanggal 20 April 2011 perihal Permintaan Keterangan, Kejaksaan Negeri Amlapura telah melakukan pemeriksaan atas penyaluran Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan putusan yang dituangkan dalam surat putusan Nomor 171/Pid.Sus/2011/PN.Ap tanggal 11 Januari 2012 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

tanggal 18 Januari 2012. Salah satu hasil putusan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem dirugikan sebesar Rp120.350.000,00;

- c. Pada Tahun 2017, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem melaksanakan penyerahan penyelesaian piutang atas Investasi Dana Bergulir kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja pada tanggal 6 Maret 2017 dengan surat Nomor 181.3/656/Disperindag perihal penyerahan penyelesaian penghapusan piutang macet. Sejak diterima oleh KPKNL maka proses penagihan atas piutang dana bergulir dilaksanakan oleh pihak KPKNL dan sampai tanggal 31 Desember 2021 proses tersebut masih berlangsung dan belum diterbitkan rekomendasi penghapusan Dana Bergulir;
- d. Mutasi penerimaan dana bergulir sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, diuraikan sebagai berikut:

Tahun	Mutasi Saldo Dana Bergulir			Pembayaran		
	Saldo Laporan KPKNL	Saldo Neraca Pemda	Selisih	Menurut KPKNL	Menurut Pemda	
					Penerimaan Pembiayaan Pengembalian Dana Bergulir - LRA	Surat Keterangan Lunas
2017	341.700.106,08	290.219.129,08	51.480.977,00	51.480.977,00	51.480.977,00	0,00
2018	290.219.129,08	267.549.150,00	22.669.979,08	52.734.828,08	22.669.979,08	30.064.849,00
2019	267.549.150,00	251.826.425,00	15.722.725,00	25.972.725,00	15.722.725,00	10.250.000,00
2020	251.826.425,00	248.612.789,00	3.213.636,00	3.213.636,00	3.213.636,00	0,00
2021	248.612.789,00	248.612.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- e. Penyisihan atas Dana Bergulir dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Karangasem yang ditetapkan melalui Perbup Karangasem Nomor 8 Tahun 2020, dimana investasi nonpermanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan dimana jatuh tempo pada periode diatas 4 (empat) tahun disisihkan sebesar 100% dari nilai investasi.

2. Penjelasan Investasi Non-Permanen - Investasi Dalam Proyek Pembangunan

- a. Jumlah tersebut merupakan saldo Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2021 dan 2020 dalam Proyek Pembangunan Taman Ujung Karangasem sebesar Rp11.432.236.519,00 yang diukur dari Tahun 2009 dengan sisa umur investasi 21 tahun;
- b. Pembangunan Taman Ujung Karangasem berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Karangasem dengan Puri Agung Karangasem melalui Akta Notaris Nomor 86 tanggal 30 Maret 2002. Jangka waktu perjanjian ditetapkan selama 30 tahun yang berakhir pada tanggal 11 Januari 2031. Semua bangunan yang dibangun/diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem setelah berakhirnya perjanjian menjadi milik Puri Agung Karangasem. Sesuai dengan Keputusan Bersama Bupati Karangasem dan Puri Agung Karangasem No. 275 Tahun 2005 - No. 075 Tahun 2005, tanggal 4 Juli 2005 telah ditetapkan Dewan Pembina dan Badan Pengelola Obyek Wisata Taman Sukasada Ujung Kabupaten Karangasem;
- c. Pembagian keuntungan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Pembagian Hasil Pengelolaan Bersama yang dimuat dalam Akta Notaris Nomor 22 tanggal 11 Januari 2001, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemda Karangasem mendapat 60% dari keuntungan atau kerugian usaha bersama; dan
 - 2) Puri Agung Karangasem mendapat 40% dari keuntungan atau kerugian usaha bersama.
- d. Pada Tahun 2021, pandemi Covid-19 masih berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan ke Taman Ujung. Dengan segala upaya yang dilaksanakan oleh manajemen pendapatan yang diterima pada Tahun 2021 dengan pencermatan kondisi yang ada pada pengelolaan Taman Sukasada Ujung hanya bisa menutupi belanja yang vital saja sehingga belum menghasilkan keuntungan yang dapat dibagikan baik kepada Pemerintah Daerah maupun Puri Karangasem;
- e. Penyisihan investasi diperhitungkan dari penyeteroran bagian hasil untuk Pemerintah Kabupaten Karangasem dari Taman Ujung yang mengurangi nilai investasi dikarenakan sifat perjanjian Investasi



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

dalam proyek pembangunan Taman Sukasada Ujung antara pihak Pemda Karangasem dengan Puri Karangasem merupakan investasi non permanen dalam jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan maka pengkapisasian atas belanja untuk Badan Pengelola dihentikan, dan akumulasi nilai investasi dari Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2009, sejak Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya perjanjian disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan memperhitungkan penyisihan penurunan investasi. Penyetoran bagi hasil keuntungan dari Taman Ujung sejak pertama kali disetor adalah sebagai berikut:

Uraian	Hasil Investasi	Nilai Sisa Investasi
Nilai investasi dalam proyek pembangunan diukur dari Tahun 2009		11.432.236.519,00
Hasil investasi yang diterima sejak Tahun 2009 atas PKS Nomor 21 tanggal 11 Januari 2001 antara Puri Karangasem dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah:		
Hasil investasi tahun setor 2009	53.843.892,00	
Hasil investasi tahun setor 2010	82.249.500,00	
Hasil investasi tahun setor 2011	96.420.000,00	
Hasil investasi tahun setor 2012	121.570.386,00	
Hasil investasi tahun setor 2013	178.557.548,00	
Hasil investasi tahun setor 2014	356.201.584,00	
Hasil investasi tahun setor 2015	523.835.612,00	
Hasil investasi tahun setor 2016	795.210.711,00	
Hasil investasi tahun setor 2017	771.863.297,00	
Hasil investasi tahun setor 2018	910.489.536,00	
Hasil investasi tahun setor 2019	1.509.810.570,91	
Hasil investasi tahun setor 2020	1.741.646.366,38	
Hasil investasi tahun setor 2021	0,00	
Jumlah hasil investasi sampai dengan tanggal neraca		(7.141.699.003,29)
Nilai Sisa Investasi yang Dapat Direalisasikan		4.290.537.515,71

6.1.1.2.2 Investasi Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Investasi Permanen per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Investasi Permanen yang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD serta penjelasannya yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
PT. BPD Bali	40.300.000.000,00	39.550.000.000,00	750.000.000,00	1,90
PT. Jamkrida Bali Mandara	1.825.000.000,00	1.575.000.000,00	250.000.000,00	15,87
Perumda Tirta Toh Langkir	74.549.507.269,08	71.718.201.026,01	2.831.306.243,07	3,95
Jumlah	116.674.507.269,08	112.843.201.026,01	3.831.306.243,07	3,40

Penjelasan:

1. PT. BPD Bali:

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem pada PT. BPD Bali per 31 Desember 2021 yang disajikan berdasarkan metode biaya dikarenakan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Karangasem pada PT. BPD Bali sebesar 2,17% dari keseluruhan modal PT. BPD Bali. Penyertaan pada PT. BPD Bali sebesar Rp40.300.000.000,00 merupakan setoran modal Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada BPD Bali yang sudah disahkan. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Karangasem melaksanakan penambahan penyertaan modal kepada PT. BPD Bali sebesar Rp750.000.000,00, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang penambahan penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2021.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

2. PT. Jamkrida Bali Mandara:

Berikut rincian nilai penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem pada PT. Jamkrida Bali Mandara sampai dengan 31 Desember 2021:

No	Uraian	Jumlah	Peraturan Daerah
1	Penyertaan Modal Tahun 2011	75.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penempatan Saham Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.
2	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2017	500.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2017
3	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2018	500.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 12 tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2018
4	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2019	500.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Tahun 2019
5	Penambahan penyertaan modal pada Tahun 2021	250.000.000,00	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Tahun 2021
Jumlah		1.825.000.000,00	

PT. Jamkrida Bali Mandara didirikan dengan Akta Nomor 27 tanggal 21 November 2010 yang dibuat dihadapan I Made Pria Darsana, SH, M.Hum, Notaris di Badung dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-59685.A.H.01.01 Tahun 2010 tertanggal 22 Desember 2010 dan mendapat Ijin Operasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-720/KM.10/2010, tertanggal 30 Desember 2010 tentang Pemberian Ijin Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT. Jamkrida Bali Mandara.

Perusahaan ini memiliki kegiatan usaha dalam bidang jasa penjaminan pembiayaan yaitu memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, menengah dan koperasi, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah, meningkatkan sumber pendapatan usaha daerah dan jasa konsultasi manajemen. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Karangasem memperoleh deviden sebesar Rp9.810.209,00 yang diterima di Rekening Kas Daerah pada tanggal 26 April 2021 untuk Tahun Buku 2020 serta deviden sebesar Rp3.534.863,00 yang juga diterima di Rekening Kas Daerah pada tanggal 26 April 2021 untuk Tahun Buku 2012-2019.

Metode yang digunakan untuk mengakui penyertaan modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara yaitu **metode biaya (cost method)** dikarenakan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Karangasem per tanggal 31 Desember 2021 hanya sebesar 1,18%.

3. Perumda Tirta Tohlangkir

Pada Tahun 2021 terjadi penambahan Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dari Tahun 2020 yaitu Rp64.600.547.648,68 disebabkan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem Tahun 2021 sebesar Rp3.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD Perusahaan Umum Daerah Tirta Tohlangkir TA 2021 tanggal 16 Desember 2020 menjadi Rp67.600.547.648,68. Perumda Tirta Tohlangkir untuk Tahun Buku 2021 memperoleh Laba sebesar Rp738.480.800,41. Namun, laba tersebut tidak meningkatkan ekuitas Pemerintah di PDAM, dikarenakan adanya koreksi atas keuntungan tahun lalu sebesar Rp351.454.764,05 dan adanya pembagian keuntungan tahun lalu sebesar Rp555.719.793,29 yang disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2021 didasarkan pada Surat Persetujuan Bupati Karangasem Nomor 900/219/PSDA/Setda tanggal 23 Desember 2021 serta Perda Kabupaten Karangasem



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor 2 Tahun 1976 yaitu 30% untuk Dana Pembangunan Daerah dan 25% untuk Anggaran dan Belanja Daerah dari Laba bersih Perumda Tirta Toh Langkir. Perhitungan pembagian keuntungan tersebut diperoleh dari nilai laba Tahun 2020 berdasarkan Laporan Auditor KAP K. GUNARSA sebesar Rp1.010.399.624,17 dikalikan 55% sesuai dengan ketentuan di atas.

Perumda Tirta Tohlangkir didirikan berdasarkan Perda Nomor 02 Tahun 1976 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem sebagaimana telah dirubah terakhir melalui Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang PDAM. Karena didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem maka penyertaan modal pada PDAM Tirta Tohlangkir diakui dengan **metode ekuitas (equity method)**.

Berikut perhitungan pengakuan nilai Investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Perumda Tirta Tohlangkir sampai dengan 31 Desember 2021:

Uraian	Nilai
Modal Pemerintah Kabupaten Karangasem	67.600.547.648,68
Penyertaan modal yang belum ditetapkan statusnya	5.680.195.396,00
Modal hibah	1.245.250.466,00
Cadangan umum	3.661.881.607,75
Cadangan dana sosial dan pendidikan	1.561.492.094,69
Akumulasi kerugian s.d. tahun lalu	(5.938.340.744,45)
Laba/rugi tahun berjalan (<i>audited</i>)	738.480.800,41
Nilai Investasi pada Perumda Tirta Toh Langkir Karangasem	74.549.507.269,08

Nilai investasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem *sama dengan* nilai total ekuitas yang dinyatakan oleh Perumda Tirta Tohlangkir dalam laporan keuangan Tahun Buku 2021.

Laporan Keuangan PDAM Tirta Tohlangkir untuk Tahun Buku 2021 telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjo, Machdjud Modopuro dan Rekan dengan Nomor Laporan 00007/3.0395/AU.2/11/0822-1/1/IV/2022 tanggal 08 April 2022. Opini atas Laporan Keuangan tersebut yaitu *Wajar Tanpa Pengecualian*.

6.1.1.3 Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Tanah	161.485.813.857,25	185.136.430.857,25	(23.650.617.000,00)	(12,77)
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	532.570.887.138,68	454.803.179.097,28	77.767.708.041,40	17,10
Aset Tetap Gedung dan Bangunan	858.295.925.089,48	838.838.315.753,14	19.457.609.336,34	2,32
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.404.299.729.701,16	1.328.267.538.894,16	76.032.190.807,00	5,72
Aset Tetap Lainnya	39.299.650.112,35	43.377.935.939,14	(4.078.285.826,79)	(9,40)
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.960.612.710,00	12.274.283.066,00	686.329.644,00	5,59
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.844.085.591.786,38)	(1.710.036.936.411,91)	(134.048.655.374,47)	7,84
Jumlah	1.164.827.026.822,54	1.152.660.747.195,06	12.166.279.627,48	1,06

Penjelasan:

1. Pemerintah Kabupaten Karangasem baru menerapkan klasifikasi penyajian BMD sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016. Dampak dari penerapan Permendagri tersebut dalam penyusunan laporan keuangan ini menyebabkan terjadinya reklasifikasi antar jenis dan objek klasifikasi Aset Tetap serta pengakuan aset ekstrakompabel yang semula di bawah nilai kapitalisasi menjadi aset intrakompabel;
2. Penggunaan SIMDA BMD dalam penerapan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 mengakibatkan adanya kesalahan klasifikasi pada tingkat sub-sub rincian objek aset tetap peralatan dan mesin yang mana adanya pengakuan aset sebagai berikut:
 - a. Pengakuan *Distiling Apparatus* dengan kodefikasi BMD 1.3.2.08 (Alat Laboratorium) yang seharusnya diakui dengan kodefikasi BMD 1.3.2.10 (Komputer); dan



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

- b. Pengakuan Alat *Degreening* Jeruk Kap 110 Kg dengan kodefikasi BMD 1.3.2.08 (Alat Laboratorium) yang seharusnya diakui dengan kodefikasi BMD 1.3.2.5 (Alat Kantor dan Rumah Tangga).
3. Pemerintah Kabupaten Karangasem telah menguasai aset-aset yang berasal dari proses penergian 7 (tujuh) unit TK Swasta. Namun, aset-aset yang dikuasai tersebut belum diinventarisasi dan dicatat dalam KIB. Di Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga akan melakukan proses inventarisasi dan pencatatan dalam KIB sesuai dengan UPB masing-masing TK Negeri;
4. Berdasarkan data hasil inventarisasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait dengan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah diketahui sebagai berikut:
 - a. Pengembang perumahan yang telah diinventarisasi sebanyak 35 pengembang;
 - b. Terdapat 5 (lima) pengembang yang asetnya telah tercatat dalam Daftar Aset Pemda, 28 pengembang belum menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dan 2 (dua) pengembang telah melakukan permohonan penyerahan PSU kepada Pemda;
 - c. Dari 2 (dua) pengembang yang telah melakukan permohonan penyerahan PSU, 1 (satu) pengembang telah dilakukan pengukuran;
 - d. Dari 28 pengembang yang belum melakukan proses penyerahan PSU, 20 pengembang telah menyelesaikan aktivitas pembangunan dan 8 (delapan) pengembang masih dalam tahap pembangunan;
 - e. Atas 20 pengembang yang telah menyelesaikan pembangunan, 8 (sembilan) pengembang telah teridentifikasi memiliki Prasarana, Sarana, dan Utilitas namun belum melakukan proses penyerahan PSU; dan
 - f. Untuk 8 (delapan) pengembang yang masih dalam tahap pembangunan, 4 (empat) pengembang telah teridentifikasi memiliki Prasarana, Sarana, dan Utilitas namun juga belum melakukan proses penyerahan PSU.
5. Atas aset tetap yang diperoleh di Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki jaminan pemeliharaan yang belum jatuh tempo sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.407.423.971,00 dengan penerbit jaminan PT Jamkrida Bali Mandara.

6.1.1.3.1 Aset Tetap Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Tanah serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Tanah	161.485.813.857,25	185.136.430.857,25	(23.650.617.000,00)	(12,77)

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah selama TA 2021 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	185.136.430.857,25
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Belanja Modal	0,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Penilaian	40.800.000,00
✓ Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	2.700.000,00
- Mutasi antar SKPD	27.500.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	71.000.000,00
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Lebih/Double Catat	(269.794.000,00)
✓ Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(23.424.323.000,00)
- Mutasi antar SKPD	(27.500.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(23.721.617.000,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Nilai
Saldo Akhir	161.485.813.857,25

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran 8.

- Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki 5 (lima) bidang tanah dengan sertifikat ganda yang tercatat di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah. Seluruh sertifikat ganda tersebut sama-sama atas nama Pemerintah Kabupaten Karangasem. Penghapusan sertifikat ganda tersebut akan diproses di Tahun 2022;
- Progres pelaksanaan sertifikasi Aset tanah Pemerintah Kabupaten Karangasem sampai dengan akhir tahun 2021 seperti pada rincian berikut:
 - Aset tanah jalan secara keseluruhan terdapat 575 ruas jalan dengan luas total 7.588.924,36 m² memiliki nilai Rp.75.689.162.002,00. Dalam tahun 2021 telah berhasil diterbitkan sertifikat sebanyak 594 sertifikat. Dari jumlah sertifikat tersebut sebanyak 567 sertifikat sudah dimasukkan kedalam 175 ruas jalan dan sudah update data BMD, sedangkan sisanya sebanyak 27 sertifikat belum dapat diupdate karena masih perlu mencocokkan dengan nama ruas Jalan. Sehingga aset tanah jalan yang belum bersertifikat sebanyak 400 ruas jalan dengan luas 5.472.796,43 m² memiliki nilai Rp.45.771.048.402,00; dan
 - Aset tanah nonjalan seluruhnya berjumlah 642 bidang dengan luas 1.572.687,23 m² memiliki nilai Rp.109.384.873.856,00, dalam tahun 2021 berhasil disertifikatkan 9 bidang sehingga aset tanah nonjalan yang belum bersertifikat menjadi 230 bidang dengan total luas 485.454,81 m² memiliki nilai Rp.22.401.596085,00.

6.1.1.3.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Peralatan dan Mesin per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	532.570.887.138,68	454.803.179.097,28	77.767.708.041,40	17,10

Penjelasan:

- Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama TA 2021 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	454.803.179.097,28
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Belanja Modal	48.585.490.957,63
- Kapitalisasi Non-Belanja Modal	776.467.000,00
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	1.349.771.300,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	8.725.024.438,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	34.310.671.118,00
- Mutasi antar SKPD	7.352.512.971,20
Jumlah Mutasi Tambah	101.099.937.784,83
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Salah Pos Belanja Modal	(89.532.716,00)
- Pengakuan Ekstrakompabel	(1.983.016.729,00)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(96.540.000,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(10.687.529.390,20)
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(3.123.097.937,00)
✓ Lebih Catat	(0,03)
- Mutasi antar SKPD	(7.352.512.971,20)
Jumlah Mutasi Kurang	(23.332.229.743,43)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Nilai
Saldo Akhir	532.570.887.138,68

- Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran 9; dan
- Pemerintah Kabupaten Karangasem memiliki 6 (enam) unit kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan yang dimanfaatkan pihak lain tanpa didukung perjanjian pemanfaatan berupa sewa.

6.1.1.3.3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Gedung dan Bangunan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Gedung dan Bangunan	858.295.925.089,48	838.838.315.753,14	19.457.609.336,34	2,32

Penjelasan:

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama TA 2021 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	838.838.315.753,14
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	15.612.356.116,52
- Kapitalisasi Non-Belanja Modal	6.234.370.382,60
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	3.517.684.370,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	408.100.000,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Kurang Catat	221.571.000,02
✓ Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	10.117.762.000,00
- Mutasi antar SKPD	610.011.138,00
Jumlah Mutasi Tambah	36.721.855.007,14
Mutasi Kurang:	
- Salah Pos Belanja Modal	(116.156.820,00)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(8.133.149.088,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(4.742.807.488,42)
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(3.662.121.136,29)
✓ Lebih Cacat	(0,09)
- Mutasi antar SKPD	(610.011.138,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(17.264.245.670,80)
Saldo Akhir	858.295.925.089,48

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran 10.

6.1.1.3.4 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.404.299.729.701,16	1.328.267.538.894,16	76.032.190.807,00	5,72

Penjelasan:

- Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama TA 2021 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	1.328.267.538.894,16



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Nilai
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	75.187.840.992,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	1.489.777.816,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	489.507.000,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	201.583.199,00
Jumlah Mutasi Tambah	77.368.709.007,00
Mutasi Kurang:	
- Salah Pos Belanja Modal	(940.854.000,00)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(384.660.200,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(11.004.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(1.336.518.200,00)
Saldo Akhir	1.404.299.729.701,16

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *lampiran 11*.

- Sesuai Keputusan Bupati Karangasem Nomor 595/Hk/2016 tentang Penetapan Status dan Fungsi Ruas Jalan di Kabupaten Karangasem dengan jumlah ruas jalan yang jadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Karangasem sebanyak 575 ruas jalan dengan jumlah total 1.202,54 km¹. Pada Tahun 2020 dilakukan penilaian dan pencatatan atas 168 ruas jalan senilai Rp53.676.293.160,00 sebagai bagian dari 575 ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Karangasem. Sehingga pada Tahun 2021 sudah semua ruas jalan dilakukan penilaian dan pencatatan BMD.

6.1.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Lainnya per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Lainnya	39.299.650.112,35	43.377.935.939,14	(4.078.285.826,79)	(9,40)

Penjelasan:

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya selama TA 2021 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	43.377.935.939,14
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	4.283.174.370,00
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	17.640.000,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	96.540.000,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Kurang Catat	0,50
- Mutasi antar SKPD	250.325.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	4.647.679.370,50
Mutasi Kurang:	
- Salah Pos Belanja Modal	(7.000.000,00)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(3.859.510.100,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(4.609.130.097,28)
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Lebih Catat	(0,01)
- Mutasi antar SKPD	(250.325.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(8.725.965.197,29)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Nilai
Saldo Akhir	39.299.650.112,35

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran 12.

6.1.1.3.6 Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.960.612.710,00	12.274.283.066,00	686.329.644,00	5,59

Penjelasan:

Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan selama TA 2021 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	12.274.283.066,00
Mutasi Tambah:	
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	2.041.496.880,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	58.900.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	2.100.396.880,00
Mutasi Kurang:	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(1.414.067.236,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(1.414.067.236,00)
Saldo Akhir	12.960.612.710,00

Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran 13.

6.1.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	(Kenaikan)/Penurunan	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(402.486.280.165,90)	(346.010.763.773,21)	(56.475.516.392,69)	16,32
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(356.019.300.984,00)	(331.515.546.208,74)	(24.503.754.775,26)	7,39
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.085.580.010.636,48)	(1.032.510.626.429,96)	(53.069.384.206,52)	5,14
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah	(1.844.085.591.786,38)	(1.710.036.936.411,91)	(134.048.655.374,47)	7,84

Penjelasan:

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan selama TA 2021 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Saldo Awal	(1.710.036.936.411,91)
Mutasi Tambah:	
- Beban Penyusutan	(118.672.358.122,50)
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	(255.813.333,33)
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Kurang Catat	(3.549.558.582,35)
✓ Akm. atas Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	(33.254.842.079,00)
- Mutasi antar SKPD	(5.732.244.381,20)
Jumlah Mutasi Tambah	(161.464.816.498,38)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Nilai
Mutasi Kurang:	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	19.407.397.434,20
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Lebih Catat	2.276.519.308,51
- Mutasi antar SKPD	5.732.244.381,20
Jumlah Mutasi Kurang	27.416.161.123,91
Saldo Akhir	(1.844.085.591.786,38)

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *lampiran 14*.

6.1.1.4 Dana Cadangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tetap Tanah per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Dana Cadangan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	-

6.1.1.5 Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lainnya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	24.446.989.416,00	0,00	24.446.989.416,00	-
Aset Tidak Berwujud	245.754.604,00	149.945.000,00	95.809.604,00	63,90
Aset Lain-Lain	23.043.776.353,05	20.173.515.616,83	2.870.260.736,22	14,23
Jumlah	47.736.520.373,05	20.323.460.616,83	27.413.059.756,22	134,88

6.1.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kemitraan dengan Pihak Ketiga per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Kemitraan dengan Pihak Ketiga serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Sewa	0,00	0,00	0,00	-
Kerjasama Pemanfaatan	27.270.679.937,00	0,00	27.270.679.937,00	-
Bangun Serah Guna	0,00	0,00	0,00	-
Akumulasi Penyusutan Kerjasama Pemanfaatan	(2.823.690.521,00)	0,00	(2.823.690.521,00)	-
Jumlah	24.446.989.416,00	0,00	24.446.989.416,00	-

Penjelasan:

Bentuk aset tetap yang dikerjasamakan pemanfaatannya berupa pinjam pakai Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2021 yaitu sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021
Tanah	23.424.323.000,00
Peralatan dan Mesin	3.410.097.937,00
Gedung dan Bangunan	436.259.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.614.607.521,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(209.083.000,00)
Jumlah	24.446.989.416,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

6.1.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Aset Tidak Berwujud per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Tidak Berwujud serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	326.603.000,00	185.900.000,00	140.703.000,00	75,69
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(80.848.396,00)	(35.955.000,00)	(44.893.396,00)	124,86
Jumlah	245.754.604,00	149.945.000,00	95.809.604,00	63,90

Penjelasan:

Rincian SKPD yang memiliki Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
Dinas Kesehatan	74.003.000,00	(1.666.729,00)	72.336.271,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	18.800.000,00	(9.400.000,00)	9.400.000,00
Dinas Perhubungan	122.100.000,00	(42.735.000,00)	79.365.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	42.700.000,00	(2.846.667,00)	39.853.333,00
Kecamatan Karangasem - Kel. Subagan	24.000.000,00	(3.200.000,00)	20.800.000,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	45.000.000,00	(21.000.000,00)	24.000.000,00
Jumlah	326.603.000,00	(80.848.396,00)	245.754.604,00

6.1.1.5.3 Aset Lain-Lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kemitraan dengan Pihak Ketiga per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Aset Lain-Lain Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Pajak yang akan Dihapuskan	0,00	0,00	0,00	-
Tagihan Tunggakan Taman Wisata Putung	0,00	0,00	0,00	-
Ternak Guliran dan Tanaman	2.015.034.366,00	2.015.034.366,00	0,00	0,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Kegiatan Operasional/Akan Dihilangkan/Disertakan	2.408.049.605,81	4.256.299.522,47	(1.848.249.916,66)	(43,42)
Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat	18.155.712.181,24	12.965.302.861,69	5.190.409.319,55	40,03
Aset Tetap yang akan Dihapuskan Selain Rusak Berat	223.336.000,00	695.234.666,67	(471.898.666,67)	(67,88)
Aset yang Belum Dikapitalisasi serta Ditelusuri Lebih Lanjut	241.644.200,00	241.644.200,00	0,00	0,00
Jumlah	23.043.776.353,05	20.173.515.616,83	2.870.260.736,22	14,23

Penjelasan:

1. Piutang Pajak yang Akan Dihapuskan:

Jumlah sebesar Rp0,00 merupakan saldo piutang bersih pajak yang dapat direalisasikan dan direncanakan akan dihapuskan per 31 Desember 2021 sesuai dengan surat usulan penghapusan piutang pajak nomor 973/803.a/Dispenda tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp940.631.736,44 yang telah disisihkan sepenuhnya (100%) dengan nilai yang sama. Telah dilakukan upaya penagihan lebih dari tiga kali, namun sampai tanggal neraca (31 Desember 2021) belum dilakukan pelunasan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Rincian piutang pajak yang akan dihapuskan dapat dilihat pada lampiran 15.

2. Tagihan Tunggakan Taman Wisata Putung:

Jumlah sebesar Rp0,00 merupakan saldo tagihan piutang bersih atas tunggakan pembayaran sewa Taman Wisata Putung oleh PT. Panca Bahagia Rahayu sebesar Rp13.040.000,00 yang telah disisihkan sepenuhnya (100%) dengan nilai yang sama. Telah dilakukan upaya penagihan lebih dari tiga kali, namun sampai tanggal



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

neraca (31 Desember 2021) belum dilakukan pelunasan oleh yang bersangkutan. Tagihan atas pembayaran sewa Taman Wisata Putung sampai akhir Tahun 2020 belum dilaksanakan usulan penghapusan.

Taman Wisata Putung dikelola oleh pihak ke III (PT Panca Bahagia Rahayu) sesuai surat perjanjian Sewa Menyewa Nomor 024/21/Umum Tanggal 16 Mei 1998 untuk jangka waktu 25 tahun (30 April 1986 s.d. 1 Mei 2011) dengan nilai sewa per tahun Rp3.260.000,00. Namun dalam pelaksanaannya pihak ke III (PT Panca Bahagia Rahayu) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga terdapat tunggakan sewa selama 4 tahun (2001 s.d. 2004), dan telah dilakukan pemutusan kontrak kerja sama dengan PT Panca Bahagia Rahayu. Sampai dengan tanggal neraca (31 Desember 2021), belum ada penyelesaian tunggakan sewa tersebut di atas.

3. Ternak Guliran dan Tanaman:

Jumlah sebesar Rp2.015.034.366,00 merupakan saldo ternak guliran sebesar Rp1.992.165.366,00 dan tanaman perkebunan lain-lain pada Dinas Pertanian sebesar Rp22.869.000,00. Atas ternak yang digulirkan dari Tahun 2003, pada tahun 2021 tidak terjadi penagihan dan perguliran kembali kepada petani. Rincian dari Guliran Ternak sesuai rincian dibawah:

Tahun Pemberian	Jenis Ternak	Saldo 31 Desember 2021	
		Jumlah	Nilai
2003	Sapi	36	62.947.500,00
2004	Sapi	16	38.325.000,00
2005	Sapi dan Kambing	30	18.050.000,00
2006	Sapi dan Kambing	34	58.650.000,00
2007	Sapi, Kambing dan Babi	658	915.089.110,00
2008	Sapi, Kambing, Babi, Itik dan Ayam	4.425	899.103.756,00
Jumlah		5.199	1.992.165.366,00

4. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Kegiatan Operasional/Akan Dihilangkan/Disertakan

Jumlah sebesar Rp2.408.049.605,81 merupakan saldo nilai buku aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan dan akan dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada pihak Pihak Ketiga per 31 Desember 2021. Nilai tersebut diatas disajikan berdasarkan nilai buku aset tetap, dengan uraian sebagai berikut:

Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				
Peralatan dan Mesin	1.441.764.255,00	1.409.434.249,00	32.330.006,00	Sekolah swasta
	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	Rusak berat sekolah swasta
	119.903.000,00	119.903.000,00	0,00	Aset SMA/SMK belum divalidasi
Gedung dan Bangunan	1.932.130.384,00	660.943.183,36	1.271.187.200,64	Sekolah swasta
	415.543.000,00	23.212.800,00	392.330.200,00	Rusak berat sekolah swasta
	357.326.000,00	91.638.080,00	265.687.920,00	Aset SMA/SMK belum divalidasi
Aset Tetap Lainnya	117.550.000,00	117.550.000,00	0,00	Sekolah swasta
Dinas Perikanan				
Gedung dan Bangunan	212.500.000,00	42.500.000,00	170.000.000,00	Belum ada BAST
Dinas PUPR dan Perkim				
Jalan, Irigasi dan Jaringan	408.079.000,00	341.172.833,33	66.906.166,67	Akan diserahkan ke Desa
	24.216.792.751,99	24.057.184.639,49	159.608.112,50	Akan diserahkan ke Provinsi Bali
Jumlah	29.271.588.390,99	26.863.538.785,18	2.408.049.605,81	

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga telah mengadakan penelusuran ke sekolah-sekolah swasta yang menerima aset dan mengintruksikan kepada penerima untuk memohon hibah yang hingga akhir Tahun 2021 sudah ditindaklanjuti oleh sebagian besar penerima hibah tersebut.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Untuk aset pada Dinas Perikanan, telah dilaksanakan penelusuran atas Aset Gedung dan Bangunan tersebut, pihak pengguna yaitu kelompok nelayan menyatakan keinginan untuk memohon hibah aset tersebut. Namun terdapat pertimbangan bahwa tujuan awal dari pengadaan bangunan tersebut adalah sebagai balai pengawasan dimana kelompok nelayan tidak memiliki fungsi pengawas sehingga permohonan hibah masih perlu di pertimbangkan.

Untuk aset jalan yang akan diserahkan ke desa yang tercatat pada Dinas PUPR pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp4.215.321.000,00 dengan akumulasi penyusutan senilai Rp2.300.164.916,67 dan nilai buku sebesar Rp1.915.156.083,33 atas 31 aset pemeliharaan jalan. telah dihibahkan dari Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada Desa yang dituangkan dalam NPHD sebanyak 28 aset dengan nilai Rp3.807.242.000,00, akumulasi penyusutan sebesar Rp1.958.992.083,34 dan nilai buku sebesar Rp1.848.249.916,66 di Tahun 2021.

Dinas PUPR pada Tahun 2021 juga sudah menyampaikan surat Sekretaris Daerah/Pengelola BMD Kabupaten Karangasem kepada Sekretaris Daerah/Pengelola BMD Provinsi Bali Nomor: 690/456/DPUPR/Setda/2021 tanggal 30 Maret 2021 perihal Hibah Aset Jalan dimana memohon kesediaan dari provinsi untuk menerima hibah dan menyampaikan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah, namun sampai akhir Tahun 2021 belum ada tanggapan dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

5. Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat

Jumlah sebesar Rp18.155.712.181,24 merupakan saldo nilai buku Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang tidak dapat digunakan lagi untuk kegiatan operasional pemerintahan per 31 Desember 2021. Rincian Aset Tetap dalam kondisi rusak berat per SKPD dapat dilihat pada *lampiran 16*. Atas aset tetap dalam kondisi rusak berat sudah dilakukan pengajuan usulan penghapusan, progres sampai dengan 2021 sudah dibentuk Tim Teknis Penghapusan BMD.

6. Aset Tetap akan Dihapuskan Selain Rusak Berat

Jumlah sebesar Rp223.336.000,00 merupakan saldo Aset Tetap yang akan dihapuskan dalam kondisi selain rusak berat per 31 Desember 2021. Atas aset tetap akan dihapuskan selain rusak berat tercatat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp223.336.000,00 merupakan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pasar Bebandem dan Pasar Seni Manggis yang berupa perencanaan (DED) yang di alihkan status penggunaannya/pindahan dari Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah. Pemerintah kabupaten Karangasem belum mengambil kebijakan untuk menghapus DED tersebut walau perencanaan tersebut kemungkinan tidak dapat dilanjutkan mengingat pembangunan telah dilaksanakan dengan perencanaan yang berbeda.

Penurunan aset tetap akan dihapuskan selain rusak berat dari tahun sebelumnya disebabkan aset pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga berupa tanah lapangan olah raga yang diperoleh Tahun 2011 senilai Rp99.725.000,00, (yang tercatat sampai dengan Tahun 2020) setelah ditelusuri aset tersebut merupakan pengurangan dan penyerahan lapangan umum Kecamatan Kubu sehingga direklasifikasi dan digabung dengan aset Gedung dan Bangunan. Selain itu aset pada Dinas PUPR berupa jalan irigasi dan jaringan senilai Rp489.507.000,00 (yang tercatat sampai dengan Tahun 2020) telah dilakukan reklasifikasi dan digabung pada aset induk jalan irigasi dan jaringan pada aset tetap.

7. Aset yang Belum Dikapitalisasi serta Ditelusuri Lebih Lanjut

Jumlah sebesar Rp241.644.200,00 merupakan saldo Aset Tanah yang masih perlu penelusuran serta Gedung dan Bangunan yang belum dikapitalisasi per 31 Desember 2021. Rincian Aset Tetap tersebut per OPD dapat dilihat sebagai berikut:

Uraian	Jenis Aset	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	Keterangan
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	Tanah	60.905.000,00	0,00	60.905.000,00	Aset milik provinsi (butuh penelusuran)
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Gedung dan Bangunan	207.845.000,00	(27.105.800,00)	180.739.200,00	Aset yang belum dikapitalisasi
Jumlah		268.750.000,00	(27.105.800,00)	241.644.200,00	



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Aset yang belum dikapitalisasi serta ditelusuri lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tanah yang tercatat di Dinas Pertanian namun sertifikat milik atas nama Pemerintah Provinsi Bali, upaya yang telah dilakukan yaitu dengan menyampaikan surat secara resmi dengan nomor 026/260/SET/DISTAN tanggal 8 Januari 2021 dan mengunjungi langsung ke BPKAD Provinsi Bali namun belum ada jawaban; dan
- Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga masih menelusuri dokumen pengadaannya namun belum diketemukan.

6.1.2 Kewajiban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kewajiban Jangka Pendek	47.633.376.850,10	42.615.254.513,97	5.018.122.336,13	11,78
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah	47.633.376.850,10	42.615.254.513,97	5.018.122.336,13	11,78

6.1.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Pendek per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	302.580.862,00	1.181.578,37	301.399.283,63	25.508,19
Pendapatan Diterima Dimuka	420.916.766,00	540.433.707,00	(119.516.941,00)	(22,12)
Utang Belanja dan Transfer	46.869.037.215,74	42.073.639.228,60	4.795.397.987,14	11,40
Utang Jangka Pendek Lainnya	40.842.006,36	0,00	40.842.006,36	-
Jumlah	47.633.376.850,10	42.615.254.513,97	5.018.122.336,13	11,78

6.1.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Perhitungan Fihak Ketiga per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Perhitungan Fihak Ketiga yang merupakan Utang Perhitungan Fihak Ketiga di Bendahara (Selain BUD) serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang PPh Pusat	6.205.383,00	0,00	6.205.383,00	-
Utang PPN Pusat	296.375.479,00	0,00	296.375.479,00	-
Utang PFK Lainnya	0,00	1.181.578,37	(1.181.578,37)	(100,00)
Jumlah	302.580.862,00	1.181.578,37	301.399.283,63	25.508,19

Penjelasan:

- Utang Perhitungan Fihak Ketiga tersebut merupakan utang Perhitungan Fihak Ketiga atas PPh Pusat dan PPN Pusat yang belum disetorkan ke Kas Negara oleh Bendahara Dana BOS di Kabupaten Karangasem sampai dengan tanggal Neraca 31 Desember 2021;
- Utang Perhitungan Fihak Ketiga tersebut merupakan bagian dari Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya dalam *point 6.1.1.1.1* di atas; dan
- Rincian Perhitungan Fihak Ketiga dapat dilihat pada *lampiran 17*.

6.1.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Pendapatan Diterima Dimuka per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Pendapatan Diterima Dimuka yang merupakan Pendapatan Pajak Diterima Dimuka dan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Diterima Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
➤ Setoran Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga				
✓ Pajak Reklame Diterima Dimuka	145.159.000,00	145.826.708,00	(667.708,00)	(0,46)
✓ Retribusi IMTA Diterima Dimuka	200.434.100,00	284.509.000,00	(84.074.900,00)	(29,55)
✓ Pendapatan BLUD Diterima Dimuka	12.060.000,00	37.520.000,00	(25.460.000,00)	(67,86)
➤ Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa				
✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Diterima Dimuka	63.263.666,00	72.577.999,00	(9.314.333,00)	(12,83)
Jumlah	420.916.766,00	540.433.707,00	(119.516.941,00)	(22,12)

Penjelasan:

Atas saldo Pendapatan diterima dimuka diperoleh dari pendapatan daerah atas perjanjian yang masih berlaku pada tahun berikutnya. Perhitungan masa akrual menggunakan satuan "bulan". Jika transaksi perjanjian terjadi antara tanggal 1 s.d. 15, maka dihitung 1 bulan penuh pada bulan transaksi, sedangkan jika terjadi pada tanggal 16 s.d. 31, maka dihitung 1 bulan pada bulan berikutnya.

Rincian Pendapatan diterima dimuka tersebut dapat dilihat pada *lampiran 18*.

6.1.2.1.3 Utang Belanja dan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Belanja dan Transfer per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Belanja dan Transfer sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
➤ Utang Belanja				
✓ Utang Belanja Pegawai	34.399.303.778,73	36.725.169.862,27	(2.325.866.083,54)	(6,33)
✓ Utang Belanja Barang dan Jasa	11.261.619.871,00	4.408.555.628,00	6.853.064.243,00	155,45
✓ Utang Belanja Modal	0,00	6.962.200,00	(6.962.200,00)	(100,00)
➤ Utang Transfer				
✓ Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan	1.208.113.566,01	932.951.538,33	275.162.027,68	29,49
✓ Utang Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah	46.869.037.215,74	42.073.639.228,60	4.795.397.987,14	11,40

Penjelasan:

Atas utang belanja Tahun 2021 didalamnya termasuk utang belanja yang belum dibayarkan atas Belanja Pegawai yaitu belanja Tambahan Penghasilan Pegawai, kekurangan pembayaran BPJS Kesehatan untuk sertifikasi guru, insentif pemungutan retribusi, insentif pemungutan pajak, jasa pelayanan serta belanja gaji sebesar Rp34.982.448.256,73, utang barang dan jasa sebesar Rp10.678.475.393,00 serta utang transfer kepada desa sebesar Rp1.208.113.566,01. Selain itu terdapat koreksi atas saldo utang atas penyajian saldo utang 31 Desember 2021 sebesar Rp228.803.863,65 yang terdiri dari belanja pegawai Rp277.774.163,65, belanja barang dan jasa Rp1.000.000,00 serta belanja modal Rp29.700,00. Hal tersebut disebabkan insentif pemungutan pajak dan retribusi pariwisata tidak dilaksanakan pengamprahan serta kesalahan perhitungan utang.

Rincian Utang Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada *lampiran 19 dan 20*.

6.1.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Utang Jangka Pendek Lainnya per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Utang Jangka Pendek Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	-
Utang Jangka Pendek Lainnya - Lainnya	4.842.006,36	0,00	4.842.006,36	-
Jumlah	40.842.006,36	0,00	40.842.006,36	-



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Penjelasan:

1. Utang Kelebihan Pembayaran PAD merupakan utang kelebihan pembayaran lain-lain PAD yang Sah di BLUD RSUD Karangasem berupa kelebihan transfer dari BPJS atas klaim pasien Covid-19 sebesar Rp36.000.000,00 yang akan dipotong oleh pihak BPJS terhadap pendapatan di Tahun 2022. Utang ini disajikan sebagai bagian dari Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya dalam *point 6.1.1.1.1* di atas; dan
2. Utang Jangka Pendek Lainnya – Lainnya merupakan utang Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada pihak terkait yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Utang Jangka Pendek Lainnya berupa tagihan samsat kendaraan yang belum dibayarkan kepada pemilik dana di Bendahara Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem sebesar Rp496.500,00;
 - b. Utang Jangka Pendek Lainnya berupa pembayaran kepada ASN dan pihak ketiga yang belum diserahkan di Bendahara JKN FKTP sebesar Rp166.320,00; dan
 - c. Utang Jangka Pendek Lainnya berupa kelebihan penyetoran kas tunai ke rekening dana BOS dari Bendahara BOS sebesar Rp4.179.186,36.

Utang ini juga disajikan sebagai bagian dari Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya dalam *point 6.1.1.1.1* di atas.

6.1.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Kewajiban Jangka Panjang per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Panjang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

6.1.3 Ekuitas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk Pos Ekuitas per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada Ekuitas serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas	1.541.639.811.645,02	1.446.851.883.388,06	95.371.072.735,36	6,59

Penjelasan:

1. Saldo Ekuitas tersebut merupakan kekayaan bersih (selisih antara aset dengan kewajiban) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem; dan
2. Saldo Ekuitas yang disajikan di Neraca telah sama dengan saldo Ekuitas Akhir sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada *Point 6.2.4*.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

6.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

6.2.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2021 dan 2020 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Ekuitas Awal	1.446.851.883.388,06	1.471.040.028.219,00

Pemerintah Kabupaten Karangasem menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2021 dan 2020 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2020 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

6.2.2 Surplus/(Defisit) - LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2021 dan 2020 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Surplus/(Defisit) - LO	87.552.152.768,67	(40.007.108.836,46)

Pada Tahun 2021 dan 2020, Pemerintah Kabupaten Karangasem masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan nonoperasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *point 6.4.6*.

6.2.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Koreksi Ekuitas atas Aset Lancar	(9.397.446,76)	67.173.791,27
Koreksi Ekuitas atas Investasi	(351.454.764,05)	0,00
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap	9.404.302.239,26	15.713.369.440,78
Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya	(2.036.478.403,81)	0,00
Koreksi Ekuitas atas Kewajiban	228.803.863,65	4.459.116,01
Koreksi Ekuitas atas Lainnya	0,00	33.961.657,46
Jumlah Dampak Kumulatif	7.235.775.488,29	15.818.964.005,52

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang signifikan mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

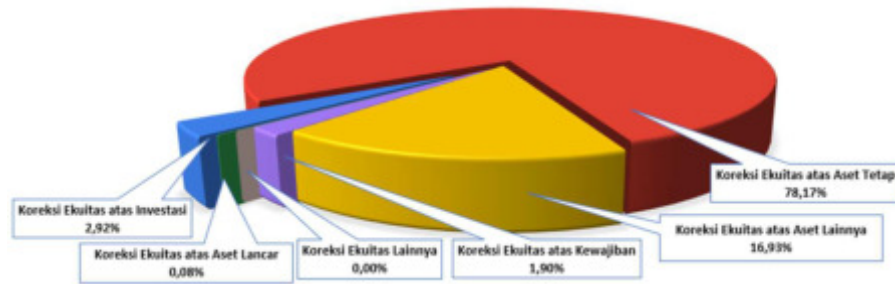
1. Koreksi Ekuitas atas perubahan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah yang disebabkan adanya koreksi nilai Piutang Retribusi Daerah dengan nilai masing-masing yang sama sebesar Rp151.660.000,00;
2. Koreksi Ekuitas atas kurang catat Aset Pasar Sangkan yang telah diterima di Tahun 2017 dengan nilai sebesar Rp5.051.426.973,00;
3. Koreksi Ekuitas atas kurang catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang telah diterima sebelum Tahun 2021 di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan nilai sebesar Rp3.076.887.073,00;



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

4. Koreksi Ekuitas atas masih tercatatnya Aset Lainnya di Dinas PUPR dalam Neraca per 31 Desember 2020 yang telah diserahkan, namun belum didukung dengan penerbitan Surat Keputusan Penghapusan dengan nilai sebesar 1.848.249.916,66;
5. Koreksi Ekuitas atas kurang catat Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang telah diterima sebelum Tahun 2021 di RSUD Karangasem dengan nilai sebesar Rp1.449.346.710,00; dan
6. Koreksi Ekuitas atas kelebihan pengakuan Utang Belanja Pegawai di 9 (sembilan SKPD) dalam Neraca per 31 Desember 2020 dengan nilai sebesar Rp227.774.163,65.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Terhadap Kelompok Akun dalam Laporan Neraca Per 31 Desember 2021 digambarkan dalam diagram di bawah ini.



6.2.4 Saldo Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2021 dan 2020.

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Saldo Ekuitas Akhir	1.541.639.811.645,02	1.446.851.883.388,06

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *point* 6.1.3.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

6.3 Penjelasan atas Pos-Pos LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2021 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

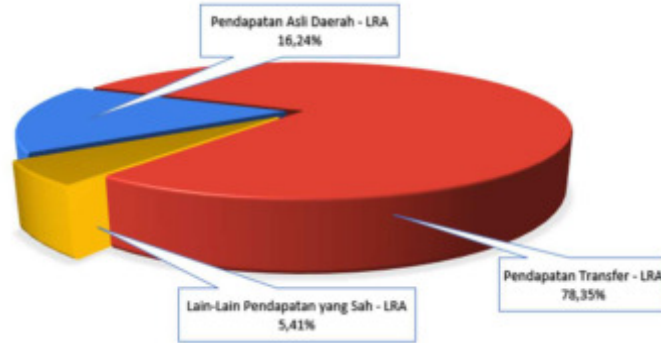
6.3.1 Pendapatan Daerah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah - LRA TA 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah - LRA	219.880.880.649,82	252.691.747.485,16	114,92	219.234.680.191,34
Pendapatan Transfer - LRA	1.271.394.033.216,00	1.218.932.970.246,13	95,87	1.181.370.504.509,03
Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LRA	78.265.053.494,00	84.186.840.123,19	107,57	74.956.687.598,82
Jumlah	1.569.539.967.359,82	1.555.811.557.854,48	99,13	1.475.561.872.299,19

Penjelasan:

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah - LRA TA 2021 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



6.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LRA TA 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	77.092.600.000,00	85.667.480.089,00	111,11	66.506.517.157,75
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	9.402.542.000,00	9.207.856.781,00	97,93	9.350.561.671,00
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	11.012.682.396,00	10.759.415.258,47	97,70	11.968.117.309,66
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA	122.373.056.253,82	147.056.995.356,69	120,17	131.409.484.052,93
Jumlah	219.880.880.649,82	252.691.747.485,16	114,92	219.234.680.191,34

6.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LRA TA 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Hotel - LRA	1.000.000.000,00	1.174.092.427,00	117,41	8.051.666.279,00
Pajak Restoran - LRA	1.500.000.000,00	1.913.140.738,00	127,54	4.718.016.350,00
Pajak Hiburan - LRA	7.000.000,00	7.132.565,00	101,89	53.489.252,00
Pajak Reklame - LRA	483.000.000,00	494.230.700,00	102,33	372.757.800,00
Pajak Penerangan Jalan - LRA	13.000.000.000,00	13.555.934.891,00	104,28	14.338.466.418,00
Pajak Parkir - LRA	2.600.000,00	2.880.000,00	110,77	28.096.500,00
Pajak Air Tanah - LRA	600.000.000,00	622.734.492,00	103,79	812.647.583,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	46.500.000.000,00	51.903.906.750,00	111,62	21.755.835.642,00
PBB P2 - LRA	4.500.000.000,00	5.790.768.710,00	128,68	4.551.563.030,00
BPHTB - LRA	9.500.000.000,00	10.202.658.816,00	107,40	11.823.978.303,75
Jumlah	77.092.600.000,00	85.667.480.089,00	111,11	66.506.517.157,75

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah - LRA di TA 2021 yang diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Realisasi Pajak Hotel diatas target disebabkan adanya optimalisasi perpajakan melalui sosialisasi WP Hotel dan penagihan piutang;
2. Realisasi Pajak Restoran melebihi target yang ditetapkan disebabkan adanya optimalisasi perpajakan melalui sosialisasi WP Restoran dan penagihan piutang;
3. Realisasi Pajak Hiburan melebihi target yang ditetapkan karena adanya optimalisasi perpajakan melalui penagihan piutang pajak;
4. Realisasi Pajak Reklame diatas target yang ditetapkan disebabkan optimalisasi perpajakan melalui pendataan dan pemberitahuan perpanjangan pajak reklame melalui SKPD Pajak Reklame kepada WP Reklame;
5. Realisasi Pajak Penerangan Jalan melebihi target yang ditetapkan disebabkan adanya optimalisasi perpajakan melalui kegiatan rekonsiliasi dengan WP Pajak Penerangan Jalan (PT PLN Persero);
6. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan melebihi target yang ditetapkan disebabkan adanya optimalisasi perpajakan bersama Tim Pengawasan Terpadu Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan melalui monitoring dan pengawasan (SK Bupati Karangasem Nomor 266/HK/2021) melakukan sosialisasi Perbup Kabupaten Karangasem Nomor 39 Tahun 2021 kepada masyarakat dan penagihan piutang pajak;
7. Realisasi Pajak Parkir diatas target yang ditetapkan karena optimalisasi perpajakan melalui kegiatan penagihan piutang pajak;
8. Realisasi Pajak Air Tanah melampaui target karena adanya optimalisasi perpajakan melalui kegiatan pendataan, pemberitahuan SKPD Pajak Air Tanah dan penagihan piutang pajak;
9. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dibawah target yang ditetapkan disebabkan karena adanya sosialisasi ke seluruh desa baik melalui brosur maupun sosialisasi secara langsung ketempat umum seperti pasar-pasar Se-Kecamatan Karangasem yang bekerjasama dengan Dinas Kominfo serta pengumuman melalui media elektronik terkait dgn Perbup Kabupaten Karangasem Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda PBB-P2; dan
10. Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan melebihi target yang ditetapkan disebabkan karena meningkatnya antusias masyarakat dalam memproses peralihan hak milik sehingga meningkatkan pembayaran BPHTB.

6.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LRA TA 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum - LRA				
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	1.500.000.000,00	1.825.628.400,00	121,71	2.208.821.550,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	230.140.000,00	251.360.000,00	109,22	322.140.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	194.000.000,00	209.892.000,00	108,19	155.041.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	3.527.495.000,00	3.592.466.000,00	101,84	2.830.648.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	459.000.000,00	569.622.150,00	124,10	314.778.600,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	0,00	0,00	-	0,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	38.000.000,00	41.385.000,00	108,91	48.440.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	0,00	0,00	-	0,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	700.000.000,00	685.593.751,00	97,94	745.397.481,00
Retribusi Jasa Usaha - LRA				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	216.051.000,00	220.696.000,00	102,15	226.638.000,00
Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	0,00	0,00	-	0,00
Retribusi Terminal - LRA	120.000.000,00	124.974.000,00	104,15	129.092.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	299.000.000,00	229.953.000,00	76,91	194.894.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	30.000.000,00	30.328.000,00	101,09	30.749.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LRA	125.000.000,00	109.155.000,00	87,32	493.845.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	12.000.000,00	28.620.000,00	238,50	12.000.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu- LRA				
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	1.500.000.000,00	814.253.580,00	54,28	1.032.431.040,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	50.000.000,00	58.500.000,00	117,00	40.000.000,00
Retribusi Izin Trayek - LRA	5.000.000,00	4.307.500,00	86,15	4.060.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)- LRA	396.856.000,00	411.122.400,00	103,59	561.586.000,00
Jumlah	9.402.542.000,00	9.207.856.781,00	97,93	9.350.561.671,00

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah - LRA di TA 2021 diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum
 - a. Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan lebih tinggi dari yang dianggarkan disebabkan oleh meningkatnya jumlah kunjungan pasien di puskesmas;
 - b. Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor lebih tinggi dari jumlah yang dianggarkan disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan yang diuji;
 - c. Realisasi Retribusi pelayanan pasar lebih tinggi dari target disebabkan pada Tahun 2021 sudah tidak diberlakukan lagi pembatasan sosial secara ketat, sehingga pasar beroperasi secara normal, namun target ditetapkan memperhitungkan kondisi saat pandemi Covid-19.
 - d. Penerimaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan karena penggunaan jasa penyedotan kakus oleh masyarakat meningkat; dan
 - e. Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan karena wajib retribusi mengajukan surat permohonan penundaan pembayaran retribusi Tahun 2021, wajib retribusi mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok retribusi, wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya agar diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Retribusi Jasa Usaha
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasinya lebih tinggi dari jumlah anggaran yang ditetapkan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah lebih tinggi dari target yang ditetapkan karena adanya pembayaran sewa tahun sebelumnya serta realisasi sewa rumah dinas pada SKPD yang bukan penghasil PAD, sehingga tidak dianggarkan;



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

- b. Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan realisasinya lebih tinggi dari yang dianggarkan disebabkan adanya kegiatan pemotongan oleh kelompok masyarakat yang belum diprediksi sebelumnya;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir lebih rendah dari jumlah anggaran yang ditetapkan yang disebabkan karena belum pulihnya kunjungan wisatawan akibat pandemi Covid-19 terutama tempat khusus parkir yang berada di objek-objek pariwisata; dan
 - d. Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga realisasinya lebih rendah dari yang dianggarkan karena adanya PPKM sehingga mengakibatkan terbatasnya kunjungan wisatawan ke DTW yang dipungut retribusi.
3. Retribusi Perijinan Tertentu
- a. Penerimaan Retribusi IMB dibawah anggaran yang ditetapkan disebabkan karena sangat bergantung dari adanya permohonan IMB atau kegiatan investasi dan pembangunan oleh masyarakat serta berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No:011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perijinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Huruf B angka 2 point b yang menyatakan layanan yang diberikan sebelum ditetapkannya peraturan daerah mengenai Retribusi PBG tidak disertai pemungutan retribusi atau gratis, mengingat peraturan daerah mengenai Retribusi PBG tidak dapat berlaku surut sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014. Karena sampai akhir Tahun 2021 Peraturan Daerah tentang Retribusi PBG belum ditetapkan dan dengan dikeluarkannya Surat Edaran di atas, maka pemungutan Retribusi PBG belum bisa dilaksanakan;
 - b. Penerimaan retribusi izin tempat penjualan minuman Beralkohol realisasinya lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan;
 - c. Pendapatan Retribusi Ijin Trayek lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan karena ada beberapa kendaraan pedesaan tidak beroperasi akibat dampak sepi penumpang yang mengakibatkan penghasilannya menurun sehingga menunda untuk mengurus perpanjangan ijin trayek; dan
 - d. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan.
 - e. Realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2021 secara total lebih rendah dari Tahun 2020 disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai bencana nonalam dan adanya PPKM.

6.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA TA 2021 dan 2020 yang merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	11.012.682.396,00	10.759.415.258,47	97,70	11.968.117.309,66

Penjelasan:

Rincian penerimaan atas Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA TA 2021 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PT BPD Bali	10.196.835.259,00	10.190.350.393,18	99,94	11.079.841.114,32
PT Jamkrida Bali Mandara	0,00	13.345.072,00	-	8.837.974,00
Perumda Tirta Tohlangkir	815.847.137,00	555.719.793,29	68,12	879.438.221,34
Jumlah	11.012.682.396,00	10.759.415.258,47	97,70	11.968.117.309,66



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

6.3.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA TA 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA	20.000.000,00	19.090.000,00	95,45	0,00
Penerimaan Jasa Giro - LRA	3.700.000.000,00	2.950.057.395,39	79,73	3.678.355.590,36
Pendapatan Bunga - LRA	0,00	1.400.000.000,00	-	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	0,00	296.752.739,11	-	768.404.679,82
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LRA	10.000.000,00	2.070.000,00	20,70	6.372.320,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	1.600.000,00	183.524.604,53	11.470,29	10.515.978,00
Pendapatan Denda Pajak - LRA	349.247.755,00	981.252.219,00	280,96	325.792.412,00
Pendapatan Denda Retribusi - LRA	0,00	0,00	-	1.705.509,00
Pendapatan dari Pengembalian - LRA	60.253.583,00	17.452.378,00	28,96	162.662.060,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	0,00	0,00	-	0,00
Pendapatan BLUD - LRA	87.535.438.181,82	119.229.486.434,66	136,21	97.297.787.284,37
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LRA	30.696.516.734,00	21.965.409.586,00	71,56	26.467.786.875,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LRA	0,00	0,00	-	2.661.758.426,38
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LRA	0,00	11.900.000,00	-	0,00
Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	0,00	-	28.342.918,00
Jumlah	122.373.056.253,82	147.056.995.356,69	120,17	131.409.484.052,93

Penjelasan:

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah lebih tinggi dari anggaran yang ditetapkan utamanya disebabkan:

1. Adanya realisasi pendapatan bunga atas deposito dari aktivitas manajemen kas pemerintah daerah selama TA 2021;
2. Adanya penerimaan pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
3. Kesadaran Wajib Pajak meningkat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran pajak untuk jenis pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, air tanah, parkir, MBLB dan PBB-P2; dan
4. Pendapatan BLUD yang lebih tinggi dari jumlah yang dianggarkan disebabkan tergantung jumlah pasien yang berobat di mana pada Tahun 2021, pandemi Covid-19 masih terjadi secara nasional di mana RSUD Kabupaten Karangasem di tetapkan sebagai salah satu RS Rujukan di Kabupaten Karangasem untuk melayani perawatan pasien Covid-19, yang pada bulan Juli s.d. September 2021 (gelombang Covid-19 – Varian Delta) dengan biaya (klaim) Rp7.500.000,00 per pasien per hari, dibukanya ICU Covid-19 dengan 12 tempat tidur dengan fasilitas yang terlengkapi di awal Tahun 2021 di mana klaim pasien insentif (ICU Covid-19) sangat tinggi dengan biaya Rp14.000.000,00 s.d Rp25.000.000,00 per pasien per hari, serta *Bed Occupancy Ratio* (BOR) untuk ICU Covid-19 periode Juli s.d September 2021 mendekati 100%.

6.3.1.2 Pendapatan Transfer - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer - LRA TA 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.119.639.083.000,00	1.097.820.639.495,00	98,05	1.039.076.219.402,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	151.754.950.216,00	121.112.330.751,13	79,81	142.294.285.107,03
Jumlah	1.271.394.033.216,00	1.218.932.970.246,13	95,87	1.181.370.504.509,03

6.3.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA TA 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Perimbangan - LRA	976.023.282.000,00	954.204.838.495,00	97,76	918.022.076.402,00
Dana Insentif Daerah (DID) - LRA	58.326.553.000,00	58.326.553.000,00	100,00	39.250.487.000,00
Dana Desa - LRA	85.289.248.000,00	85.289.248.000,00	100,00	81.803.656.000,00
Jumlah	1.119.639.083.000,00	1.097.820.639.495,00	98,05	1.039.076.219.402,00

Penjelasan:

- Rincian Saldo Dana Perimbangan - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Bagi Hasil - LRA	18.319.365.000,00	27.677.029.795,00	151,08	22.582.034.404,00
Dana Alokasi Umum - LRA	700.663.380.000,00	700.663.380.000,00	100,00	713.291.169.000,00
Dana Alokasi Khusus Fisik - LRA	101.480.151.000,00	82.936.341.064,00	81,73	38.269.064.645,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LRA	155.560.386.000,00	142.928.087.636,00	91,88	143.879.808.353,00
Jumlah	976.023.282.000,00	954.204.838.495,00	97,76	918.022.076.402,00

Penjelasan:

- Rincian Saldo Dana Bagi Hasil - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LRA	2.766.866.000,00	7.827.337.887,00	282,90	3.916.817.224,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 21 - LRA	11.752.288.000,00	16.529.722.320,00	140,65	16.121.356.885,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri - LRA	1.060.298.000,00	1.376.318.274,00	129,80	1.388.524.357,00
Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau - LRA	379.898.000,00	269.151.164,00	70,85	367.059.649,00
Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi - LRA	1.231.696.000,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan - LRA	1.128.319.000,00	1.674.500.150,00	148,41	788.276.289,00
Jumlah	18.319.365.000,00	27.677.029.795,00	151,08	22.582.034.404,00

- Saldo Dana Alokasi Umum - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasinya berbeda dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN TA 2021, di mana Dana Alokasi Umum untuk Pemerintah Kabupaten Karangasem dialokasikan sebesar Rp723.846.259.000,00. Namun sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi yang dikirimkan oleh Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Dana Transfer Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan RI dana yang ditransfer sejumlah Rp700.663.380.000,00 sama dengan yang diterima di Rekening Kas Daerah Kabupaten Karangasem;
- Rincian Saldo Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2020 diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Bidang Pendidikan - LRA	15.921.018.000,00	11.644.230.993,00	73,14	8.275.399.580,00
DAK Bidang Pendidikan SKB - LRA	0,00	0,00	-	278.002.500,00
DAK Bidang Pendidikan PAUD - LRA	0,00	0,00	-	748.065.000,00
DAK Bidang Kesehatan dan KB - LRA	14.912.949.000,00	20.894.053.039,00	140,11	20.331.975.565,00
DAK Bidang Pertanian - LRA	20.671.687.000,00	461.858.002,00	2,23	0,00
DAK Bidang Pariwisata - LRA	3.967.498.000,00	2.769.411.960,00	69,80	0,00
DAK Bidang Jalan - LRA	37.698.981.000,00	35.341.717.000,00	93,75	7.140.571.000,00
DAK Bidang Air Minum - LRA	0,00	6.893.040.970,00	-	0,00
DAK Bidang Irigasi - LRA	8.308.018.000,00	4.932.029.100,00	59,36	1.495.051.000,00
Jumlah	101.480.151.000,00	82.936.341.064,00	81,73	38.269.064.645,00

- d. Rincian Saldo Dana Alokasi Khusus Non-Fisik - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tunjangan Profesi Guru - LRA	131.344.366.000,00	131.344.366.000,00	100,00	122.992.251.000,00
Tambahan Penghasilan Guru - LRA	1.392.000.000,00	1.563.500.000,00	112,32	1.123.500.000,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD - LRA	3.689.400.000,00	3.245.977.879,00	87,98	3.269.979.867,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan - LRA	1.675.000.000,00	1.638.332.916,00	97,81	1.217.229.530,00
Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana - LRA	13.608.720.000,00	2.825.451.751,00	20,76	12.873.940.336,00
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM - LRA	390.304.000,00	262.730.570,00	67,31	543.249.940,00
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan - LRA	1.512.205.000,00	1.240.371.470,00	82,02	1.597.547.880,00
Dana Pelayanan Kepariwisata - LRA	962.578.000,00	807.357.050,00	83,87	262.109.800,00
Dana Bantuan BLPS - LRA	985.813.000,00	0,00	-	0,00
Jumlah	155.560.386.000,00	142.928.087.636,00	91,88	143.879.808.353,00

- Dana Insentif Daerah (DID) - LRA yang diterima pada TA 2021 sebesar Rp58.326.553.000,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN TA 2021 pada Lampiran V.13 tentang Rincian Alokasi Dana Insentif Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2021; dan
- Dana Desa - LRA yang diterima pada TA 2021 sebesar Rp85.289.248.000,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN TA 2021 pada Lampiran V.15 tentang Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota TA 2021.

6.3.1.2.2 Transfer Antar Daerah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA TA 2021 dan 2020 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Bagi Hasil - LRA	116.917.039.826,00	88.024.000.926,13	75,29	108.747.242.652,03
Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan - LRA	34.837.910.390,00	33.088.329.825,00	94,98	33.547.042.455,00
Jumlah	151.754.950.216,00	121.112.330.751,13	79,81	142.294.285.107,03

Penjelasan:

- Rincian Pendapatan Transfer Bagi Hasil - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2020 diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	43.389.725.333,00	38.770.337.101,70	89,35	43.249.782.521,60
Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	23.738.960.323,00	12.150.004.486,12	51,18	20.271.506.900,32
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	31.395.868.171,00	20.652.308.200,48	65,78	24.279.420.310,72
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LRA	169.129.372,00	141.592.694,22	83,72	169.547.080,39
Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LRA	18.223.356.627,00	16.309.758.443,61	89,50	20.776.985.839,00
Jumlah	116.917.039.826,00	88.024.000.926,13	75,29	108.747.242.652,03

2. Rincian Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali - LRA	34.837.910.390,00	33.088.329.825,00	94,98	33.047.042.455,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota - LRA	0,00	0,00	-	500.000.000,00
Jumlah	34.837.910.390,00	33.088.329.825,00	94,98	33.547.042.455,00

6.3.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LRA TA 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah - LRA	0,00	2.673.116.227,38	-	74.956.618.979,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA	78.265.053.494,00	81.513.723.895,81	104,15	68.619,82
Jumlah	78.265.053.494,00	84.186.840.123,19	107,57	74.956.687.598,82

6.3.1.3.1 Pendapatan Hibah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hibah TA 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LRA	0,00	2.673.000.000,00	-	11.637.698.979,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis - LRA	0,00	116.227,38	-	0,00
Pendapatan Hibah Dana BOS - LRA	0,00	0,00	-	63.318.920.000,00
Jumlah	0,00	2.673.116.227,38	-	74.956.618.979,00

Penjelasan:

1. Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2021 menerima hibah dari Pemerintah Pusat sebesar 2.673.000.000,00 berdasarkan perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2021 Nomor PHD/103/MK.7/DTK.03/AMK/2021 Tanggal 4 Mei 2021;
2. Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2021 menerima sumbangan dari masyarakat secara tunai sebesar Rp80.227,38 dan kelebihan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dari PT Sanjiwani Karya Mandiri sebesar Rp36.000,00 yang diakui sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

3. Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2021 mencatat penerimaan Pendapatan Hibah Dana BOS dalam akun Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA sebagaimana dijelaskan pada *Poin 6.3.1.3.2* di bawah.

6.3.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA TA 2021 dan 2020 yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah Dana BOS - LRA	78.265.053.494,00	73.630.363.100,00	94,08	0,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah - LRA	0,00	7.883.360.795,81	-	0,00
Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	0,00	-	68.619,82
Jumlah	78.265.053.494,00	81.513.723.895,81	104,15	68.619,82

Penjelasan:

1. Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2020 mencatat penerimaan Pendapatan Hibah Dana BOS dalam akun Pendapatan Hibah - LRA sebagaimana dijelaskan pada *Poin 6.3.1.3.1* di atas;
2. Pendapatan atas Pengembalian Hibah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem di TA 2021 merupakan pengembalian atas hibah yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Karangasem kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dana hibah pilkada ke KPU sebesar Rp4.598.656.184,00;
 - b. Dana hibah pilkada ke Bawaslu sebesar Rp1.631.071.107,00;
 - c. Dana hibah pilkada ke Kepolisian sebesar Rp1.650.432.217,00;
 - d. Dana hibah parpol dari Perindo sebesar Rp702.000,00;
 - e. Dana hibah ke Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) sebesar Rp1.000.000,00;
 - f. Dana hibah ke Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) sebesar Rp1.497.311,29; dan
 - g. Dana Hibah PEN yang diterima oleh pelaku industri pariwisata sebesar Rp1.976,52.

6.3.2 Belanja Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah TA 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	1.309.437.843.875,20	1.210.433.001.300,69	92,44	1.175.320.214.966,18
Belanja Modal	168.258.733.691,80	143.668.862.436,15	85,39	81.578.987.875,56
Belanja Tak Terduga	10.274.793.775,00	2.119.880.311,00	20,63	19.630.352.099,09
Jumlah	1.487.971.371.342,00	1.356.221.744.047,84	91,15	1.276.529.554.940,83

6.3.2.1 Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi - LRA TA 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	763.329.296.062,03	744.032.552.582,16	97,47	732.793.781.667,97
Belanja Barang dan Jasa	518.029.808.135,17	442.983.592.013,70	85,51	376.100.346.825,58
Belanja Bunga	0,00	0,00	-	2.785.820,91

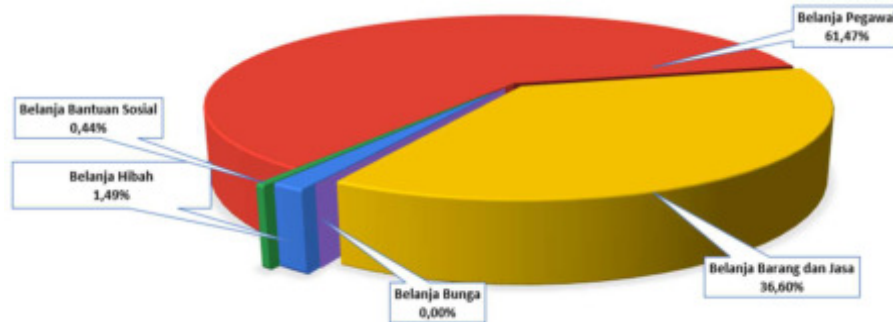


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah	21.942.839.678,00	18.086.736.704,83	82,43	65.381.039.651,72
Belanja Bantuan Sosial	6.135.900.000,00	5.330.120.000,00	86,87	1.042.261.000,00
Jumlah	1.309.437.843.875,20	1.210.433.001.300,69	92,44	1.175.320.214.966,18

Penjelasan:

- Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2021 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



- Rincian saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada *lampiran 21*.

6.3.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	437.359.942.252,15	426.075.954.929,00	97,42	431.708.875.697,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	108.493.000.236,88	103.157.887.185,00	95,08	205.489.580.388,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	159.563.998.105,00	152.393.858.547,23	95,51	5.176.846.504,97
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28.943.527.094,00	28.492.705.759,00	98,44	21.247.268.946,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	785.728.374,00	571.114.871,93	72,69	145.715.232,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	787.000.000,00	92,37	3.983.100.000,00
Belanja Pegawai BLUD	27.331.100.000,00	32.554.031.290,00	119,11	0,00
Belanja Honorarium PNS	0,00	0,00	-	1.599.560.000,00
Belanja Honorarium Non-PNS	0,00	0,00	-	4.138.431.000,00
Belanja Honorarium Dewan Pengawas BLUD	0,00	0,00	-	94.018.800,00
Belanja Uang Transport	0,00	0,00	-	1.829.550.000,00
Belanja Upah Non-ASN	0,00	0,00	-	57.380.835.100,00
Jumlah	763.329.296.062,03	744.032.552.582,16	97,47	732.793.781.667,97

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2020 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada *lampiran 22*.

6.3.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	84.993.680.376,43	60.183.032.379,00	70,81	99.000.276.285,22
Belanja Jasa	249.655.874.529,22	222.204.909.475,50	89,00	218.031.587.995,94
Belanja Pemeliharaan	30.573.808.175,52	25.192.135.255,74	82,40	27.925.420.347,42
Belana Perjalanan Dinas	18.410.307.801,00	13.631.699.775,00	74,04	24.897.501.607,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.724.741.920,00	9.807.170.000,00	62,37	3.288.880.590,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	56.730.611.193,00	53.570.145.927,46	94,43	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	61.940.784.140,00	58.394.499.201,00	94,27	0,00
Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	-	218.269.200,00
Belanja Lainnya	0,00	0,00	-	2.738.410.800,00
Jumlah	518.029.808.135,17	442.983.592.013,70	85,51	376.100.346.825,58

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2020 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran 23.

6.3.2.1.3 Belanja Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bunga TA 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Belanja Bunga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	2.785.820,91

6.3.2.1.4 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah TA 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.397.432.000,00	2.191.833.260,00	91,42	13.199.816.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	18.742.614.830,00	15.092.110.596,83	80,52	52.181.223.651,72
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	802.792.848,00	802.792.848,00	100,00	0,00
Jumlah	21.942.839.678,00	18.086.736.704,83	82,43	65.381.039.651,72

Penjelasan:

- Hibah Kepada Pemerintah Pusat yaitu bantuan Hibah kepada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Polres Karangasem TA 2021 sebesar Rp2.191.833.260,00;
- Hibah kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia di Tahun 2021 terdiri dari:

Uraian	Nilai
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	179.592.750,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.049.300.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	9.863.217.846,83
Jumlah	15.092.110.596,83



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

3. Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 137/HK/2021 tanggal 5 April 2021 tentang Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memperoleh Suara di DPRD Kabupaten Karangasem TA 2021 dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut:

Nama Partai Politik	Total Nilai Bantuan
Partai Hati Nurani Rakyat	55.748.862,00
Partai Golongan Karya	166.631.868,00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	219.174.384,00
Partai Demokrat	57.696.912,00
Partai Keadilan Sejahtera	18.311.670,00
Partai Nasional Demokrat	156.392.340,00
Partai Gerakan Indonesia Raya	93.650.700,00
Partai Persatuan Indonesia	35.186.112,00
Jumlah	802.792.848,00

4. Rincian belanja hibah pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada *lampiran 24*.

6.3.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	645.900.000,00	50.120.000,00	7,76	314.761.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	5.490.000.000,00	5.280.000.000,00	96,17	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	-	727.500.000,00
Jumlah	6.135.900.000,00	5.330.120.000,00	86,87	1.042.261.000,00

Penjelasan:

1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dialokasikan anggaran dan realisasinya di Dinas Sosial; dan
2. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem berupa bantuan bedah rumah sebanyak 176 rumah yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan nilai bantuan tiap rumahnya sebesar Rp30.000.000,00 dialokasikan anggaran dan realisasinya di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

6.3.2.2 Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Modal TA 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	58.907.508.813,80	48.585.490.957,63	82,48	34.961.049.723,07
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	20.012.143.108,00	15.612.356.116,52	78,01	19.105.183.205,49
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	82.807.044.921,00	75.187.840.992,00	90,80	20.465.919.377,00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	6.532.036.849,00	4.283.174.370,00	65,57	7.046.835.570,00
Jumlah	168.258.733.691,80	143.668.862.436,15	85,39	81.578.987.875,56

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada *lampiran 25*.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

6.3.2.2.1 Belanja Modal - Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Modal - Peralatan dan Mesin TA 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	304.250.000,00	296.555.050,00	97,47	212.146.101,00
Belanja Modal Alat Angkutan	3.630.884.681,00	1.921.992.318,00	52,93	822.630.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.343.660.000,00	656.466.298,00	48,86	900.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	-	667.142.044,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	27.029.459.728,00	17.175.054.651,00	63,54	13.169.547.623,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	517.792.490,00	1.095.253.320,00	211,52	1.056.923.800,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	19.394.526.194,80	14.550.757.921,00	75,03	9.189.066.555,17
Belanja Modal Alat Laboratorium	361.400.000,00	618.582.000,00	171,16	1.861.333.898,90
Belanja Modal Komputer	5.665.535.720,00	11.640.911.599,63	205,47	7.274.284.261,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	300.000.000,00	260.000.000,00	86,67	0,00
Belanja Modal Alat Peraga	100.000.000,00	79.111.500,00	79,11	631.834.440,00
Belanja Modal Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	-	75.241.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	200.000.000,00	206.263.600,00	103,13	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	60.000.000,00	84.542.700,00	140,90	0,00
Jumlah	58.907.508.813,80	48.585.490.957,63	82,48	34.961.049.723,07

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran 26.

6.3.2.2.2 Belanja Modal - Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Modal - Gedung dan Bangunan TA 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	18.662.143.108,00	14.485.759.090,17	77,62	18.732.981.205,49
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.350.000.000,00	1.126.597.026,35	83,45	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	-	372.202.000,00
Jumlah	20.012.143.108,00	15.612.356.116,52	78,01	19.105.183.205,49

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran 27.

6.3.2.2.3 Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	63.304.670.000,00	59.198.917.612,00	93,51	15.737.469.730,00
Belanja Modal Bangunan Air	18.083.374.921,00	14.677.567.780,00	81,17	3.760.355.000,00
Belanja Modal Instalasi	957.000.000,00	858.332.000,00	89,69	442.990.447,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jaringan	462.000.000,00	453.023.600,00	98,06	525.104.200,00
Jumlah	82.807.044.921,00	75.187.840.992,00	90,80	20.465.919.377,00

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada *lampiran 28*.

6.3.2.2.4 Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Modal - Aset Tetap Lainnya TA 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	445.552.870,00	-	1.561.065.610,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	20.090.000,00	112.096.500,00	557,97	759.918.500,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	-	70.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	6.220.619.249,00	3.583.822.000,00	57,61	4.655.851.460,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	291.327.600,00	141.703.000,00	48,64	0,00
Jumlah	6.532.036.849,00	4.283.174.370,00	65,57	7.046.835.570,00

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada *lampiran 29*.

6.3.2.3 Belanja Tak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Modal - Aset Lainnya TA 2021 dan 2020 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2020 yang merupakan Belanja Tak Terduga atas Pengembalian Pembayaran Pajak Tahun Sebelumnya serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tak Terduga	10.274.793.775,00	2.119.880.311,00	20,63	19.630.352.099,09

Penjelasan:

- Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2021 dan TA 2020. Realisasi Belanja Tak Terduga untuk TA 2021 sebesar Rp2.119.880.311,00 dibandingkan anggarannya sebesar Rp10.274.793.775,00 menunjukkan realisasi Belanja Tak Terduga pada Tahun 2021 di bawah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.154.913.464,00 atau 20,63%; dan
- Anggaran dana Belanja Tak Terduga pada TA 2021, penggunaannya direncanakan dibagi menjadi dua yaitu untuk pengeluaran penanganan Covid-19 sebesar Rp8.600.000.000,00 dan pengeluaran non penanganan Covid-19 sebesar Rp1.674.793.775,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pengeluaran	Bidang	Anggaran	Realisasi	Sisa
Penanganan Covid-19	Kesehatan	6.500.000.000,00	1.239.965.800,00	5.260.034.200,00
	Jaring Pengaman Sosial	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
	Penanganan Dampak Ekonomi	1.000.000.000,00	525.140.150,00	474.859.850,00
	Belanja Sosial Tidak Terencana	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
Subtotal Jumlah Penanganan Covid-19		8.600.000.000,00	1.765.105.950,00	6.834.894.050,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Pengeluaran	Bidang	Anggaran	Realisasi	Sisa
Non Penanganan Covid-19	Pengembalian Pendapatan	1.674.793.775,00	354.774.361,00	1.320.019.414,00
	Hibah			
Subtotal Jumlah Non-Penanganan Covid-19		1.674.793.775,00	354.774.361,00	1.320.019.414,00
Jumlah Keseluruhan		10.274.793.775,00	2.119.880.311,00	8.154.913.464,00

6.3.3.1 Transfer Daerah - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Daerah - LRA TA 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Transfer Daerah - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer Bagi Hasil Pendapatan - LRA	12.177.319.998,00	12.055.086.912,23	99,00	11.558.024.859,79
Transfer Bantuan Keuangan - LRA	179.299.612.500,00	179.254.619.838,35	99,97	176.547.740.848,00
Jumlah	191.476.932.498,00	191.309.706.750,58	99,91	188.105.765.707,79

6.3.3.1.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bagi Hasil Pendapatan - LRA TA 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Transfer Bagi Hasil Pendapatan - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa - LRA	10.816.925.541,00	10.816.925.541,00	100,00	10.108.324.974,14
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa - LRA	1.360.394.457,00	1.238.161.371,23	91,01	1.449.699.885,65
Jumlah	12.177.319.998,00	12.055.086.912,23	99,00	11.558.024.859,79

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam menyalurkan dana Transfer Bagi Hasil Pendapatan - LRA didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Setiap Desa TA 2021. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa disalurkan kepada 75 desa. Rincian desa penerima Transfer Bagi Hasil Pendapatan dapat dilihat pada lampiran 30 dan 31.

6.3.3.1.2 Transfer Bantuan Keuangan - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bantuan Keuangan - LRA TA 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Transfer Bantuan Keuangan - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - LRA	157.187.522.500,00	157.187.522.500,00	100,00	155.467.948.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa - LRA	22.112.090.000,00	22.067.097.338,35	99,80	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa Adat - LRA	0,00	0,00	-	17.703.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa untuk Subak dan Subak Abian - LRA	0,00	0,00	-	2.424.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan untuk Subak dan Subak Abian Kecamatan Karangasem - LRA	0,00	0,00	-	150.000.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik - LRA	0,00	0,00	-	802.792.848,00
Jumlah	179.299.612.500,00	179.254.619.838,35	99,97	176.547.740.848,00

Penjelasan:

1. Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam menyalurkan dana Transfer Bantuan Keuangan - LRA didasarkan pada:
 - a. Perbup Karangasem Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa TA 2021;
 - b. Perbup Karangasem Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa TA 2021;
 - c. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 27/HK/2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Sebudi Kecamatan Selat untuk Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Karangasem TA 2021;
 - d. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 89/HK/2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Besakih Dalam Rangka Pembangunan Pura Kiduling Kreteg Desa Besakih Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem TA 2021;
 - e. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 90/HK/2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Sebudi Dalam Rangka Pembangunan Pura Kahyangan Jagat Taman Sari Besakih Pasar Agung Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem TA 2021; dan
 - f. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 415/HK/2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk Desa Adat, Banjar Adat serta Subak dan Subak Abian di Kabupaten Karangasem TA 2021.
2. Rincian desa penerima Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus serta Ringkasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dapat dilihat pada *lampiran 32 s.d. 36*.

6.3.4 Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan Daerah TA 2021 dan 2020 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	113.908.336.480,00	113.908.336.480,88	100,00	103.047.221.288,53
Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	65.436.458,22
Jumlah	109.908.336.480,00	109.908.336.480,88	100,00	102.981.784.830,31

6.3.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan TA 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	113.908.336.480,00	113.908.336.480,88	100,00	103.044.007.652,53
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	-	3.213.636,00
Jumlah	113.908.336.480,00	113.908.336.480,88	100,00	103.047.221.288,53

6.3.4.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2021 dan 2020 yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pelampauan Penerimaan PAD	6.114.518.447,00	6.114.518.447,88	100,00	12.215.706.644,53
Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	-	5.510.897.584,01
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	107.793.818.033,00	107.793.818.033,00	100,00	79.426.772.146,63
Koreksi SILPA	0,00	0,00	-	74.695.298,00
Sisa Belanja DAK	0,00	0,00	-	5.764.304.292,00
Sisa Belanja Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	-	21.781.880,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	-	14.127.082,36
Penerimaan Piutang	0,00	0,00	-	15.722.725,00
Jumlah	113.908.336.480,00	113.908.336.480,88	100,00	103.044.007.652,53

6.3.4.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah TA 2021 dan 2020 yang merupakan saldo Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00	-	3.213.636,00

6.3.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan TA 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	-	65.436.458,22
Jumlah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	65.436.458,22

6.3.4.2.1 Penyertaan Modal Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penyertaan Modal Daerah TA 2021 dan 2020 yang merupakan saldo Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021 dan persentase capaian realisasinya serta yang direalisasikan pada TA 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):				
➤ PT. BPD Bali	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	0,00
➤ PT. Jamkrida Bali Mandara	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00
➤ Perumda Tirta Tohlangkir	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	0,00

6.3.4.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2021 dan 2020 yang merupakan saldo Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2021, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	-	65.436.458,22

6.3.5 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) TA 2021 dan 2020 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
➤ Pendapatan Daerah - LRA				
✓ Pendapatan Asli Daerah - LRA	219.880.880.649,82	252.691.747.485,16	114,92	219.234.680.191,34
✓ Pendapatan Transfer - LRA	1.271.394.033.216,00	1.218.932.970.246,13	95,87	1.181.370.504.509,03
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LRA	78.265.053.494,00	84.186.840.123,19	107,57	74.956.687.598,82
➤ Belanja Daerah				
✓ Belanja Operasi	1.309.437.843.875,20	1.210.433.001.300,69	92,44	1.175.320.214.966,18
✓ Belanja Modal	168.258.733.691,80	143.668.862.436,15	85,39	81.578.987.875,56
✓ Belanja Tak Terduga	10.274.793.775,00	2.119.880.311,00	20,63	19.630.352.099,09
➤ Transfer Daerah				
✓ Transfer Bagi Hasil Pendapatan	12.177.319.998,00	12.055.086.912,23	99,00	11.558.024.859,79
✓ Transfer Bantuan Keuangan	179.299.612.500,00	179.254.619.838,35	99,97	176.547.740.848,00
➤ Pembiayaan Daerah				
✓ Penerimaan Pembiayaan	113.908.336.480,00	113.908.336.480,88	100,00	103.047.221.288,53
✓ Pengeluaran Pembiayaan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	65.436.458,22
Jumlah	(0,18)	118.188.443.536,94	-	113.908.336.480,88

Penjelasan:

- Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2021 memiliki SiLPA sebesar Rp118.188.443.536,94 dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
➤ Dana SiLPA Terikat	
✓ Kas di BLUD	31.327.854.583,33
✓ Kas Dana BOS	2.525.986.369,11
✓ Kas Dana Kapitasi pada FKTP	4.248.978.350,31
✓ DID Reguler	7.033.281.300,00
✓ Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	185.645.940,00
✓ DAK Fisik yang terdiri dari:	
• DAK Bidang Pendidikan	125.714.543,00
• DAK Bidang Pendidikan SKB	
• DAK Bidang Pendidikan PAUD	20.607.791,00
• DAK Bidang Kesehatan dan KB	263.317.459,00
• DAK Bidang Pertanian	3,00
• DAK Bidang Air Minum	9.833.370,00
• DAK Bidang Irigasi	629.900,00
• DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	139.220.366,00
✓ DAK Non-Fisik yang terdiri dari:	
• Dana Tunjangan Profesi Guru	3.397.454.260,00
• Dana Tunjangan Penghasilan Guru	246.500.000,00
• Dana Bantuan Operasional PAUD	657.648.351,00
• Dana Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan	307.599.833,00
• Dana Bantuan Operasional Kesehatan	3.012.189.896,00
• Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	721.398.150,00
• Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	392.250.800,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Nilai
• Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	40.713.750,00
• Dana Pelayanan Kepariwisata	206.650.460,00
• Dana Fasilitas Penanaman Modal	165.013.150,00
• Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	24.800.400,00
✓ Insentif Pajak Daerah	1.618.147.250,00
✓ Insentif Retribusi Daerah	2.426.670.579,00
✓ Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah	1.113.808.318,00
✓ Kurang Bayar Bagi Hasil Retribusi Daerah	94.305.247,00
✓ BKK PHR Kabupaten Badung	5.929.510.231,00
✓ Tagihan Pelayanan Kesehatan Masyarakat - BPBD	663.846.501,00
➤ Dana SiLPA Non-Terikat	
✓ Pelampauan PAD	9.812.285.730,50
✓ Efisiensi Belanja Pegawai	21.945.735.427,87
✓ Efisiensi Belanja Hibah	3.856.102.973,17
✓ Efisiensi Belanja Bantuan Sosial	805.780.000,00
✓ Efisiensi Belanja Transfer	167.225.747,42
✓ Efisiensi Belanja Tak Terduga	8.154.913.464,00
✓ Lain-Lain	6.546.823.043,04
Jumlah	118.188.443.536,94

2. Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Kas di Kas Daerah	79.947.618.428,19
Kas di Bendahara Penerimaan	138.005.806,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di BLUD	31.327.854.583,33
Kas Dana BOS	2.525.986.369,11
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	4.248.978.350,31
Jumlah	118.188.443.536,94

3. Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LAK pada *Poin 6.5.8* dan juga telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL pada *Poin 6.6.3* dan *Poin 6.6.5*.

6.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 dan 2020 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

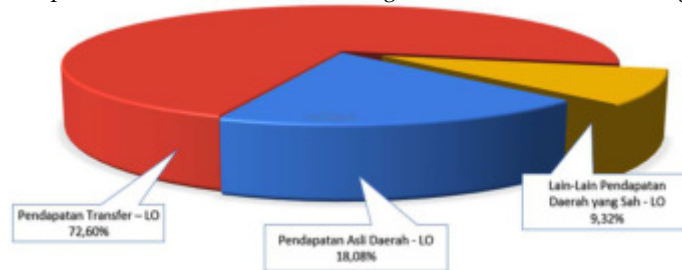
6.4.1 Pendapatan Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2021 dan 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Pendapatan Asli Daerah - LO	285.450.562.639,28	225.912.056.058,62
Pendapatan Transfer - LO	1.146.356.465.658,13	1.096.672.754.955,11
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	147.238.124.229,69	80.867.179.471,07
Jumlah	1.579.045.152.527,10	1.403.451.990.484,80

Penjelasan:

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah - LO Tahun 2021 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



6.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2021 dan 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Pendapatan Pajak Daerah - LO	93.535.849.322,00	75.638.599.210,75
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	9.378.012.271,00	9.082.015.839,00
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	10.942.176.265,59	11.968.117.309,66
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	171.594.524.780,69	129.223.323.699,21
Jumlah	285.450.562.639,28	225.912.056.058,62

6.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2021 dan 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Pajak Hotel - LO	2.602.950.265,00	9.204.651.996,00
Pajak Restoran - LO	2.597.444.884,00	5.272.439.836,00
Pajak Hiburan - LO	8.592.042,00	80.725.079,00
Pajak Reklame - LO	483.103.308,00	456.327.291,00
Pajak Penerangan Jalan - LO	13.555.934.891,00	14.338.466.418,00
Pajak Parkir - LO	2.880.000,00	28.144.500,00
Pajak Air Tanah - LO	731.239.035,00	889.062.864,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	54.195.398.176,00	24.405.069.288,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	9.155.647.905,00	9.139.733.635,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	10.202.658.816,00	11.823.978.303,75
Jumlah	93.535.849.322,00	75.638.599.210,75

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2021 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA TA 2021 sebesar Rp7.868.369.233,00 (Rp93.535.849.322,00 - Rp85.667.480.089,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	7.868.369.233,00
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Piutang Pajak atas ketetapan pajak Tahun 2021 yang belum dibayar WP	10.220.316.438,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari penurunan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame yang telah diterima pembayarannya sebelum TA 2021	118.363.727,00
✓ Koreksi Ekuitas atas lebih saji Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame yang telah diterima pembayarannya sebelum TA 2021	27.162.881,00
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pembayaran saldo Piutang Pajak atas ketetapan pajak sebelum Tahun 2021 yang telah dibayar WP	(2.345.491.120,00)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame yang diterima pembayarannya di TA 2021	(144.858.900,00)
✓ Koreksi Ekuitas atas kurang saji Piutang PBB-P2 yang dilakukan pembayaran terhadap SPPT yang terbit sebelum Tahun 1998	(7.123.793,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	7.868.369.233,00

6.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2021 dan 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	1.825.628.400,00	2.208.821.550,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	251.360.000,00	322.140.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	209.892.000,00	155.041.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	3.592.466.000,00	2.830.648.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	569.622.150,00	314.778.600,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	0,00	0,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	41.385.000,00	48.440.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	0,00	0,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	771.004.008,00	698.369.249,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	227.910.333,00	184.088.733,00
Retribusi Tempat Pelelangan - LO	0,00	0,00
Retribusi Terminal - LO	124.974.000,00	129.092.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	229.953.000,00	194.894.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	30.328.000,00	30.749.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LO	109.155.000,00	490.586.667,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	28.620.000,00	12.000.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	807.709.580,00	856.721.040,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	58.500.000,00	40.000.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Retribusi Izin Trayek - LO	4.307.500,00	4.060.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	495.197.300,00	561.586.000,00
Jumlah	9.378.012.271,00	9.082.015.839,00

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2021 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2021 sebesar Rp170.155.490,00 (Rp9.378.012.271,00 - Rp9.207.856.781,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	170.155.490,00
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi atas SKRD Tahun 2021 yang belum dibayar WR	204.728.837,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari penurunan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang telah diterima pembayarannya sebelum TA 2021	57.564.666,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari penurunan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi IMTA yang telah diterima pembayarannya sebelum TA 2021	284.509.000,00
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pembayaran saldo Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi atas SKRD sebelum Tahun 2021 yang telah dibayar WR	(119.318.580,00)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pembayaran saldo Piutang Retribusi IMB atas SKRD sebelum Tahun 2021 yang telah dibayar WR	(6.544.000,00)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang diterima pembayarannya di TA 2021	(48.250.333,00)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi IMTA yang diterima pembayarannya di TA 2021	(200.434.100,00)
✓ Koreksi Ekuitas kurang saji Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang telah diterima pembayarannya sebelum TA 2021	(2.100.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	170.155.490,00

6.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2021 dan 2020 yaitu saldo Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2021 dan 2020 yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO	10.942.176.265,59	11.968.117.309,66

Penjelasan:

1. Pengakuan Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2021 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA TA 2021 sebesar Rp182.761.007,12 (Rp10.942.176.265,59 - Rp10.759.415.258,47). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	182.761.007,12
Penjelasan Selisih:	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Nilai
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari pengakuan laba usaha PDAM Tahun Buku 2021	738.480.800,41
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pembagian tunai atas laba usaha PDAM Tahun Buku 2020 di Tahun 2021	(555.719.793,29)
Jumlah Penjelasan Selisih	182.761.007,12

2. Pengakuan Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2021 terdiri dari pendapatan operasional diperoleh dari pembagian tunai atas deviden dari BUMD dengan pengakuan investasi menggunakan metode biaya serta pengakuan keuntungan dari BUMD dengan pengakuan investasi menggunakan metode ekuitas tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Metode Pencatatan	Pembagian Untung/Rugi BUMD	Tahun 2020
PT BPD Bali	Biaya	Tunai	10.190.350.393,18
PT Jamkrida Bali Mandara	Biaya	Tunai	13.345.072,00
Perumda Tirta Tohlangkir	Ekuitas	Pengakuan Laba	738.480.800,41
Jumlah			10.942.176.265,59

6.4.1.1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2021 dan 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Penerimaan Jasa Giro - LO	2.950.057.395,39	3.678.355.590,36
Pendapatan Bunga - LO	1.400.000.000,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	296.752.739,11	768.404.679,82
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	2.070.000,00	6.372.320,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	185.124.604,53	10.515.978,00
Pendapatan Denda Pajak - LO	1.123.366.425,00	578.437.123,28
Pendapatan Denda Retribusi - LO	14.577.031,00	1.705.509,00
Pendapatan dari Pengembalian - LO	15.852.378,00	162.662.060,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	0,00	13.400.000,00
Pendapatan BLUD - LO	143.629.414.621,66	94.845.582.219,37
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LO		
Pendapatan Hasil Pengelolaan Investasi Non-Permanen - LO	0,00	2.661.758.426,38
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO	11.900.000,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	0,00	28.342.918,00
Jumlah	171.594.524.780,69	129.223.323.699,21

Penjelasan:

Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2021 ini *lebih besar* dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2021 sebesar Rp24.537.529.424,00 (Rp171.594.524.780,69 - Rp147.056.995.356,69). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	24.537.529.424,00
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Piutang Denda Pajak atas ketetapan pajak Tahun 2021 yang belum dibayar WP	157.270.814,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Nilai
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Piutang Denda Retribusi atas SKRD Tahun 2021 yang belum dibayar WR	14.577.031,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari penurunan saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas Setoran Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga di BLUD yang telah diterima pembayarannya sebelum TA 2021	25.460.000,00
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dikarenakan adanya kenaikan saldo Piutang BLUD yang diakui sebagai Pendapatan-LO di Tahun 2021 yang pelayanan yang telah diberikan	43.931.723.583,00
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LRA dalam LO diakui sebagai surplus/defisit penjualan aset tetap Tahun 2021	(19.090.000,00)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya penurunan saldo Piutang Denda Pajak yang telah diakui sebagai Pendapatan-LO sebelum Tahun 2021 yang telah dibayar WP di Tahun 2021	(15.156.608,00)
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya penurunan saldo Piutang BLUD yang telah diakui sebagai Pendapatan-LO sebelum Tahun 2021 yang telah dibayar pihak ketiga di Tahun 2021	(19.557.255.396,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	24.537.529.424,00

6.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer - LO Tahun 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2021 dan 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	1.012.531.391.495,00	957.272.563.402,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	133.825.074.163,13	139.400.191.553,11
Jumlah	1.146.356.465.658,13	1.096.672.754.955,11

6.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2021 dan 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Dana Perimbangan - LO		
➢ Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	27.677.029.795,00	22.582.034.404,00
➢ Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	700.663.380.000,00	713.291.169.000,00
➢ Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	82.936.341.064,00	38.269.064.645,00
➢ Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	142.928.087.636,00	143.879.808.353,00
Dana Insentif Daerah - LO	58.326.553.000,00	39.250.487.000,00
Jumlah	1.012.531.391.495,00	957.272.563.402,00

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2021 ini *lebih kecil* dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2021 sebesar Rp85.289.248.000,00 (Rp1.012.531.391.495,00 - Rp1.097.820.639.495,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(85.289.248.000,00)
Penjelasan Selisih:	
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Nilai
✓ Pengurangan Pendapatan-LO atas tidak diakuinya penerimaan Dana Desa tahun berjalan sebagai pendapatan operasional sehubungan dengan penerapan Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua	(85.289.248.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(85.289.248.000,00)

6.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2021 dan 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	100.736.744.338,13	105.853.149.098,11
Bantuan Keuangan - LO		
➢ Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO	33.088.329.825,00	33.047.042.455,00
➢ Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO	0,00	0,00
➢ Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LO	0,00	500.000.000,00
Jumlah	133.825.074.163,13	139.400.191.553,11

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2021 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2021 sebesar Rp12.712.743.412,00 (Rp133.825.074.163,13 - Rp121.112.330.751,13). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	12.712.743.412,00
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dari kenaikan saldo Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2021	20.554.122.915,00
✓ Koreksi Ekuitas atas kurang catat saldo Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2020	0,76
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengurangan Pendapatan-LO dikarenakan adanya penurunan saldo Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi yang telah disebabkan telah dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Provinsi Bali atas pengakuan piutang sebelum Tahun 2021	(7.841.379.503,76)
Jumlah Penjelasan Selisih	12.712.743.412,00

6.4.1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2021 dan 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Pendapatan Hibah - LO	65.724.400.333,88	80.867.110.851,25
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO	81.513.723.895,81	68.619,82
Jumlah	147.238.124.229,69	80.867.179.471,07

6.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah - LO Tahun 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2021 dan 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	65.724.284.106,50	75.544.295.979,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	4.929.230.872,25
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan - LO	116.227,38	393.584.000,00
Jumlah	65.724.400.333,88	80.867.110.851,25

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2021 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2021 sebesar Rp63.051.284.106,50 (Rp65.724.400.333,88 - Rp2.673.116.227,38). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	63.051.284.106,50
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pengakuan penerimaan Pendapatan Hibah berupa Barang selama Tahun 2021	63.051.284.106,50
Jumlah Penjelasan Selisih	63.051.284.106,50

6.4.1.3.2 Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2021 dan 2020 yaitu saldo rincian Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2021 dan 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Pendapatan Hibah Dana BOS - LO	73.630.363.100,00	0,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah - LO	7.883.360.795,81	68.619,82
Jumlah	81.513.723.895,81	68.619,82

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LO Tahun 2021 ini *sama dengan* saldo Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LRA TA 2021.

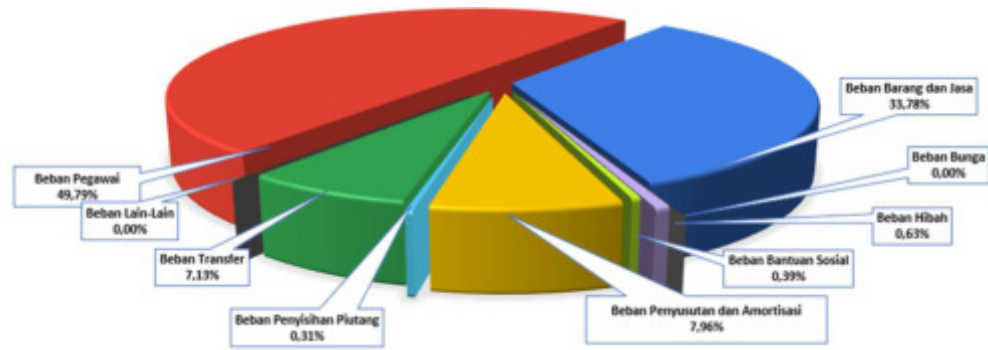
6.4.2 Beban Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2021 dan 2020 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2021 dan 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Beban Pegawai	742.492.885.662,27	806.101.540.990,29
Beban Barang dan Jasa	503.767.328.332,96	317.513.345.039,40
Beban Bunga	0,00	2.785.820,91
Beban Hibah	9.380.754.598,00	72.313.052.905,72
Beban Bantuan Sosial	5.840.120.000,00	10.962.390.600,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	118.717.251.518,50	118.483.960.745,40
Beban Penyisihan Piutang	4.635.773.840,44	4.533.913.884,19
Beban Transfer	106.295.620.778,26	103.802.712.247,74
Beban Lain-Lain	0,00	8.956.327.284,61
Jumlah	1.491.129.734.730,43	1.442.670.029.518,26

Penjelasan:

Komposisi realisasi Beban Operasional Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



6.4.2.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2021 dan 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	423.912.953.504,00	427.726.301.186,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	103.374.413.849,00	221.470.186.435,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	135.706.751.725,79	61.566.724.291,29
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	28.492.437.266,00	24.630.368.946,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	666.672.357,21	745.715.232,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	787.000.000,00	3.983.100.000,00
Beban Honorarium PNS	0,00	2.345.885.000,00
Beban Honorarium Non-PNS	0,00	4.138.431.000,00
Beban Honorarium Dewan Pengawas BLUD	0,00	94.018.800,00
Beban Uang Transport	0,00	2.019.975.000,00
Beban Upah Non-ASN	0,00	57.380.835.100,00
Beban Pegawai BOS	0,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	49.552.656.960,27	0,00
Jumlah	742.492.885.662,27	806.101.540.990,29

Penjelasan:

Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2021 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2021 sebesar Rp1.539.666.919,89 (Rp742.492.885.662,27 - Rp744.032.552.582,16). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(1.539.666.919,89)
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban LO:	
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Pegawai yang berasal dari reklasifikasi Belanja Tidak terduga yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19 di TA 2021	558.425.000,00
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Utang Belanja Pegawai pada SKPD Non-BLUD	5.593.771.336,00
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Utang Belanja Pegawai pada BLUD RSUD Karangasem	27.720.403.057,27
✓ Koreksi Ekuitas atas kurang catat pengakuan Utang Belanja Pegawai di Sekretariat Daerah	0,20
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan Beban LO atas pembayaran Utang Belanja Pegawai yang telah diakui bebannya sebelum Tahun 2021 pada SKPD Non-BLUD	(24.462.714.762,51)
✓ Pengurangan Beban LO atas pembayaran Utang Belanja Pegawai yang telah diakui bebannya sebelum Tahun 2021 pada SKPD Non-BLUD	(10.721.777.387,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Nilai
✓ Koreksi Ekuitas atas lebih catat pengakuan Utang Belanja Pegawai di 9 (sembilan) SKPD	(227.774.163,85)
Jumlah Penjelasan Selisih	(1.539.666.919,89)

6.4.2.2 **Beban Barang dan Jasa**

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2021 dan 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Beban Barang	123.995.546.567,23	100.494.894.081,47
Beban Jasa	220.959.843.738,43	164.928.370.735,51
Beban Pemeliharaan	18.299.104.693,14	27.192.578.615,42
Beban Perjalanan Dinas	13.631.699.775,00	24.897.501.607,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.807.170.000,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOS	53.570.145.927,46	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	63.503.817.631,70	0,00
Jumlah	503.767.328.332,96	317.513.345.039,40

Penjelasan:

Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2021 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2021 sebesar Rp60.783.736.319,26 (Rp503.767.328.332,96 - Rp442.983.592.013,70). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	60.783.736.319,26
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban LO:	
✓ Penambahan Beban LO karena penggunaan persediaan TA 2020 dalam pelaksanaan kegiatan operasional	14.594.000.392,24
✓ Penambahan Beban LO karena penggunaan barang yang diperoleh secara hibah dari pihak ketiga	61.681.172.806,50
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Barang dan Jasa yang berasal dari reklasifikasi Belanja Tidak terduga yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19 di TA 2021	696.680.950,00
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Barang dan Jasa Pakai Habis yang berasal dari reklasifikasi Belanja Modal	87.882.716,00
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Barang dan Jasa Tidak Pakai Habis yang berasal dari reklasifikasi Belanja Modal	3.040.027.549,00
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Barang dan Jasa Pemeliharaan yang berasal dari reklasifikasi Belanja Modal	8.650.000,00
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban yang berasal dari Beban Dibayar Dimuka yang telah belum diakui sebagai Beban saat pengeluaran kas	111.619.863,00
✓ Pengakuan Beban LO karena adanya penambahan Utang Belanja Barang dan Jasa	10.597.773.370,00
✓ Koreksi ekuitas lebih catat persediaan awal TA 2021	6.037.242,00
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan Beban LO karena adanya pembayaran Utang Belanja yang Beban-nya telah diakui sebelum Tahun 2021	(3.749.641.627,00)
✓ Pengurangan Beban LO karena adanya pengakuan Beban Dibayar Dimuka, sehingga pengakuan beban dialokasikan secara bertahap	(123.951.118,07)
✓ Pengurangan Beban LO karena adanya kapitaslisasi sebagai Aset Tetap atas Belanja Jasa dan Belanja Pemeliharaan	(9.052.334.262,60)
✓ Pengurangan Beban LO atas pengakuan Beban Jasa yang direklasifikasi menjadi Beban Hibah	(49.879.500,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Nilai
✓ Pengurangan Beban LO atas pengakuan persediaan yang berasal dari belanja barang TA 2021	(17.063.302.061,81)
✓ Koreksi Ekuitas atas lebih catat Utang Belanja Jasa BLUD RSUD Karangasem	(1.000.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	60.783.736.319,26

6.4.2.3 Beban Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bunga Tahun 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Beban Bunga yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2021 dan 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Beban Bunga	0,00	2.785.820,91

Penjelasan:

Pengakuan Beban Bunga dalam LO Tahun 2021 ini *sama dengan* saldo Belanja Bunga dalam LRA TA 2021

6.4.2.4 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2021 dan 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.191.833.260,00	13.199.816.000,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.386.128.490,00	52.181.223.651,72
Beban Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	6.129.220.406,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	802.792.848,00	802.792.848,00
Jumlah	9.380.754.598,00	72.313.052.905,72

Penjelasan:

Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2021 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2021 sebesar Rp8.705.982.106,83 (Rp9.380.754.598,00 - Rp18.086.736.704,83). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(8.705.982.106,83)
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban LO	
✓ Penambahan Beban LO yang berasal dari penyerahan persediaan barang yang kepada masyarakat/pihak ketiga dari Belanja TA 2020 yang diakui sebagai Beban Hibah TA 2021	1.879.919.000,00
✓ Penambahan Beban LO atas pengakuan Beban Hibah yang berasal dari reklasifikasi Beban Jasa	49.879.500,00
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan Beban LO dikarenakan terdapat Belanja Hibah Barang yang belum diserahkan sampai dengan tanggal Neraca dan diakui sebagai Persediaan Barang	(10.635.780.606,83)
Jumlah Penjelasan Selisih	(8.705.982.106,83)

6.4.2.5 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2021 dan 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Beban Bantuan Sosial kepada Individu	50.120.000,00	314.761.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	5.280.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	510.000.000,00	1.244.700.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Beban Bantuan Sosial Barang/Jasa yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Ketiga	0,00	9.402.929.600,00
Jumlah	5.840.120.000,00	10.962.390.600,00

Penjelasan:

Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2021 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2021 Rp510.000.000,00 (Rp5.840.120.000,00 - Rp5.330.120.000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Beban Bantuan Sosial dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	510.000.000,00
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban LO:	
✓ Penambahan Beban atas pengakuan Beban Bantuan Sosial yang berasal dari reklasifikasi Belanja Tidak terduga yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sosial di TA 2021	510.000.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	510.000.000,00

6.4.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2021 dan 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	36.563.558.881,10	34.281.082.275,52
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	30.407.801.433,42	29.583.982.629,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	51.700.997.807,98	54.587.820.840,88
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	44.893.396,00	31.075.000,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	118.717.251.518,50	118.483.960.745,40

Penjelasan:

1. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2021 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 dalam Neraca per 31 Desember 2021 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *Poin 6.1.1.3.7*; dan
2. Rincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi pada masing-masing SKPD telah diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *Poin 6.1.1.3.7*, dan juga dapat dilihat pada *Lampiran 14*.

6.4.2.7 Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2021 dan 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
➢ Beban Penyisihan Piutang Pendapatan		
✓ Beban Penyisihan Piutang Pajak	4.249.785.942,76	4.405.313.965,86
✓ Beban Penyisihan Piutang Retribusi	854.102,57	25.263.397,02
✓ Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	258.006.361,00	24.906.726,27
✓ Beban Penyisihan Piutang Transfer	127.127.434,11	78.413.795,04
➢ Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	16.000,00
Jumlah	4.635.773.840,44	4.533.913.884,19



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Penjelasan:

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2021 ini *lebih besar* dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 dalam Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp151.676.000,00 [Rp4.635.773.840,44 - (Rp42.777.266.571,10 - Rp38.293.168.730,66)]. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	151.676.000,00
Penjelasan Selisih:	
➢ Pengurangan Penyisihan Piutang:	
✓ Koreksi Ekuitas kelebihan pengakuan Penyisihan Piutang akibat SKRD IMB yang ternyata dibatalkan pengajuannya oleh WR	151.660.000,00
✓ Koreksi Ekuitas atas kelebihan pengakuan penyisihan Piutang Lainnya	16.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	151.676.000,00

6.4.2.8 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2021 dan 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan	12.330.248.939,91	9.861.420.247,74
Beban Transfer Bantuan Keuangan	93.965.371.838,35	93.941.292.000,00
Jumlah	106.295.620.778,26	103.802.712.247,74

6.4.2.8.1 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2021 dan 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	11.135.846.278,38	8.411.720.362,09
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.194.402.661,53	1.449.699.885,65
Jumlah	12.330.248.939,91	9.861.420.247,74

Penjelasan:

Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO Tahun 2021 ini *lebih besar* dari saldo Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LRA TA 2021 sebesar Rp275.162.027,68 (Rp12.330.248.939,91 - Rp12.055.086.912,23). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	275.162.027,68
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban LO:	
✓ Penambahan Beban atas pengakuan Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2021	1.208.113.566,01
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan Beban atas pembayaran Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2020 di Tahun 2021	(932.951.538,33)
Jumlah Penjelasan Selisih	275.162.027,68

6.4.2.8.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bantuan Keuangan yang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2021 dan 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	93.965.371.838,35	93.941.292.000,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00
Jumlah	93.965.371.838,35	93.941.292.000,00

Penjelasan:

1. Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2021 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2021 sebesar Rp85.289.248.000,00 (Rp93.965.371.838,35 - Rp179.254.619.838,35). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	(85.289.248.000,00)
Penjelasan Selisih:	
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Tidak diakuinya pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari Dana Desa tahun berjalan sebagai beban operasional sehubungan dengan penerapan Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akruar	(85.289.248.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(85.289.248.000,00)

2. Berdasarkan Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akruar, Beban Transfer Dana Desa dalam penyajian LO tidak diakui sebagai beban dikarenakan pengukuran kinerja atas pemanfaatan dana desa terletak pada desa bukan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan yang disajikan dalam LRA yang berbasis kas.

6.4.2.9 Beban Lain-Lain

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Lain-Lain Tahun 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Beban Lain-Lain yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2021 dan 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Beban Penurunan Nilai Investasi	0,00	0,00
Beban Lain-Lain	0,00	8.956.327.284,61
Jumlah	0,00	8.956.327.284,61

6.4.3 Surplus Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan nonoperasional di Tahun 2021 dan 2020 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
➢ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO		
✓ Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - Aset Lainnya - LO	19.090.000,00	0,00
➢ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
Jumlah	19.090.000,00	0,00

Penjelasan:

Surplus Penjualan Aset Non-Lancar Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 merupakan surplus atas penjualan Aset Lainnya berupa Aset Tetap baik yang telah dihentikan penggunaannya (Aset Tetap Rusak Berat) maupun yang belum dihentikan penggunaannya (masih tercatat sebagai Aset Tetap dan penjualan sebagian dari bagian bongkaran Aset Tetap).



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

6.4.4 Defisit Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2021 dan 2020 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem selama melakukan kegiatan nonoperasional di Tahun 2021 dan 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
➢ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	27.580.667,00	0,00
➢ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
Jumlah	27.580.667,00	0,00

Penjelasan:

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO Pemerintah Kabupaten Karangasem sebesar Rp27.580.667,00 merupakan defisit atas Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO berupa Gedung dan Bangunan dalam kondisi Baik (Aset Tetap) di Dinas Perhubungan sebesar Rp21.934.000,00 dan Gedung dan Bangunan dalam kondisi Rusak Berat (Aset Lainnya) di Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp5.646.667,00.

6.4.5 Pos Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pos Luas Biasa Tahun 2021 dan 2020 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem di Tahun 2021 dan 2020 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Beban Luar Biasa	354.774.361,00	789.069.803,00

Penjelasan:

Pengakuan Beban Luar Biasa dalam LO Tahun 2021 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Tidak Terduga dalam LRA TA 2021 sebesar Rp1.765.105.950,00 (Rp354.774.361,00 – Rp2.119.880.311,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Luar Biasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	(1.765.105.950,00)
Penjelasan Selisih:	
➢ Pengurangan Beban dalam LO:	
✓ Reklasifikasi Belanja Tidak Terduga yang diakui sebagai Beban Pegawai	(558.425.000,00)
✓ Reklasifikasi Belanja Tidak Terduga yang diakui sebagai Beban Barang dan Jasa	(696.680.950,00)
✓ Reklasifikasi Belanja Tidak Terduga yang diakui sebagai Beban Bantuan Sosial	(510.000.000,00)
Jumlah Penjelasan Selisih	(1.765.105.950,00)

6.4.6 Surplus/(Defisit) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2021 dan 2020 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Kegiatan Operasional		
➢ Pendapatan Daerah - LO		
✓ Pendapatan Asli Daerah - LO	285.450.562.639,28	225.912.056.058,62
✓ Pendapatan Transfer - LO	1.146.356.465.658,13	1.096.672.754.955,11
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO	147.238.124.229,69	80.867.179.471,07
➢ Beban Operasional		
✓ Beban Operasional	1.491.129.734.730,43	1.442.670.029.518,26
Kegiatan Non-Operasional		
➢ Surplus Non-Operasional		
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	19.090.000,00	0,00
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00



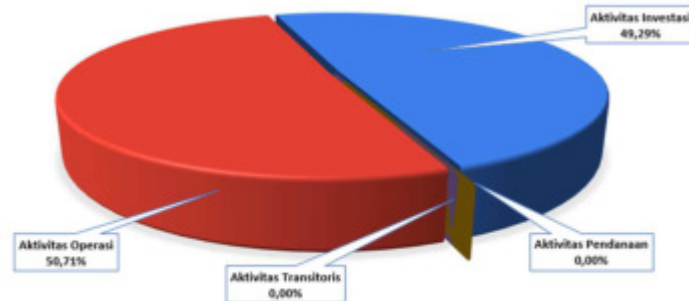
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
> Defisit Non-Operasional		
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	27.580.667,00	0,00
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
Pos Luar Biasa		
✓ Beban Luar Biasa	354.774.361,00	789.069.803,00
Jumlah	87.552.152.768,67	(40.007.108.836,46)

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada *Poin 6.2.2*.

6.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Berikut gambar diagram pengaruh keempat aktivitas tersebut perubahan Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Karangasem di Tahun 2021.



Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

6.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama Tahun 2021 dan 2020, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.555.792.467.854,48	1.475.561.872.299,19
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.403.862.588.362,27	1.383.056.332.773,06
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	151.929.879.492,21	92.505.539.526,13

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

6.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
➤ Pendapatan Pajak Daerah - LRA		
✓ Pajak Hotel - LRA	1.174.092.427,00	8.051.666.279,00
✓ Pajak Restoran - LRA	1.913.140.738,00	4.718.016.350,00
✓ Pajak Hiburan - LRA	7.132.565,00	53.489.252,00
✓ Pajak Reklame - LRA	494.230.700,00	372.757.800,00
✓ Pajak Penerangan Jalan - LRA	13.555.934.891,00	14.338.466.418,00
✓ Pajak Parkir - LRA	2.880.000,00	28.096.500,00
✓ Pajak Air Tanah - LRA	622.734.492,00	812.647.583,00
✓ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	51.903.906.750,00	21.755.835.642,00
✓ Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	5.790.768.710,00	4.551.563.030,00
✓ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	10.202.658.816,00	11.823.978.303,75
➤ Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		
✓ Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	1.825.628.400,00	2.208.821.550,00
✓ Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	251.360.000,00	322.140.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
✓ Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	209.892.000,00	155.041.000,00
✓ Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	3.592.466.000,00	2.830.648.000,00
✓ Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	569.622.150,00	314.778.600,00
✓ Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	0,00	0,00
✓ Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	41.385.000,00	48.440.000,00
✓ Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	0,00	0,00
✓ Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	685.593.751,00	745.397.481,00
✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	220.696.000,00	226.638.000,00
✓ Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	0,00	0,00
✓ Retribusi Terminal - LRA	124.974.000,00	129.092.000,00
✓ Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	229.953.000,00	194.894.000,00
✓ Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	30.328.000,00	30.749.000,00
✓ Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga - LRA	109.155.000,00	493.845.000,00
✓ Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	28.620.000,00	12.000.000,00
✓ Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	814.253.580,00	1.032.431.040,00
✓ Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	58.500.000,00	40.000.000,00
✓ Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LRA	4.307.500,00	4.060.000,00
✓ Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	411.122.400,00	561.586.000,00
➤ Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	10.759.415.258,47	11.968.117.309,66
➤ Lain-Lain PAD yang Sah - LRA		
✓ Penerimaan Jasa Giro - LRA	2.950.057.395,39	3.678.355.590,36
✓ Pendapatan Bunga - LRA	1.400.000.000,00	0,00
✓ Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	296.752.739,11	768.404.679,82
✓ Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LRA	2.070.000,00	6.372.320,00
✓ Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	183.524.604,53	10.515.978,00
✓ Pendapatan Denda Pajak - LRA	981.252.219,00	325.792.412,00
✓ Pendapatan Denda Retribusi - LRA	0,00	1.705.509,00
✓ Pendapatan dari Pengembalian - LRA	17.452.378,00	162.662.060,00
✓ Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	0,00	0,00
✓ Pendapatan BLUD - LRA	119.229.486.434,66	97.297.787.284,37
✓ Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LRA	21.965.409.586,00	26.467.786.875,00
✓ Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LRA	0,00	2.661.758.426,38
✓ Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LRA	11.900.000,00	0,00
✓ Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0,00	28.342.918,00
➤ Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		
✓ Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) - LRA	27.677.029.795,00	22.582.034.404,00
✓ Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	700.663.380.000,00	713.291.169.000,00
✓ Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA	82.936.341.064,00	38.269.064.645,00
✓ Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	142.928.087.636,00	143.879.808.353,00
✓ Dana Insentif Daerah - LRA	58.326.553.000,00	39.250.487.000,00
✓ Dana Desa - LRA	85.289.248.000,00	81.803.656.000,00
➤ Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah - LRA		
✓ Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	88.024.000.926,13	108.747.242.652,03
✓ Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA	33.088.329.825,00	33.047.042.455,00
✓ Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA	0,00	500.000.000,00
✓ Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA	0,00	0,00
➤ Pendapatan Hibah - LRA		
✓ Pendapatan Hibah Uang dari Pemerintah Pusat - LRA	2.673.000.000,00	11.637.698.979,00
✓ Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis - LRA	116.227,38	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
✓ Pendapatan Hibah Dana BOS - LRA	0,00	63.318.920.000,00
➤ Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA		
✓ Pendapatan Hibah Dana BOS - LRA	73.630.363.100,00	0,00
✓ Pendapatan atas Pengembalian Hibah - LRA	7.883.360.795,81	0,00
✓ Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	68.619,82
Jumlah	1.555.792.467.854,48	1.475.561.872.299,19

6.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
➤ Belanja Pegawai		
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	426.075.954.929,00	431.708.875.697,00
✓ Belanja Tambahan Penghasilan ASN	103.157.887.185,00	205.489.580.388,00
✓ Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	152.393.858.547,23	5.176.846.504,97
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28.492.705.759,00	21.247.268.946,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	571.114.871,93	145.715.232,00
✓ Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	787.000.000,00	3.983.100.000,00
✓ Belanja Pegawai BLUD	32.554.031.290,00	0,00
✓ Belanja Honorarium PNS	0,00	1.599.560.000,00
✓ Belanja Honorarium Non-PNS	0,00	4.138.431.000,00
✓ Belanja Honorarium Dewan Pengawas BLUD	0,00	94.018.800,00
✓ Belanja Uang Transport	0,00	1.829.550.000,00
✓ Belanja Upah Non-ASN	0,00	57.380.835.100,00
➤ Belanja Barang dan Jasa		
✓ Belanja Barang	60.183.032.379,00	99.000.276.285,22
✓ Belanja Jasa	222.204.909.475,50	218.031.587.995,94
✓ Belanja Pemeliharaan	25.192.135.255,74	27.925.420.347,42
✓ Belanja Perjalanan Dinas	13.631.699.775,00	24.897.501.607,00
✓ Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.807.170.000,00	3.288.880.590,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOS	53.570.145.927,46	0,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD	58.394.499.201,00	0,00
✓ Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	218.269.200,00
✓ Belanja Lainnya	0,00	2.738.410.800,00
➤ Belanja Bunga		
✓ Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0,00	2.785.820,91
➤ Belanja Hibah		
✓ Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.191.833.260,00	13.199.816.000,00
✓ Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
✓ Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.092.110.596,83	52.181.223.651,72
✓ Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	802.792.848,00	0,00
➤ Belanja Bantuan Sosial		
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	50.120.000,00	314.761.000,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	5.280.000.000,00	0,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	727.500.000,00
➤ Belanja Tak Terduga		
✓ Belanja Tak Terduga	2.119.880.311,00	19.630.352.099,09
➤ Transfer Bagi Hasil Pendapatan		
✓ Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	10.816.925.541,00	10.108.324.974,14
✓ Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.238.161.371,23	1.449.699.885,65



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
➤ Transfer Bantuan Keuangan		
✓ Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	179.254.619.838,35	175.744.948.000,00
✓ Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	802.792.848,00
Jumlah	1.403.862.588.362,27	1.383.056.332.773,06

6.5.2 Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem selama tahun 2021 dan 2020, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	19.090.000,00	0,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	147.668.862.436,15	81.578.987.875,56
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(147.649.772.436,15)	(81.578.987.875,56)

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

6.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
➤ Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LRA		
✓ Penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - LRA	19.090.000,00	0,00
✓ Penjualan Aset Lainnya - Rusak Berat - LRA	0,00	0,00
Jumlah	19.090.000,00	0,00

6.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
➤ Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
✓ Belanja Modal Alat Besar	296.555.050,00	212.146.101,00
✓ Belanja Modal Alat Angkutan	1.921.992.318,00	822.630.000,00
✓ Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	656.466.298,00	900.000,00
✓ Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	667.142.044,00
✓ Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.175.054.651,00	13.169.547.623,00
✓ Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.095.253.320,00	1.056.923.800,00
✓ Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	14.550.757.921,00	9.189.066.555,17
✓ Belanja Modal Alat Laboratorium	618.582.000,00	1.861.333.898,90
✓ Belanja Modal Komputer	11.640.911.599,63	7.274.284.261,00
✓ Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	260.000.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Alat Peraga	79.111.500,00	631.834.440,00
✓ Belanja Modal Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	75.241.000,00
✓ Belanja Modal Rambu-Rambu	206.263.600,00	0,00
✓ Belanja Modal Peralatan Olahraga	84.542.700,00	0,00
➤ Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
✓ Belanja Modal Bangunan Gedung	14.485.759.090,17	18.732.981.205,49
✓ Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.126.597.026,35	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
✓ Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	372.202.000,00
➤ Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
✓ Belanja Modal Jalan dan Jembatan	59.198.917.612,00	15.737.469.730,00
✓ Belanja Modal Bangunan Air	14.677.567.780,00	3.760.355.000,00
✓ Belanja Modal Instalasi	858.332.000,00	442.990.447,00
✓ Belanja Modal Jaringan	453.023.600,00	525.104.200,00
➤ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
✓ Belanja Modal Bahan Perpustakaan	445.552.870,00	1.561.065.610,00
✓ Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	112.096.500,00	759.918.500,00
✓ Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	70.000.000,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	3.583.822.000,00	4.655.851.460,00
✓ Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	141.703.000,00	0,00
➤ Penyertaan Modal Daerah		
✓ Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.000.000.000,00	0,00
Jumlah	147.668.862.436,15	81.578.987.875,56

6.5.3 Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama tahun 2021 dan 2020, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	3.213.636,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	65.436.458,22
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	(62.222.822,22)

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

6.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
➤ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
✓ Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	3.213.636,00
Jumlah	0,00	3.213.636,00

6.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
➤ Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
✓ Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0,00	65.436.458,22
Jumlah	0,00	65.436.458,22



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

6.5.4 Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk TA 2021. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Karangasem selama tahun 2021 dan 2020, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	116.552.585.974,63	93.504.384.271,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	116.552.585.974,63	93.504.384.271,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

6.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
➤ Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
✓ Iuran Wajib Pegawai	7.011.982.219,00	4.203.424.588,00
✓ Pajak Penghasilan	35.863.751.146,27	30.228.336.502,00
✓ Pajak Pertambahan Nilai	21.333.504.583,36	14.330.663.645,00
✓ Tabungan Perumahan Umum	6.000,00	438.980.000,00
✓ Tabungan Asuransi Pensiunan	23.793.138.866,00	24.771.428.040,00
✓ Askes 4% PNS	24.533.248.302,00	16.806.782.591,00
✓ PFK Lainnya	410.001.634,00	0,00
✓ Iuran JKK PNS	655.659.239,00	681.192.522,00
✓ Iuran JKM PNS	1.965.893.992,00	2.043.576.383,00
✓ Iuran Askes Non-PNS	450.604.167,00	0,00
✓ Iuran JKK Non-PNS	237.485.119,06	0,00
✓ Iuran JKM Non-PNS	297.310.706,94	0,00
Jumlah	116.552.585.974,63	93.504.384.271,00

Untuk Tahun 2021, Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem telah termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD RSUD Karangasem. Rincian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada lampiran 37.

6.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
➤ Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
✓ Iuran Wajib Pegawai	7.011.982.219,00	4.203.424.588,00
✓ Pajak Penghasilan	35.863.751.146,27	30.228.336.502,00
✓ Pajak Pertambahan Nilai	21.333.504.583,36	14.330.663.645,00
✓ Tabungan Perumahan Umum	6.000,00	438.980.000,00
✓ Tabungan Asuransi Pensiunan	23.793.138.866,00	24.771.428.040,00
✓ Askes 4% PNS	24.533.248.302,00	16.806.782.591,00
✓ PFK Lainnya	410.001.634,00	0,00
✓ Iuran JKK PNS	655.659.239,00	681.192.522,00
✓ Iuran JKM PNS	1.965.893.992,00	2.043.576.383,00
✓ Iuran Askes Non-PNS	450.604.167,00	0,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
✓ Iuran JKK Non-PNS	237.485.119,06	0,00
✓ Iuran JKM Non-PNS	297.310.706,94	0,00
Jumlah	116.552.585.974,63	93.504.384.271,00

Untuk Tahun 2021, Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem telah termasuk dengan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD RSUD Karangasem. Rincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada *lampiran 37*.

6.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	151.929.879.492,21	92.505.539.526,13
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(147.649.772.436,15)	(81.578.987.875,56)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	(62.222.822,22)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Jumlah	4.280.107.056,06	10.864.328.828,35

6.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2021 dan 2020 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Kas di Kas Daerah	96.186.075.081,08	85.409.173.373,63
Kas di Bendahara Penerimaan	151.425.337,00	25.684.500,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	5.223.145.957,67	348.838.216,30
Kas Dana BOS	4.327.431.952,82	2.270.593.337,01
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	8.020.258.152,31	11.787.530.628,93
Kas di Bendahara Penanggulangan Bencana	0,00	3.127.492.298,66
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	113.908.336.480,88	102.969.312.354,53

6.5.7 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Tahun 2021 dan 2020 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Koreksi kesalahan pengakuan kas dana kapitasi di puskesmas	0,00	28.550,00
Koreksi kesalahan pengakuan kas atas pajak daerah dan denda pajak daerah TA 2019 yang belum diakui di Bendahara Penerimaan BPKAD	0,00	74.666.748,00
Jumlah	0,00	74.695.298,00

Koreksi SiLPA Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL pada *Poin 6.6.4* di bawah.

6.5.8 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2021 dan 2020 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Kas di Kas Daerah	79.947.618.428,19	96.186.075.081,08
Kas di Bendahara Penerimaan	138.005.806,00	151.425.337,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	31.327.854.583,33	5.223.145.957,67



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Kas Dana BOS	2.525.986.369,11	4.327.431.952,82
Kas Dana Kapitasi di FKTP	4.248.978.350,31	8.020.258.152,31
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	343.422.868,36	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	118.531.866.405,30	113.908.336.480,88

Pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak menyajikan Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) atas utang yang disajikan sebagai utang PFK dalam saldo akhir kas. Sedangkan di Tahun 2021 Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) yang merupakan saldo utang PFK disajikan sebagai bagian dari saldo akhir kas, sehingga saldo akhir kas sama dengan saldo kas dan setara kas di Neraca per 31 Desember 2021.

Dalam Dana Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada *Poin 6.3.5* di atas.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

6.6 Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL

LP SAL merupakan laporan yang menyajikan gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kabupaten Karangasem (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

6.6.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2021 dan 2020 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Kas di Kas Daerah	96.186.075.081,08	85.409.173.373,63
Kas di Bendahara Penerimaan	151.425.337,00	25.684.500,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	5.223.145.957,67	348.838.216,30
Kas Dana BOS	4.327.431.952,82	2.270.593.337,01
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	8.020.258.152,31	11.787.530.628,93
Kas di Bendahara Penanggulangan Bencana	0,00	3.127.492.298,66
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	113.908.336.480,88	102.969.312.354,53

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2020 dan 2019 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem. Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA.

6.6.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2021 dan 2020 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	113.908.336.480,88	103.044.007.652,53

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2020 dan 2019 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2021 dan 2020 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karangasem selama TA 2021 dan 2020. Untuk saldo SiLPA TA 2020, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA TA 2020 dikarenakan adanya koreksi penyajian atas kesalahan pengakuan SiLPA Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2020 sebagaimana diungkapkan dalam catatan *point* 6.6.4 di bawah.

6.6.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2021 dan 2020 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	118.188.443.536,94	113.908.336.480,88

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Karangasem pada TA 2021 dan 2020 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2020 dan 2021. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada *point* 6.3.5. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada *point* 6.6.5 di bawah.

6.6.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2021 dan 2020 yang terdiri dari:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Koreksi kesalahan pengakuan kas dana kapitasi di puskesmas	0,00	(28.550,00)
Koreksi kesalahan pengakuan kas atas pajak daerah dan denda pajak daerah TA 2019 yang belum diakui di Bendahara Penerimaan BPKAD	0,00	(74.666.748,00)
Jumlah	0,00	(74.695.298,00)

6.6.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Kabupaten Karangasem per 31 Desember 2021 dan 2020 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Kas di Kas Daerah	79.947.618.428,19	96.186.075.081,08
Kas di Bendahara Penerimaan	138.005.806,00	151.425.337,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	31.327.854.583,33	5.223.145.957,67
Kas Dana BOS	2.525.986.369,11	4.327.431.952,82
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	4.248.978.350,31	8.020.258.152,31
Setara Kas	0,00	0,00
Jumlah	118.188.443.536,94	113.908.336.480,88

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada *point* 6.3.5. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada *point* 6.6.3 di atas.



6.7 Pengungkapan Informasi untuk Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja

Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak menerapkan basis akrual atas pendapatan dan belanja, seluruh nilai-nilai dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disajikan dengan basis kas. Sehingga tidak perlu dilakukan rekonsiliasi dengan basis kas. Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul karena penerapan basis akrual. Pos-pos aset seperti: Sewa Dibayar Dimuka, Biaya Dibayar Dimuka, Pendapatan/Laba yang Masih Harus Diterima, dan pos kewajiban seperti: Utang Bunga, Pendapatan Diterima Dimuka timbul murni karena penerapan basis akrual pada pos aset dan kewajiban serta tidak mempengaruhi pos-pos pendapatan dan belanja.

6.8 Pengungkapan Informasi untuk Kejadian setelah Tahun Pelaporan

Pada Tahun 2021 dunia masih berada dalam situasi pandemi yaitu Covid-19 yang mempengaruhi tatanan kehidupan baik sosial, ekonomi, politik seluruh dunia termasuk Indonesia. Provinsi Bali khususnya Kabupaten Karangasem termasuk salah satu daerah yang harus menerapkan suatu pola baru dalam kehidupan sehari-hari untuk memutus mata rantai dari penyebaran Covid-19 ini. Pemerintahan mengalami suatu perubahan seiring kebijakan pusat yang harus diikuti oleh daerah. Adapun beberapa hal yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2021 adalah:

1. Potensi ketertagihan piutang daerah yang material kepada pihak ketiga yang kelangsungan usahanya terganggu sebagai dampak dari pandemi yaitu Piutang pajak daerah untuk 8 jenis pajak daerah, meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, air tanah, PPJ dan MBLB dengan piutang kondisi per-31 Desember 2021 sekitar 82,10 Milyar, potensi ketertagihan terhadap piutang pajak daerah tersebut secara keseluruhan sekitar 5,86 %. Untuk Pajak PBB P2 dengan kondisi piutang sebesar Rp51,47 Milyar, potensi ketertagihan piutang diproyeksikan sebesar 12%;
2. Kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban jangka pendek pada Tahun 2022 masih bisa dilaksanakan walaupun terjadi kebijakan anggaran. Untuk kewajiban jangka pendek pemerintah Kabupaten Karangasem sudah menganggarkan di Induk 2022 dan tidak terganggu dengan adanya perubahan kebijakan anggaran pada Tahun 2022; dan
3. Pada awal Tahun 2022 terjadi perubahan susunan perangkat Daerah di Kabupaten Karangasem berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Hal tersebut menyebabkan terjadi penggabungan beberapa unit kerja dan perangkat daerah di Kabupaten Karangasem.



BAB VII
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Pada Tahun 2021 masih diterapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Daerah ini menggantikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem dan dalam penerapannya mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah karena terjadi perubahan nomenklatur OPD di mana terdapat beberapa penggabungan urusan dan fungsi OPD, penggantian nama OPD serta pemisahan urusan dan fungsi OPD.

Pada Tahun 2021, Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 untuk menunjang pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintah adalah:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Karangasem;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Dinas Sosial;
9. Dinas Ketenagakerjaan;
10. Dinas Pemadam Kebakaran;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Dinas Ketahanan Pangan;
14. Dinas Lingkungan Hidup;
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
17. Dinas Perhubungan;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
20. Dinas Kebudayaan;
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
23. Dinas Pariwisata;
24. Dinas Perikanan;
25. Dinas Pertanian;
26. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
27. Satuan Polisi Pamong Praja;
28. Rumah Sakit Umum Daerah;
29. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
31. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
32. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
34. Kecamatan Karangasem;
35. Kecamatan Kubu;
36. Kecamatan Abang;
37. Kecamatan Bebandem;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

38. Kecamatan Selat;
39. Kecamatan Manggis;
40. Kecamatan Rendang; dan
41. Kecamatan Sidemen.

Dalam Tahun 2021, terjadi pergantian manajemen baru dalam pemerintahan, beberapa pejabat eksekutif mengalami pergantian karena mutasi ataupun pensiun, namun tidak terdapat perubahan kebijakan yang material dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian tidak ada dijumpai adanya kesalahan yang sangat material dari kebijakan manajemen yang perlu dan telah dikoreksi oleh manajemen.

Tidak terdapat komitmen dan kontijensi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan pihak lain. Sehingga tidak ada pengaruh dalam penyajian laporan keuangan.

Amlapura, 16 Agustus 2022
BUPATI KARANGASEM

GEDE DANA